



BUKU I

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 KABUPATEN TANAH LAUT



RKPD 2024



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 Juni 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

24. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 71);

25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disebut KUA APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan serta memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan dalam jangka 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. pedoman penyusunan Renja SKPD Tahun 2024; dan
 - b. pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD dan Rancangan APBD dan APBD Tahun 2024.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab IV : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. Bab VII : Penutup.

- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2024 untuk:
- menyempurnakan rancangan akhir Renja SKPD tahun 2024; dan
 - sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD tahun 2024.
- (2) Penetapan Renja SKPD tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ditetapkan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALEMAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfun

ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 808

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 69

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Hubungan antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah.....	II-1
2.1.1.1.1 Letak Geografis, Luas, dan Batas	
Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.1.2 Kondisi Topografi.....	II-4
2.1.1.1.3 Kondisi Geologi.....	II-6
2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi	II-6
2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi	II-9
2.1.1.1.6 Karakteristik Tanah	II-12
2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan.....	II-14
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-15
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-24
2.1.1.4 Kondisi Demografi	II-32
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-36
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-36
2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-36

2.1.2.1.2	Struktur Ekonomi.....	II-39
2.1.2.1.3	Inflasi	II-41
2.1.2.1.4	Pendapatan Perkapita.....	II-42
2.1.2.1.5	Indeks Gini.....	II-42
2.1.2.1.6	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin	II-44
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-46
2.1.2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	II-47
2.1.2.2.2	Angka Melek Huruf	II-49
2.1.2.2.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-50
2.1.2.2.4	Angka Harapan Lama Sekolah	II-51
2.1.2.2.5	Angka Harapan Hidup	II-52
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-53
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	II-55
2.1.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-55
2.1.3.1.1	Pendidikan	II-55
2.1.3.1.2	Kesehatan.....	II-61
2.1.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-80
2.1.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II-84
2.1.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-86
2.1.3.1.6	Sosial.....	II-88
2.1.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-95
2.1.3.2.1	Tenaga Kerja.....	II-95
2.1.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-97
2.1.3.2.3	Pangan.....	II-98
2.1.3.2.4	Lingkungan Hidup	II-100
2.1.3.2.5	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-101
2.1.3.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-102
2.1.3.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-103
2.1.3.2.8	Perhubungan	II-105
2.1.3.2.9	Komunikasi dan Informatika	II-106
2.1.3.2.10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-107

2.1.3.2.11	Penanaman Modal	II-109
2.1.3.2.12	Statistik	II-109
2.1.3.2.13	Persandian	II-110
2.1.3.2.14	Perpustakaan	II-110
2.1.3.2.15	Kearsipan	II-112
2.1.3.2.16	Pertanahan	II-113
2.1.3.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-114
2.1.3.3.1	Pertanian dan Peternakan	II-114
2.1.3.3.2	Pariwisata	II-116
2.1.3.3.3	Perikanan	II-118
2.1.3.3.4	Perdagangan	II-118
2.1.3.3.5	Perindustrian	II-119
2.1.3.4	Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan	II-120
2.1.3.4.1	Perumusan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah	II-120
2.1.3.4.2	Pengawasan	II-124
2.1.3.4.3	Perencanaan Pembangunan	II-126
2.1.3.4.4	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	II-127
2.1.3.4.5	Penelitian dan Pengembangan	II-128
2.1.3.4.6	Keuangan	II-129
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-129
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-129
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-131
2.1.4.2.1	Luas Wilayah Produktif	II-131
2.1.4.2.2	Luas Wilayah Industri	II-133
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-134
2.1.4.3.1	Proses Perizinan	II-134
2.1.4.3.2	Angka Kriminalitas	II-136
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-136
2.1.4.4.1	Rasio Ketergantungan	II-137
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Sampai dengan Tahun 2022	II-137
2.2.1	Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022	II-137

2.2.2	Faktor Penghambat, Faktor Pendorong dan Tindaklanjutan	II-148
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-149
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-149
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-150

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-5
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-6
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-13
3.2.3	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	III-19

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-3
4.2.1	Telaahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-3
4.2.2	Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024..	IV-4
4.2.3	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanah Laut.....	IV-5
4.2.4	Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	IV-6

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP..... VII-1

Lampiran Evaluasi RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan	II-2
2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut	II-3
2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan	II-5
2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tanah Laut.....	II-8
2.5 Temperatur (°C) dan Kelembaban Udara (%) Kab. Tanah Laut Tahun 2020-2022	II-10
2.6 Kecepatan Angin (knot) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 – 2022	II-11
2.7 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm) dan Penyinaran Matahari (%), Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022	II-11
2.8 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut.....	II-16
2.9 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2022.....	II-25
2.10 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan, 2022.....	II-25
2.11 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Banjir dan Angin Puting Beliung Menurut Kecamatan, 2022	II-26
2.12 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut	II-27
2.13 Indeks Risiko Bencanan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2023.....	II-28
2.14 Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	II-31
2.15 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-33
2.16 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-33
2.17 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022	II-34
2.18 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022	II-37
2.19 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2018-2022	II-37
2.20 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.Tanah Laut (%), 2018-2022	II-39
2.21 PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022.....	II-42
2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-46

2.23 Angka Melek Huruf Usia 15+ di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2023.....	II-50
2.24 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-51
2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-51
2.26 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-52
2.27 Jumlah Atlet dan Jumlah Medali yang diraih oleh atlet Kabupaten Tanah Laut, 2019 2022	II-54
2.28 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut, 2022.....	II-54
2.29 Kesenian yang diadakan di Kabupaten Tanah Laut menurut Kecamatan, 2022.....	II-55
2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-56
2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-58
2.32 Rasio Guru dan Murid TK, SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-59
2.33 Jumlah Ruang Kelas di Kabupaten Tanah Laut menurut Tingkat Pendidikan, 2018-2022	II-60
2.34 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022	II-60
2.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-62
2.36 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-62
2.37 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-63
2.38 Jumlah Kasus Penyakit di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-64
2.39 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bayi Gizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-64
2.40 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-65
2.41 Jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-65
2.42 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2022 ...	II-67
2.43 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2022.....	II-69
2.44 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2022	II-70
2.45 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2022	II-71

2.46 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2022.....	II-72
2.47 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2022.....	II-73
2.48 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2022	II-74
2.49 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2022.....	II-75
2.50 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2022.....	II-76
2.51 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Tahun 2022	II-77
2.52 Persentase Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2022.....	II-78
2.53 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2022	II-79
2.54 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-80
2.55 Jaringan Irigasi Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-81
2.56 Jumlah KK yang Terlayani Air Minum Layak dan Sanitasi Layak di Kabupaten Tanah Laut, 2022	II-82
2.57 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum, 2022.....	II-83
2.58 Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni, dan Total Rumah di Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2019-2022.....	II-84
2.59 Pengurangan Kawasan Kumuh di Perkotaan Kab. Tanah Laut, 2018-2022.....	II-84
2.60 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat, 2022	II-85
2.61 Pencapaian SPM Bidang Kenteteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2022	II-86
2.62 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2021.....	II-88
2.63 Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kab. Tanah Laut, 2022.....	II-88
2.64 Pencapaian SPM Bidang Sosial Kab. Tanah Laut, 2022	II-90
2.65 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-96

2.66 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-96
2.67 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-96
2.68 Jumlah Pernikahan Dini di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-97
2.69 Jumlah Pernikahan Dini di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-97
2.70 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-98
2.71 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2021	II-98
2.72 Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-99
2.73 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-100
2.74 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran, 2020-2022	II-101
2.75 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga, 2020-2022	II-102
2.76 Jumlah Kepemilikan KTP Elektronik, 2020-2022	II-102
2.77 Jumlah Kepemilikan KIA, 2020-2022.....	II-102
2.78 Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-103
2.79 Perkembangan Peserta KB Aktif dan Pasangan Usaha Subur di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 ...	II-104
2.80 Data Kampung KB di Kabupaten Tanah Laut, 2022.....	II-104
2.81 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-105
2.82 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-105
2.83 Jumlah Lokasi Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan, 2020-2021	II-106
2.84 Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022	II-107
2.85 Jumlah Blank Spot di Kabupaten Tanah Laut, 2022	II-107
2.86 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-108
2.87 Perkembangan Data Keragaan Koperasi Kab. Tanah Laut per Desember 2022	II-108
2.88 Data Umum Jumlah UMKM Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2022.....	II-109
2.89 Nilai Investasi Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-109
2.90 Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2018-2022	II-111
2.91 Perpustakaan yang Terstandar di Kabupaten Tanah Laut 2022.....	II-112
2.92 Jumlah Pustakawan dan Tenaga Ahli di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-112
2.93 Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022.....	II-112
2.94 SDM Pengelola Arsip Kabupaten Tanah Laut 2018-2022	II-113
2.95 Realisasi PTSL Kabupaten Tanah Laut, 2020-2022.....	II-113

2.96 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-114
2.97 Kondisi Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-115
2.98 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Ada di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-116
2.99 Perkembangan Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022.....	II-117
2.100Perkembangan Jumlah Hotel di Kabupaten Tanah Laut, 2021-2022	II-117
2.101Produksi Perikanan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 (ton)	II-118
2.102Jumlah Pasar Tradisional di Kab. Tanah Laut, 2019-2021.....	II-118
2.103Jumlah Toko Modern di Kab. Tanah Laut, 2020-2022	II-119
2.104Jumlah IKM yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna di Kab. Tanah Laut, 2019-2021	II-119
2.105Data Perangkat Daerah menurut Perda Nomor 6 Tahun 2016	II-120
2.106Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022	II-122
2.107Daftar Bank yang Ada di Kabupaten Tanah Laut, 2022.....	II-122
2.108Perkembangan Jumlah BUMD di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2022	II-122
2.109BUMD di Kabupaten Tanah Laut, 2022.....	II-123
2.110Pelaksanaan Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2018-2022.....	II-125
2.111Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Tahun 2018-2022	II-125
2.112Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Tanah Laut, 2022	II-126
2.113Perkembangan Jumlah ASN menurut Golongan Kepangkatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022 .	II-127
2.114Daftar Inovasi Daerah yang Terkirim Melalui Aplikasi Inovation Government Award (IGA) Tahun 2022.....	II-128
2.115Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kab. Tanah Laut, 2018-2022	II-129
2.116Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Tanah Laut, 2018- 2022 (persen)	II-130
2.117Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019-2021.....	II-132
2.118Rekapitulasi Izin Terbit dan Retribusinya menurut Jenis Permohonan Izin di Kabupaten Tanah Laut, 2022.....	II-134
2.119Jumlah Tindak Pidana Kejahatan yang Masuk di Kejaksaan Negeri Pelaihari, 2020-2022	II-136
2.120Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-137
2.121Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	II-137

2.122Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Tanah

Laut Tahun 2022 II-145

2.123Anggaran dan Realisasi Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022..... II-146

2.124Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Tindaklanjuti Prioritas Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2022..... II-148

3.1. Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 III-2

3.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024 III-10

3.3. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut TA 2020 - 2024..... III-18

3.4. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 III-21

4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024..... IV-1

4.2 Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten

Tanah Laut 2024 – 2026..... IV-8

4.3 Keseluruhan Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan IV-8

4.4 Prioritas, sasaran dan Program Prioritas Daerah IV-15

5.1 Daftar Pagu Indikatif per SKPD untuk membiayai Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024..... V-1

6.1 Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Tanah Laut VI-1

6.2 Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Tanah Laut VI-1

6.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut VI-2

6.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Sesuai Hasil Kesepakatan Rakortekbang) VI-5

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan.....	I-6
2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut.....	II-2
2.2 Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut	II-8
2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah	II-13
2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-32
2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2018-2022	II-38
2.6 Laju Inflasi Kota Banjarmasin (persen), 2018-2022	II-41
2.7 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-43
2.8 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2022.....	II-44
2.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	II-44
2.10 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2022	II-45
2.11 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	II-48
2.12 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota, 2022	II-49
2.13 Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Laut (EPPGBM), 2018-2022	II-66
2.14 8 (Delapan) Aksi Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota.....	II-66
2.15 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022...II-101	
3.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024	II-1
3.2 Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.....	II-2
4.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	IV-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. selain itu Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 jua memperhatikan persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan ditahun 2024 .

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu:

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
2. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
3. Penyusunan agenda tim kerja tim penyusun RKPD; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Melalui SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal - hal sebagai berikut:

1. analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
3. analisis kapasitas riil keuangan daerah;
4. penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
5. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
6. penelaahan terhadap sasaran RPD;
7. penelaahan terhadap arah kebijakan RPD;
8. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10. perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
11. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah.
3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.

4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Penutup.

Rancangan awal dikonsultasi publikasi untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana Rancangan Awal yang disempurnakan tersebut menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja perangkat daerah yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan renja perangkat daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tanah Laut dan penyesuaian dengan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pemerintah maupun propinsi.

d. Pelaksanaan musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari musrenbang kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten.

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah agar dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.

f. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Propinsi Kalimantan Selatan ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, propinsi dan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta ketentuan pelaksanaannya yang terkait;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
38. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 43. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 antara DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Bupati Tanah Laut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian Selatan. Kabupaten Tanah Laut tidak berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan harus menempuh jarak kurang lebih 65 km untuk mencapainya. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya. Uraian kondisi umum kondisi daerah akan lebih rinci dijelaskan dalam sub-sub bab selanjutnya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di titik koordinat 114°30'54,663"-115°22'38,535" Bujur Timur dan 3°30'37,586"-4°10'41,134" Lintang Selatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas wilayah daratan Kabupaten Tanah Laut adalah 384.852 ha dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pelaihari. Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan dan 130 desa dan 5 kelurahan. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Adapun batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

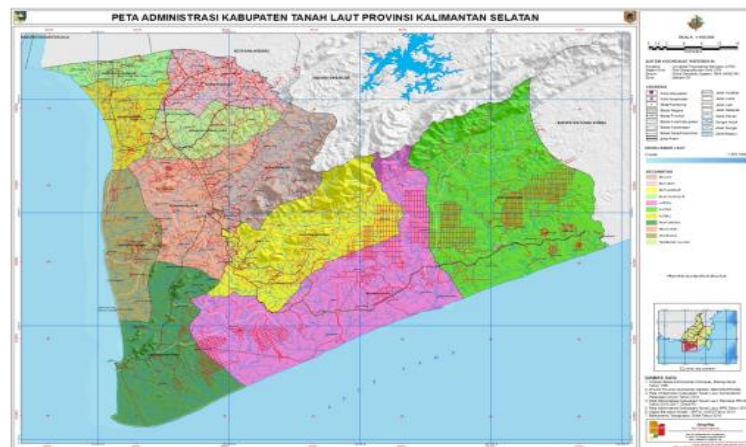
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

3. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Jorong	628,00	17,29
2.	Kintap	537,00	14,79
3.	Batu Ampar	548,10	15,09
4.	Panyipatan	336,00	9,25
5.	Pelaihari	379,45	10,45
6.	Bajuin	196,30	5,41
7.	Takisung	343,00	9,45
8.	Bati-bati	234,75	6,46
9.	Tambang Ulang	160,75	4,43
10.	Kurau	127,00	3,50
11.	Bumi Makmur	141,00	3,88
Kabupaten Tanah Laut		3.631.35	100,0%

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023



Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036

Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut

Dari 11 kecamatan yang ada, secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut memiliki 135 desa dan kelurahan. Wilayah yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 kelurahan), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa sedikit adalah Kecamatan Bajuin dengan 9 desa. Rincian jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut

No.	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kelurahan	
			Desa	Kelurahan
1.	Panyipatan	Panyipatan	10	-
2.	Takisung	Gunung Makmur	12	-
3.	Kurau	Padang Luas	11	-
4.	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	-
5.	Bati-Bati	Padang	14	-
6.	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	-
7.	Pelaihari	Pelaihari	15	5
8.	Bajuin	Bajuin	9	-
9.	Batu Ampar	Batu Ampar	14	-
10.	Jorong	Jorong	11	-
11.	Kintap	Kintapura	14	-
Kabupaten Tanah Laut			130	5

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Berdasarkan karakteristik geografis, kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Kecamatan yang berada di tepi laut yakni Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap.
2. Kecamatan yang tidak memiliki wilayah laut yakni Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Batu Ampar.

2.1.1.1.2 Kondisi Topografi

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi atas 2 bagian besar, yaitu: (1) Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa. (2) Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu: Puncak Gunung Kemuning (750 m dpl), Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl), Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl), Puncak Gunung Kematian (951 m dpl), Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl), Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl), Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl), Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl), dan Puncak Gunung Condong (553 m dpl).

Ditinjau dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi, yaitu kelas 0-7 meter, 7-25 meter, 25-100 meter, 100-500 meter, 500-1000 meter dan di atas 1000 meter. Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas adalah kelas elevasi 0-7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Jika dirinci menurut kecamatan, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Laut yang tidak memiliki wilayah pantai yaitu Kecamatan Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, dan Batu Ampar. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa wilayah tertinggi di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari, dan Bati-bati. Wilayah dengan dataran rendah cukup luas tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang. Sementara itu daerah dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan

Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
< 3	Datar	250.460
3 – 8	Bergelombang/agak landau	44.830
8 – 15	Bergelombang/landau	31.600
15 – 25	Berbukit	21.805
25 – 40	Bergunung	10.690
40 – 60	Bergunung curam	13.545
> 60	Bergunung sangat curam	-

Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036

Kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya maka tanah semakin peka terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. 0 – 3%, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan).
2. 3 – 8%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8–15%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47% dari luas total daratan).
4. 15 – 25%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85% dari luas total daratan).
5. 25– 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87% dari luas total daratan).
6. 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timurdengan luas 13.545 Ha (3,63% dari luas total daratan).

Berdasarkan paparan diatas, terlihat bahwa wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 77,80% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

2.1.1.1.3 Kondisi Geologi

Pada dasarnya Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari Lempeng Mikro Sunda. Menurut Tapponnir (1982) Lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai fragmen dari lempeng Eurasia yang melejit ke Tenggara sebagai akibat dari tumbukan kerak Benua India dengan kerak Benua Asia, yang terjadi kira-kira 40 – 50 juta tahun yang lalu. Fragmen dari lempeng Eurasia ini kemudian dikenal sebagai lempeng mikro Sunda yang meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Adapun batas-batas tektonik yang paling penting disebalah timur adalah: (1) Komplek subduksi Kapur Tersier Awal yang berarah Timur laut, dimulai dari Pulau Jawa dan membentuk pegunungan Meratus sekarang, (2) Sesar mendatar utama di Kalimantan Timur dan Utara, dan (3) Jalur subduksi di Kalimantan Utara, Serawak, dan Laut Natuna, Jalur ini dikenal dengan jalur Lupar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan di bagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pra tersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Tinjauan terhadap sumberdaya air sangat urgent sifatnya dilakukan guna memahami potensi, bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Keberadaan sungai yang wilayah alirannya (DAS) di lebih dari satu wilayah administratif

menjadikan sungai harus diatur dengan sistem yang spesifik. Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau

Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabulur (190 Km²), Sungai Sawarangan (580 Km²).

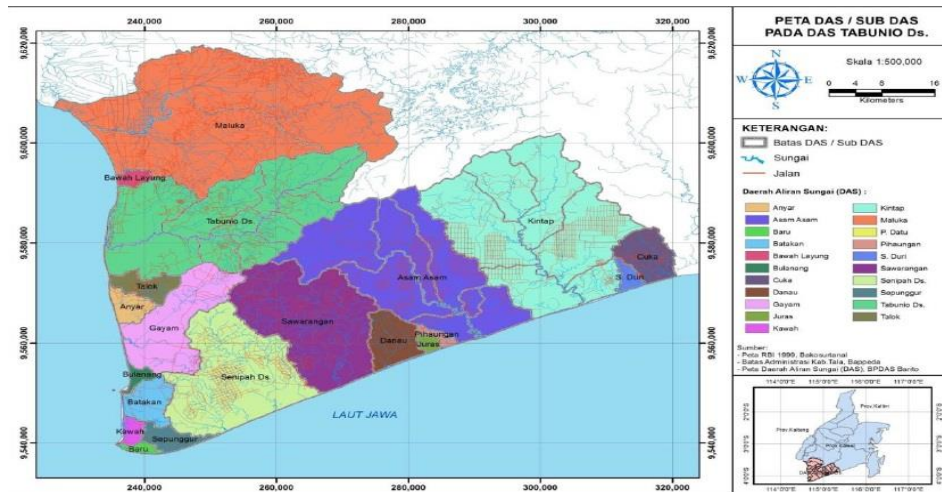
Adapun fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah-daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periode. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.

2. Air Tanah

Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0 – 1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya akan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

3. Curah Hujan

Curah hujan sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.



Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036

Gambar 2.2 Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa sungai yang membentuk beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Rincian DAS-DAS bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tanah Laut

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
1.	DAS Kintap	Sungai Pudak, Haruan, Rantau, dan Kintap	Kecamatan Batu Ampar, Jorong dan Kintap	71.656,29
2.	DAS Tabanio	Sungai Bakar dan Tabanio	Kecamatan Bajuin, Pelaihari, Tambang Ulang, Bajuin, Kurau, dan Takisung	62.480,20
3.	DAS Asam-asam	Sungai Kaldan, Rangkan, dan asam-asam	Kecamatan Bajuin, Batu Ampar, Kintap dan Jorong	57.346,92
4.	DAS Maluka	Sungai Rangka dan Maluka	Kecamatan Bati-bati, kurau, Tambang Ulang, Bajuin, Pelaihari, dan Bumi Makmur	55.556,25
5.	DAS Sawarangan	Sungai Sawarangan	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, Batu Ampar dan Jorong	37.201,34
6.	DAS P. Datu		Kecamatan Panyipatan	2,57
7.	DAS Gayam	Sungai Batanggayam	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	19.581,65

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
8.	DAS Pihaungan	Sungai Pihaungan	Kecamatan Jorong	1.052,23
9.	DAS Sepunggur	Sungai Sepunggur	Kecamatan Panyipatan	3.507,71
10.	DAS Danau	Sungai Danau	Kecamatan Jorong	7.036,77
11.	DAS Anyar	Sungai Anyar	Kecamatan Takisung	3.336,00
12.	DAS Juras	Sungai Juras	Kecamatan Jorong	983,92
13.	DAS Cuka	Sungai Cuka	Kecamatan Kintap	6.990,78
14.	DAS Duri	Sungai Duri	Kecamatan Kintap	1.666,41
15.	DAS Talok	Sungai Talok	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	4.141,28
16.	DAS Sanipah	Sungai Sanipah	Kecamatan Panyipatan, Batu Ampar, Pelaihari dan Jorong	36.314,07
17.	DAS Bawah Layung	Sungai Bawah Layung	Kecamatan Kurau	1.522,20
18.	DAS Baru	Sungai Baru	Kecamatan Panyipatan	981,69
19.	DAS Bulanang	Sungai Bulanang	Kecamatan Panyipatan	1.307,49
20.	DAS Batakan	Sungai Batakan	Kecamatan Panyipatan	5.492,72
21.	DAS Kawah	Sungai Kawah	Kecamatan Panyipatan	1.604,19

Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036

2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000–2.500 mm/tahun. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan, maka Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang water balance-nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air. Pada musim kemarau angin bertiup dari benua Australia, keadaan angin saat itu bisa juga kencang. Pada tahun 2022, rata-rata temperatur di Kabupaten Tanah Laut cenderung stabil yaitu berkisar antara 27,9-29,0°C. Temperatur maksimum di Kabupaten Tanah Laut selama periode tersebut terjadi pada

April dan Mei yaitu 20,0 °C, sementara itu, untuk suhu udara minimum terendah tercatat sebesar 27,9°C pada bulan Februari dan Oktober 2022.

Kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan tidak menentu. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 yang menunjukkan bahwa secara umum rata-rata kelembaban udara di wilayah ini berkisar antara 78,2-82,0% pada tahun 2022. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 82,0%, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar 75,6%.

Tabel 2.5 Temperatur (°C) dan Kelembaban Udara (%) Kab. Tanah Laut Tahun 2020-2022

Bulan	2020		2021		2022	
	Rata-rata temperatur	Rata-rata Kelembaban Udara	Rata-rata temperatur	Rata-rata Kelembaban Udara	Rata-rata temperatur	Rata-rata Kelembaban Udara
Januari	28,37	80,55	27,1	84,0	28,3	78,0
Februari	28,53	79,79	27,8	80,8	27,9	78,7
Maret	28,76	79,11	28,0	79,1	28,2	78,8
April	29,04	78,22	29,1	74,5	29,0	75,6
Mei	29,33	78,74	29,1	76,3	29,0	78,0
Juni	28,30	78,61	28,6	76,5	28,2	79,3
Juli	28,27	76,12	28,3	76,5	28,0	78,6
Agustus	29,38	69,91	28,1	77,3	28,1	77,9
September	28,86	73,57	28,1	78,0	28,2	78,2
Oktober	29,06	74,14	28,8	77,2	27,9	82,0
November	28,20	79,57	28,1	80,5	28,2	79,9
Desember	27,54	82,17	27,7	82,6	28,2	78,8

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Kecepatan angin rerata di Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun 2020-2022 cukup bervariasi yaitu diantara 1,2 hingga 3,6 knot. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2022, kecepatan angin rerata tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 2,5 knot dan kecepatan angin rerata terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 3,6 knot.

Tabel 2.6 Kecepatan Angin (knot) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2022

Bulan	2020	2021	2022
	Rata-rata Kecepatan Angin	Rata-rata Kecepatan Angin	Rata-rata Kecepatan Angin
Januari	1,54	2,5	1,3
Februari	1,57	2,4	1,2
Maret	1,48	2,1	3,0
April	1,61	2,2	3,2
Mei	1,34	1,8	2,8
Juni	1,57	1,6	2,8
Juli	1,84	1,2	2,8
Agustus	2,03	1,3	2,8
September	1,76	1,5	2,8
Oktober	1,73	1,2	3,0
November	1,39	1,5	2,9
Desember	1,27	1,4	3,6

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Dalam periode tahun 2018-2022, curah hujan setiap bulan di Kabupaten Tanah Laut cukup bervariasi. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2018-2022, curah hujan bulanan tertinggi di Kabupaten Tanah Laut terjadi pada bulan Januari hingga Maret, kemudian kembali meninggi di bulan Oktober hingga Desember. Secara rinci, jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2022 tampak pada tabel berikut;

Tabel 2.7 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm) dan Hari Hujan (hari) Tahun 2018-2022

Bulan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	366,0	14	398	19	572,40	25	878,6	24	214,7	14
Februari	291,5	12	235	14	334,30	19	481,3	22	269,7	21
Maret	268,5	15	296	14	302,40	23	440,4	22	407,3	25
April	270,0	10	191	16	266,40	22	177,3	12	113,6	12
Mei	44,5	6	101	9	138,00	20	177,0	16	219,8	18
Juni	139,5	7	286	13	218,00	19	142,8	12	121,7	16
Juli	21,0	3	58	3	62,40	17	178,7	13	248,0	18
Agustus	49,0	2	-	-	57,20	11	147,9	16	218,5	16
September	96,0	3	11	1	163,50	20	140,9	16	305,2	14

Bulan	2018		2019		2020		2021		2022	
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
Oktober	125,0	2	23	4	190,40	16	121,9	13	178,6	18
November	274,5	13	110	7	282,10	20	304,4	22	303,8	18
Desember	464,5	15	287	15	554,40	28	389,9	28	137,2	16

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2023

2.1.1.1.6 Karakteristik Tanah

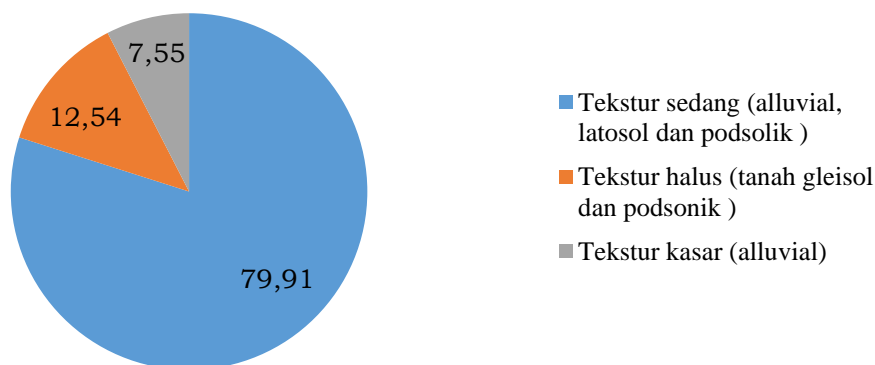
Jenis Tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisol hanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).

Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).

Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98 % dari luas total daratan).

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang digunakan secara praktis untuk memprediksi potensi penggunaan tanah. Tanah bertekstur halus (dominan liat) memiliki permukaan yang lebih halus dibanding dengan tanah bertekstur kasar (dominan pasir) sehingga tanah yang bertekstur halus memiliki kapasitas adsorpsi unsur–unsur hara yang lebih besar dan umumnya lebih subur dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Tanah bertekstur kasar lebih porus dan laju infiltrasinya lebih cepat. Walaupun demikian tanah bertekstur halus memiliki kapasitas memegang air lebih besar dari pada tanah pasir karna memiliki permukaan yang lebih luas. Sementara itu tekstur tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.



Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036

Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah

Sifat tanah yang bertekstur halus baik untuk budidaya maupun non budidaya. Pada tanah yang bertekstur halus semua tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tahan terhadap erosi. Sedangkan pada tanah yang bertekstur sedang tanaman masih dapat tumbuh dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar memerlukan air sangat tinggi, sehingga daya simpan airnya sangat rendah, akibatnya kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Pada umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut ini bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91%), tanah bertekstur halus meliputi jenis

tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12,54%) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7,55%). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah Laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7,55%) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Ketersediaan tanah (lahan) memberikan gambaran potensi lahan dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena limitasinya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan sekarang memberi gambaran sejauh mana jenis dan tingkat pemanfaatan lahan yang telah dilakukan baik yang bersifat budidaya maupun bukan budidaya. Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaannya sekarang. Status tanah sekarang pada dasarnya sangat menentukan mudah dan dapat tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu.

Melihat dari luas wilayah yang ada dengan penggunaan lahan seluas 92.814 ha (24,6%) merupakan kawasan hutan, 71.288 ha (19,2%) merupakan lahan perkebunan, 51.122 ha (13,7%) merupakan lahan sawah dan tegalan serta sisanya 4.157 ha (1,11%) untuk kawasan pemukiman dan lain-lain, maka Kabupaten Tanah Laut telah menyiapkan beragam potensi yang masih dan dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan penataan ruang wilayahnya telah memprioritaskan 5 (lima) kawasan dengan masing-masing fungsi strategisnya yaitu: (1) Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Bati-Bati dan Jorong, (2) Pertanian di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, (3) Perikanan laut di Kecamatan Kurau, Takisung, Panyipatan, Jorong dan Kintap, (4) Pertambangan di Kecamatan Jorong dan Kintap, dan (5) Wisata di Kecamatan Takisung, Panyipatan, Jorong dan Pelaihari.

Kebijakan penataan ruang wilayah ini dimaksudkan tidak lain untuk mengantisipasi adanya pengembangan perlintasan 2 kawasan di Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebelah utara pengembangan dengan Banjarmasin-Banjar/Banjarmasin dan sebelah timur dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan yang tertuang dalam program pengembangan wilayah diharapkan dapat mendukung pengembangan 2 wilayah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terkendali yang pada akhirnya dapat tercapai hasil pembangunan yang maksimal.

Penataan ruang wilayah yang tersebar dimaksudkan juga untuk membuka peluang bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya, mengenai kawasan peruntukan permukiman, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal 38, kawasan permukiman terdiri atas: (a) kawasan permukiman perkotaan; dan (b) Kawasan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Pelaihari, Perkotaan Bati-Bati, Perkotaan Jorong, Perkotaan Kintap, dan Perkotaan Takisung, serta masing-masing perkotaan menyediakan RTH minimum 30%. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan permukiman perdesaan yang menyebar di sekitar daerah pertanian di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut; dan rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas sebesar kurang lebih 37.062,48 hektar.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektor pertanian secara keseluruhan, potensi pariwisata, dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan harus memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia dimana nantinya perencanaan pembangunan harus lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan tersebut.

Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat masih ada daerah di Kabupaten Tanah Laut yang belum terlalu maju. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini mutlak diutamakan. Hal ini karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah yang akan berdampak pada terbatasnya

kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Implementasi pembangunan pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berikut ini merupakan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

Tabel 2.8 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
A.	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten			
1.	Sistem Perdesaan	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil pertanian dan perkebunan	Pengembangan pusat produksi tanaman pangan sentra padi di Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan
			Pengembangan Kawasan Perkampungan/ Desa-Desa Nelayan	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Kintap, dan Jorong
			Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Peternakan di Bati-Bati
		Pengembangan Kawasan Agropolitan	Mendorong pengembangan sentra produksi jagung di Batu Ampar, Pelaihari dan Panyipatan	Perwujudan Penguatan Desa Pusat Pelayanan (DPP) di kawasan. Penciptaan dan Peningkatan Pelayanan Pusat Kawasan (pasar, dll)
				Penyediaan lahan untuk komoditas tanaman jagung. Membatasi pergantian ke komoditas lain
2.	Sistem Perkotaan	Pengembangan orde perkotaan	Pengembangan ibukota kabupaten sebagai perkotaan PKL Kota Pelaihari dan PLKp Bati-Bati	Peningkatan akses ke arah pusat
				Peningkatan fasilitas-2 pelayanan
		Pengembangan perkotaan utama sebagai perkotaan PPK dan PKL	Pengembangan perkotaan PPK Bati Bati, Kintap, Jorong dan Takisung serta PPL Kurau, tambang Ulang, Bumi makmur,	Pengembangan pelabuhan perikanan Pengembangan kawasan industri

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
			Batu Ampar, Bajuin dan Panyipatan	Pengembangan permukiman
				Rencana Pengembangan pelabuhan umum
				Rencana Pembangunan jalan lingkar utara Pelaihari – Tambang Ulang – Batu Ampar, Tanah Laut
		Hirarki (besaran) perkotaan	Pengembangan Perkotaan Bati Bati sebagai Pendukung sistem Kawasan metropolitan Banjar Bakula	Peningkatan sarana-prasarana penunjang perkotaan skala regional dan nasional
		Sistem dan fungsi perwilayahan	Mendorong pembentukan pusat pelayanan	Peningkatan akses ke arah pusat Pelayanan
		Fasilitas perkotaan	Pengembangan Pusat-Pusat Perkotaan Pelaihari, Bati Bati dan Kintap	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan PKL, PPK dan PPL
			Pengembangan Pusat-Pusat Ibukota Kecamatan	Pengembangan Infrastruktur IKK
		Prasarana wilayah	Mewujudkan jalan internal provinsi melalui pengembangan jalan tembus	Pembangunan Jalan Lintas Utara
				Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin – Jalan Pesisir Barat Kabupaten Tanah Laut. Rencana Kolektor Primer Gambut-Pulosari
		Permukiman Perkotaan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Padat
				Perencanaan Kawasan Pengembangan Baru Perkotaan untuk Lahan Perumahan (Permukiman Tertata)
B.	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan			
1.	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan	Pengembangan produk unggulan	Mendorong eksporhasil pertanian unggulan daerah	Pengembangan sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				ekonomi di Kawasan Agropolitan
		Pengembangan Sistem Agropolitan	Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan di Kecamatan Batu Ampar, Panyipatan dan Pelaihari	Pengembangan Pasar Hewan
				Pengembangan Terminal Agrobisnis
2.	Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan	Pelayanan Sosial Ekonomi	Pengembangan Perkotaan Sebagai Pusat Pelayanan Sosial – Ekonomi	Kota Pelaihari sebagai ibukota Kabupaten Tanah Laut
				Kota Panyipatan sbg kota Pelabuhan
				Kota Bati Bati dan Jorong sebagai Kota Industri
				Perkotaan Pelaihari sbg kota perdagangan regional
				Perkotaan Takisung, Batu Ampar dan Bajuin sebagai Penyangga Perkembangan Perkotaan Pelaihari-Ibu Kota Kabupaten
		Pengembangan Perkotaan IKK	Pemenuhan fasilitas perkotaan dan peningkatan interaksi kawasan	Penyediaan sarana penunjang
C.	Pengembangan Prasarana Wilayah			
1.	Transportasi Jalan Raya	Membuka Wilayah Terisolir	Pengembangan jalan penghubung dan jalan tembus/sirip utara antar wilayah	Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati menjadi interkoneksi untuk kegiatan Terminal Agrobisnis,
		Mengantisipasi Permintaan		Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati ke arah Jalan Lingkar Utara menelusuri sisi Tahura melewati beberapa titik kawasan lindung di Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap
				Pengembangan Jalan Arteri Primer sebagai

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
		Transportasi Akan Datang dan Mengatasi Permasalahan Transportasi	Penyediaan Sistem Jaringan dan Prasarana Transportasi	Jalan Bebas Hambatan
				Peningkatan beberapa Fungsi Jalan Kabupaten menjadi Kolektor Primer
				Pengembangna Terminal Tipe B Ambungan
				Pengembangan Sub Terminal di Bati Bati, Kintap
				Peningkatan Jalan Ambungan Tajau Pecah, Kab. Tanah Laut
				Pembangunan jalan akses kawasan pariwisata Takisung – Batakan, Tanah Laut
		Mendukung Ekonomi Regional dan Lokal	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan untuk menunjang Kepelabuhanan	Jalur Alternatif 1 Banjarmasin – Tanjung Dewa
				Jalur Alternatif 2 Banjarmasin – Tanjung Dewa
				Jalur Alternatif 1 Kintap – Tanjung Dewa
				Jalur Alternatif 2 Kintap – Tanjung Dewa
				Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari
2.	Transportasi Udara	Studi Alternatif Tahap Awal	Penjajakan kemungkinan pengembangan bandara udara	Studi Kelayakan Lokasi
				Studi Kebutuhan Pasar
				Pengembangan Kerjasama Bandar Udara
3.	Transportasi Sungai dan Laut	Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Air	Pengembangan Alur Sungai Sebagai Pelayaran/ Rute Sungai	Pengembangan Alur di DAS Tabanio Pengembangan Alur di DAS Kintap

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Pengembangan Alur di DAS Swarangan Pengembangan Alur di DAS Asam-Asam
			Pengembangan Pelabuhan Laut Alternatif	Pengembangan Pelabuhan Umum Alternatif di Pulau Datu - Tanjung Dewa
				Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana Pelabuhan Kintap, Tanah Laut
			Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI)	Pemantapan dan Peningkatan PP TPI di Kintap, Jorong, Swarangan, Tanjung Desa dan Tabanio
			Penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan Tanjung Dewa dan Pelabuhan Curah Kering / Basah Jorong	Penyiapan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan Menyiapkan lembaga pengelola Kawasan pelabuhan Tanjung Dewa
4.	Prasarana Telematika	Optimalisasi pelayanan	Pengembangan prasarana penunjang	Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama
				Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS
			Peningkatan jumlah dan mutu telematika	Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern
				Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan seperti di kota Pelaihari dan Bati Bati
5.	Prasarana Pengairan	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Pengembangan pengelolaan DAS Tabanio, Kintap, Jorong
				Penanaman pohon pencegah longsor

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Pembangunan dan perbaikan pintu air
				Pengelolaan mata air melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
				Pengendalian banjir, Jorong, Asam-Asam dan Kontap
				Pembangunan Pengamanan Pantai Takisung
6.	Prasarana Energi/ Listrik	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan kapasitas listrik	Penambahan dan perbaikan jaringan
				Peningkatan infrastruktur pendukung
				Pengembangan sumber listrik (PLTD dan PLTU)
				Pengembangan Gardu Induk Pelaihari (30 MVA)
7.	Prasarana Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan	Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar	Peningkatan Prasarana dan Sarana Persampahan
				1. Pewadahan (bin kapasitas 50 l)
				2. Pengangkutan (gerobak, container dan truk pengangkut)
				3. Pembangunan TPS (landasan/transfer depo)
				Pembangunan TPST
				Penyediaan Komposter Aerob
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan di TPA
				1. Metode Sanitary Landfill
				2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA sesuai standar

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				<p>Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasana persampahan</p> <p>Kegiatan Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri</p> <p>Peningkatan SDM pegawai pengelola persampahan</p>
D.	Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten			
1.	Kawasan Lindung	Pemantapan Kawasan Lindung	<p>Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air</p> <p>Pemantapan Kawasan Perlindungan setempat</p>	<p>Pengembalian fungsi lindung dgn reboisasi</p> <p>Penanganan secara teknis</p> <p>Pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi</p> <p>Perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;</p> <p>Pengelolaan DAS Tabanio untuk air baku</p> <p>Waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air</p> <p>Mempertahankan ekosistem pantai : hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata,</p>

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir
				Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi
			Pemantapan kawasan Cagar Budaya	Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata, Benteng Tabanio, dll Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan
2.	Kawasan budidaya	Pengembangan Kawasan Budidaya	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Memelihara habitat dan keaslian ekosistem
			Pengembangan Hutan Produksi Bernilai Ekonomi Tinggi Dengan Fungsi Lindung	Reboisasi tanaman untuk menahan tanah. Pengembangan aneka produk olahan Mengembangkan hutan rakyat
			Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Pengolahan Hasil Produksi Berorientasi Peningkatan Nilai Ekonomi dan Ekspor	Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung Pelaihari-Batu Ampar-Panyipatan. Pengembangan Pertanian Lahan Basah di Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan. Pengembangan Perikanan di Kintap, Swarangan, dan Tabanio serta Industri Pengolahannya di Bati-bati
			Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan	Pengembangan Pertambangan mineral dan batubara di 9 kecamatan
				Pengembangan kawasan industri

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
			Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	pengolahan hasil Bati Bati
				Pengembangan Industri Berbasis Sumberdaya Alam Jorong
			Pengembangan Kawasan Parwisata	Pengembangan DTW Prioritas sesuai RIPPDA Pengembangan Potensi Obyek Mengkaitkan kalender wisata provinsi dan nasional Peningkatan Promosi wisata. Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya

Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Tanah Laut memiliki skor Indeks Risiko Bencana yaitu 156,33 dengan kategori kelas risiko Tinggi. Data yang digunakan merupakan data hasil kajian risiko yang terdiri dari data: (1) bahaya per jenis bencana, (2) jiwa terpapar per jenis bencana, (3) kerugian rupiah per jenis bencana, (4) kerusakan lingkungan (ha) per jenis bencana dan (5) kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/kota.

Berdasarkan kondisi wilayahnya dilihat dari karakteristik ekoregionnya, Kabupaten Tanah Laut memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan pendangkalan sungai, erosi permukaan dan degradasi lahan karena penambangan batubara, tanah longsor. Berdasarkan Data Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 Tabel 2.9, bencana banjir masih menjadi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Laut dengan total 28 kejadian. Disusul dengan bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 9 kejadian, angin putting beliung sebanyak 25 kejadian dan gelombang pasang sebanyak 2 kejadian.

Tabel 2.9 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No.	Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor	Kebakaran Hutan dan Lahan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang
1.	Panyipatan	4	-	1	1	-
2.	Takisung	6	-	-	5	-
3.	Kurau	-	-	1	4	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-	2	-
5.	Bati-Bati	1	-	3	1	-
6.	Tambang Ulang	-	-	-	3	-
7.	Pelaiahari	7	-	2	8	-
8.	Bajuin	1	-	-	-	-
9.	Batu Ampar	2	-	-	-	-
10.	Jorong	3	-	-	-	-
11.	Kintap	4	-	-	1	2
Kab. Tanah Laut		28	0	9	25	2

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Selama tahun 2022, terjaid beberapa bencana alam di Kabupaten Tanah Laut yang berdampak pada kerusakan rumah warga di setiap Kecamatan. Rumah rusak ringan terbanyak berada pada Kecamatan Tambang Ulang yaitu 8 unit, rusak sedang terbanyak berada pada Kecamatan Takisung, Kurau dan Pelaiahri masing-masing 3 unit rumah, rusak berat terbanyak ada pada Kecamatan Bati-Bati yaitu 13 unit rumah dan terendam terbanyak berada pada Kecamatan Jorong sebanyak 917 unti rumah.

Tabel 2.10 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan, 2022

No.	Kecamatan	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Terendam
1.	Panyipatan	-	2	-	278
2.	Takisung	2	3	5	651
3.	Kurau	4	3	1	-
4.	Bumi Makmur	-	1	-	-

No.	Kecamatan	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Terendam
5.	Bati-Bati	6	1	13	71
6.	Tambang Ulang	8	2	5	-
7.	Pelaihari	3	3	7	507
8.	Bajuin	-	-	1	131
9.	Batu Ampar	-	-	-	68
10.	Jorong	-	-	-	917
11.	Kintap	6	2	2	620
Kab. Tanah Laut		29	17	17	3243

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Tabel 2.11 Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Banjir dan Angin Puting Beliung Menurut Kecamatan, 2022

No.	Kecamatan	Meninggal dan Hilang		Luka-luka		Mengungsi	
		Banjir	Angin Puting Beliung	Banjir	Angin Puting Beliung	Banjir	Angin Puting Beliung
1.	Panyipatan		-		-	1188	2
2.	Takisung		-		-	2158	29
3.	Kurau		-		-	-	26
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-	-	10
5.	Bati-Bati	-	-	-	-	-	23
6.	Tambang Ulang	-	-	-	-	-	-
7.	Pelaihari	-	-	-	-	801	-
8.	Bajuin	-	-	-	-	436	-
9.	Batu Ampar	-	-	-	-	209	-
10.	Jorong	-	-	-	-	3596	-
11.	Kintap	-	-	-	-	2406	-
Kab. Tanah Laut		-	-		-	10794	94

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Sebanyak 10.794 korban mwnngungsi akibat bencana banjir dan 94 korban mengungsi akibat bencana angin puting beliung di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022. Pengungsi terbanyak yang diakibatkan bencana banjir berada pada Kecamatan Jorong dan pengungsi

terbanyak akibat angin puting beliung berada pada Kecamatan Takisung yaitu sebanyak 29 pengungsi.

Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari ancaman terlalu tinggi, kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata. Risiko bencana daerah dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan nilai kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung.

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 2.16. Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.12 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

6	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Tanah Laut (KRB Kab. Tanah Laut Tahun 2018 – 2023)

Berdasarkan data dari BNPB, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13 Indeks Risiko Bencanan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Risiko Bencana Kab. Tanah Laut	178,00	178,00	178,00	178,00	156,33

Sumber: BNPB, 2023

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, telah dipaparkan berbagai kemungkinan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hal tersebut, telah diatur beberapa hal mengenai bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Hal yang pertama adalah mengenai kawasan rawan bencana yang tercantum pada RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

- a. Kawasan rawan bencana alam meliputi (a) kawasan rawan banjir; (b) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan dan permukiman; (c) kawasan rawan tanah longsor; (d) kawasan rawan angin puting beliung; dan (e) kawasan rawan gelombang pasang(rob) dan abrasi.
- b. Kawasan potensi rawan banjir adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi:
 - (a) Kecamatan Pelaihariterdapat di Desa Panjaratan; (b) Hampir semua desa di Kecamatan Kurau; (c) Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Desa Bati-Bati; (d) Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, Desa Gunung Makmur, Desa Benua Tengah, dan Desa Pagatan Besar; (e) Kecamatan Jorong di Desa Sabuhur, Desa Jorong, Desa Asam-Asam, Desa Swarangan, dan Desa Muara Asam-Asam; (f) Kecamatan Panyipatandi Desa Kuringkit, Desa Batu Mulya dan Desa Bumi Asih; (g) Kecamatan Kintap di Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Riam Adungan, Desa Muara Kintap, Desa Salaman, Desa Kintap Kecil, dan Desa Pasir Putih; (h) Kecamatan Tambang Ulang di Desa Tambang Ulang; (i) Kecamatan Batu Ampar; (j) Kecamatan Bajuin di Desa Bajuin, Desa Kunyit, dan Desa Sungai Bakar; dan (k) Hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur.

- c. Kawasan rawan kebakaran terdiri atas: (a) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan; dan (b) kawasan rawan kebakaran permukiman.
- d. Kawasan rawan kebakaran lahan/hutan adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: (a) Daerah gambut di Kecamatan Bati-Bati; (b) Kecamatan Kintap di Desa Riam Adungan; dan (c) Kecamatan Batu Ampar di Desa Bluru.
- e. Kawasan rawan kebakaran permukiman: tidak ada daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.
- f. Kawasan rawan tanah longsor meliputi: (a) Kecamatan Pelaihari dengan tingkat kerawanan rendah, yakni: Desa Ujung Batu; dan (b) Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Kintap.

Kawasan rawan angin puting beliung meliputi sebagian besar kecamatan akan tetapi dengan tingkat kerawanan sebagian besar rendah.

Kawasan rawan abrasi/ gelombang pasang terdapat pada daerah pesisir pantai, meliputi:

- a. Empat (4) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Kurau dengan tingkat kerawanan sedang sampai dengan tinggi, yakni Desa Sungai Bakau, Desa Padang Luas, Desa Bawah Layung, dan Desa Kurau.
- b. Lima (5) lokasi desa dari 12 desa di Kecamatan Takisung dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, dan Desa Telaga Langsat.
- c. Satu (1) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Jorong dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Simpang Empat Sungai Baru.
- d. Enam (6) lokasi desa dari 10 desa di Kecamatan Panyipatan dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Panyipatan, Desa Kandangan Baru, Desa Kandangan Lama, Desa Batakan, Desa Tanjung Dewa, dan Desa Batu Mulya.
- e. Delapan (8) lokasi desa dari 14 desa di Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Pandan Sari, Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Muara Kintap, Desa Sumber Jaya, Desa Kebun Raya. Desa Mekar Sari dan Desa Sebambar Baru.
- f. Sepuluh (10) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Bumi Makmur dengan tingkat

kerawanan sedang, yakni: Desa Sungai Rasau, Desa Handil Labuan Amas, Desa Handil Maluka, Desa Handil Suruk, Desa Handil Gayam, Desa Handil Birayang Atas, Desa Handil Birayang B

Selain hal-hal tersebut, diatur juga mengenai jalur evakuasi bencana di Kabupaten Tanah Laut. Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Jalur utama dari lokasi bencana banjir di Desa Nusa Indah dan Bati-bati melalui Jalan Ahmad Yani ke Kecamatan Tambang Ulang;
- b. Jalur utama dari lokasi kebakaran di daerah lahan kritis pada lahan gambut melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan;
- c. Jalur utama dari lokasi tanah longsor di Kecamatan Batu Ampar, Jorong, dan Kintap melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan; dan
- d. Jalur utama dari lokasi abrasi di sepanjang garis pantai kabupaten melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

Berbagai program dan rencana mitigasi bencana sebagaimana yang dimaksud diatas dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten. Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan, penanggulangan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Sementara itu, mengenai Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal 65 huruf p ditetapkan sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk ;
- Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan

bencana;

- Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
- Diizinkan melakukan kegiatan budidaya lain, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam.

Pemanfaatan ruang dengan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;

- Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- Penetapan batas dataran banjir;
- Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- Dilarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

**Tabel 2.14 Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

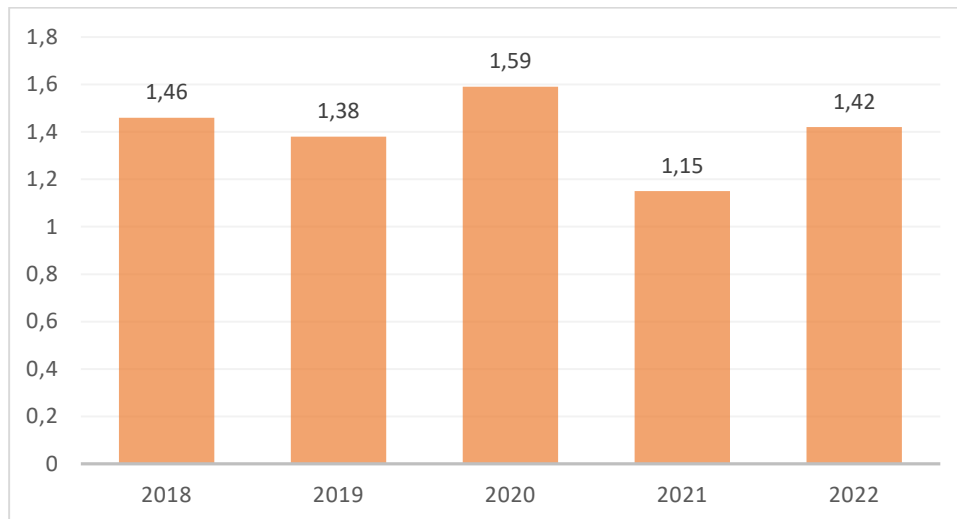
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100

Sumber: BPBD Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk sebagai faktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 adalah sebanyak 361.044 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut selama periode 2021-2022 adalah 1,42 %.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 80.323 jiwa (22,25%) dan memiliki pertumbuhan penduduk sebesar 2,26% sepanjang tahun 2020-2022, sedangkan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kintap merupakan yang terendah yaitu sebesar 1,49%. Wilayah yang memiliki penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Bati-Bati yaitu sebanyak 46.130 jiwa (12,78%), disusul Kecamatan Kintap sebanyak 44.201 jiwa (12,24%), dan Kecamatan Jorong sebanyak 35.827 jiwa (9,92%). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kurau yaitu 14.038 jiwa (3,89%). Jika dilihat dari kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar 212 jiwa per km², disusul oleh Kecamatan Bati-Bati sebesar 197 jiwa per km², dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 115 jiwa per km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah diurutkan dari yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar yaitu sebesar 52 jiwa per km², Kecamatan Jorong sebesar 57 jiwa per km², dan Kecamatan Panyipatan sebesar 78 jiwa per km².



Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Tahun	Penduduk				Sex Ratio
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)	
1	2018	174.019	165.176	339.195	1,46	105,35
2	2019	176.319	167.571	343.890	1,38	105,22
3	2020	179.012	169.954	348.966	1,59	105,30
4	2021	181.706	172.634	354.340	1,15	105,30
5	2022	185.076	175.968	361.044	1,42	105,18

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023 (diolah)

Tabel 2.16 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panyipatan	336	68.6	63.91	75	76	78
2	Takisung	343	85.75	87.29	94	96	97
3	Kurau	127	95.25	96.78	107	109	111
4	Bumi Makmur	141	100.81	100.56	98	99	101
5	Bati-Bati	234,75	169.92	173.3	191	193	197
6	Tambang Ulang	160,75	106.16	107.53	111	113	115
7	Pelaihari	379,45	173.22	178.36	204	207	212

8	Bajuin	196,30	91.82	94.2	98	99	101
9	Batu Ampar	548,10	49.83	46.56	50	51	52
10	Jorong	628	64.68	65.7	55	56	57
11	Kintap	537	96.44	99.2	80	81	82
Kabupaten Tanah Laut		3.631,35	93.41	94.7	96	98	99

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023 (diolah)

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 adalah sebanyak 185.076 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 175.968 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 adalah sebesar 105,2 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tanah Laut terdapat 105 penduduk laki-laki.

Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur pada tahun 2022, dilihat bahwa penduduk usia muda lebih dominan yaitu usia dari 0-4 dan 0-9 tahun. Indikasi dari fenomena ini adalah bahwa fertilitas cukup tinggi di Kabupaten Tanah Laut dan/atau terdapat migrasi masuk yang menyebabkan tingginya angka kelompok termuda tersebut.

Meskipun jumlah penduduk umur 0-9 tahun adalah kelompok terbanyak di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022, tren kelompok yang menjadi tanggungan usia produktif untuk di bawah 14 tahun menunjukkan persentase terendah selama 5 tahun terakhir. Sebaliknya kelompok umur di atas 65 tahun menunjukkan angka tertinggi. Hal ini dapat menjadi sebuah peringatan untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut bahwa fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi beberapa tahun lagi, ternyata sudah mulai berjalan di tahun-tahun ini. Bonus demografi merupakan momentum yang jika dimanfaatkan dengan baik, dapat meningkatkan Angkatan kerja, menurunkan kemiskinan, dan lainnya.

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	16.235	15.646	31.881
5-9	17.114	16.613	33.727
10-14	15.993	15.071	31.064
15-19	14.693	13.428	28.121

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
20-24	14.463	13.974	28.437
25-29	14.848	14.194	29.042
30-34	14.784	14.416	29.200
35-39	14.870	14.366	29.236
40-44	14.132	13.255	27.387
45-49	12.564	11.713	24.277
50-54	10.472	9.869	20.341
55-59	8.626	8.165	16.791
60-64	6.672	5.990	12.662
65-69	4.826	4.319	9.145
70-74	2.630	2.565	5.195
75+	2.154	2.384	4.538
Tanah Laut	185.076	175.968	361.044

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 menurut kelompok umur terbanyak ada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 33.727 jiwa dan disusul oleh kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 31.881 jiwa kemudian kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 31.064 jiwa.

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kondisi ini juga sering disebut sebagai *population boom*. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah.

Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk

menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Selama periode 2018-2022, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 13.241.237,45 juta pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi Rp 13.902.297,08 juta pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 13.786,685,56 juta, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 15.326.244,74 juta, dan kembali naik pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 19.019.178,93 juta. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 9.995,214,72 juta pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp 10.366,648,31 juta, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 10.164,061, 96 juta, namun

kembali meningkat menjadi Rp. 10.515.159,53 juta pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi Rp. 11.053.374,62 juta pada tahun 2022.

Tabel 2.18 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

Tahun	ADHB (Juta Rupiah)	ADHK (Juta Rupiah)
2018	13.241.237,45	9.995.214,72
2019	13.902.297,08	10.366.648,31
2020	13.786.685,56	10.164.061,96
2021*	15.326.244,74	10.515.159,53
2022**	19.019.178,93	11.053.374,62

Sumber : BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Keterangan:

*: Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

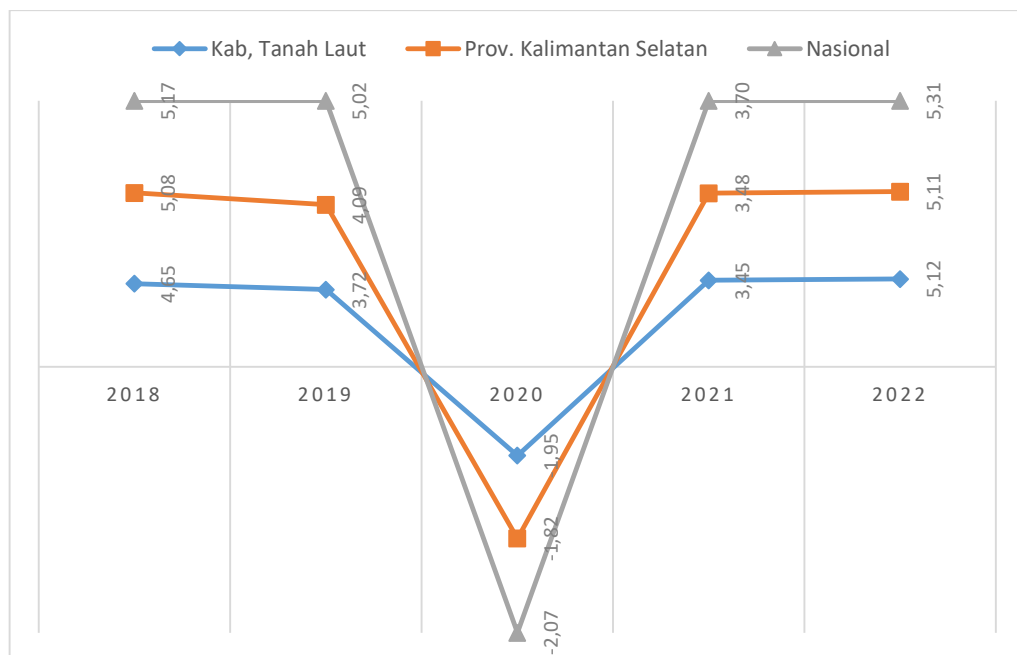
Tabel 2.19 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2018-2022

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	3,42	-0,30	1,73	2,70
Pertambangan dan Penggalian	2,36	0,73	-4,96	4,45	6,22
Industri Pengolahan	5,79	2,51	-4,27	5,01	3,86
Pengadaan Listrik dan Gas	7,5	4,07	5,02	4,78	7,79
Pengadaan Air	6,66	3,45	3,45	3,91	4,96
Konstruksi	6,95	6,26	-0,98	3,84	4,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,21	6,57	-2,89	2,48	7,10
Transportasi dan Pergudangan	6,92	5,93	-1,87	1,59	13,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,73	6,18	-1,23	2,29	6,54
Informasi dan Komunikasi	7,19	6,33	6,34	6,57	6,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	4,3	2,29	-1,44	0,54
Real Estate	4,93	4,72	1,90	5,10	4,59
Jasa Perusahaan	7,25	7,16	-1,74	3,49	6,89
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	8,33	1,14	4,71	-0,54

Jasa Pendidikan	7,22	6,02	2,64	0,83	3,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,18	4,78	7,52	8,20	4,59
Jasa lainnya	7,02	6,78	-0,86	0,84	6,29
PDRB	4,65	3,72	-1,95	3,45	5,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Dilihat dari tabel di atas, secara agregat perekonomian Tanah Laut mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen di tahun 2022 setelah pada tahun 2020 mencapai angka negatif. Pertumbuhan positif ini artinya pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling rendah adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu -0,54 persen. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun sebelumnya pertumbuhannya paling rendah yaitu -1,44 persen pada tahun 2022 naik menjadi 0,54 persen. Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling besar pada tahun 2022 yaitu 13,64 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Gambar 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2018-2022

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun

dinyatakan dalam istilah nominal, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati dalam rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YoY), atau dekade ke dekade. Gambar 2.5 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berkontraksi cukup dalam di angka -1,95 yang merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut mampu bangkit ke angka 3,45 dan pada tahun 2022 menjadi 5,12 %.

Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di atasnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2022 mencapai 3,11%. Dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya, dimana pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 mencapai 5,31%.

2.1.2.1.2 Struktur Ekonomi

Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di suatu wilayah memberikan warna pada struktur ekonomi pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Tabel 2.20 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.Tanah Laut (%), 2018-2022

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Atas Dasar Harga Berlaku				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.92	19.01	19.28	18,03	15,58
Pertambangan dan Penggalian	23.85	22.59	21.67	25,18	34,30

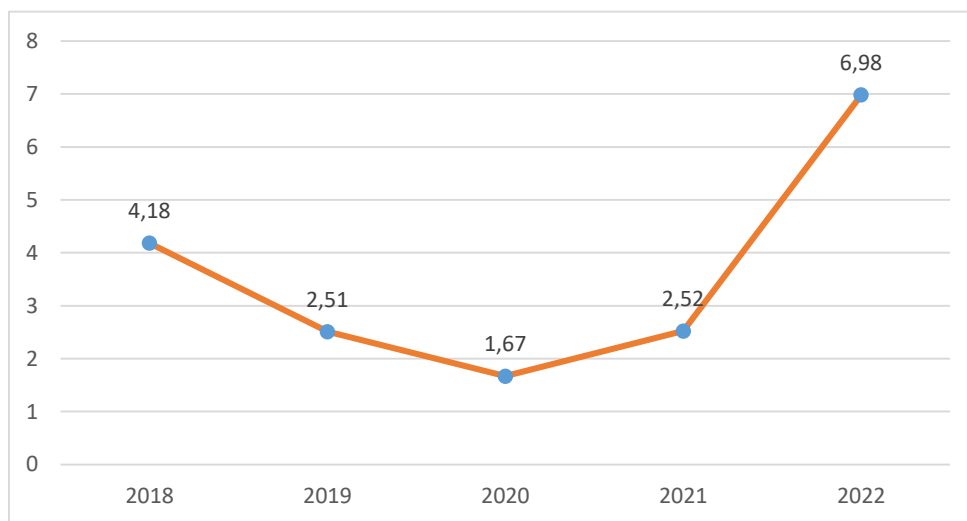
Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Atas Dasar Harga Berlaku				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Industri Pengolahan	12.79	12.52	12.29	12,10	10,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.09	0.1	0,10	0,09
Pengadaan Air	0.18	0.19	0.2	0,19	0,16
Konstruksi	7.26	7.5	7.52	7,28	6,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.2	11.53	11.49	11,29	10,45
Transportasi dan Pergudangan	6.08	6.27	6.25	5,78	5,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.54	1.59	1.61	1,52	1,34
Informasi dan Komunikasi	2.96	3.03	3.23	3,11	2,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.48	1.52	1.56	1,45	1,24
Real Estate	1.97	2.02	2.09	2,02	1,72
Jasa Perusahaan	0.34	0.36	0.37	0,35	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.44	5.73	5.95	5,68	4,64
Jasa Pendidikan	4,06	4.16	4.37	4,01	3,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	1.06	1.19	1,18	1,01
Jasa lainnya	0,78	0.81	0.82	0,75	0,67
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Dilihat dari tabel di atas, perekonomian Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 34,30% pada tahun 2022. Kemudian sektor andalan kedua di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, distribusi sektor ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 sebesar 15,58%, menurun dari tahun 2021 yang mana distribusinya sebesar 18,03%. Industri lainnya yang perlu diperhitungkan karena distribusinya terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan. Distribusi sektor ini juga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, namun pada tahun 2022, kontribusi mencapai 10,50%, meenurun dari 2021 distribusinya sebesar 12,10%. Kekayaan sumber daya alam pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mendorong tumbuhnya sektor industri, baik formal maupun non formal.

2.1.2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2020), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.6 Laju Inflasi Kota Banjarmasin (persen), 2018-2022

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun). Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin. Pada periode 2018-2020 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami penurunan dari 4,18% menjadi 1,67%, kemudian naik pada tahun 2021

menjadi 2,52% dan kembali naik menjadi 6,98% pada tahun 2022. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan.

2.1.2.1.4 Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau per capita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Tabel 2.21 PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Rp Ribu)	39.037,24	40.773,03	39.507,25	43.252,92	52.678,29

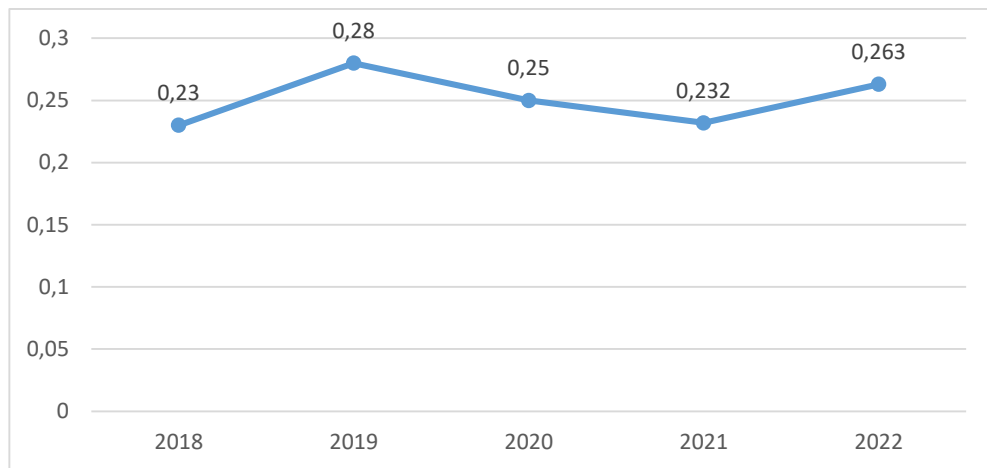
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut cenderung meningkat setiap tahunnya, baik untuk PDRB ADHB. Pada tahun 2018 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 36,037 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp 52,678 juta. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Namun PDRB Per Kapita Kab. Tanah Laut masih berada di bawah PDRB Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rp. 60,08 juta dan PDRB Per Kapit Naional yaitu Rp 71 juta pada tahun 2022.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan pendekatan koefisien gini. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusipendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka

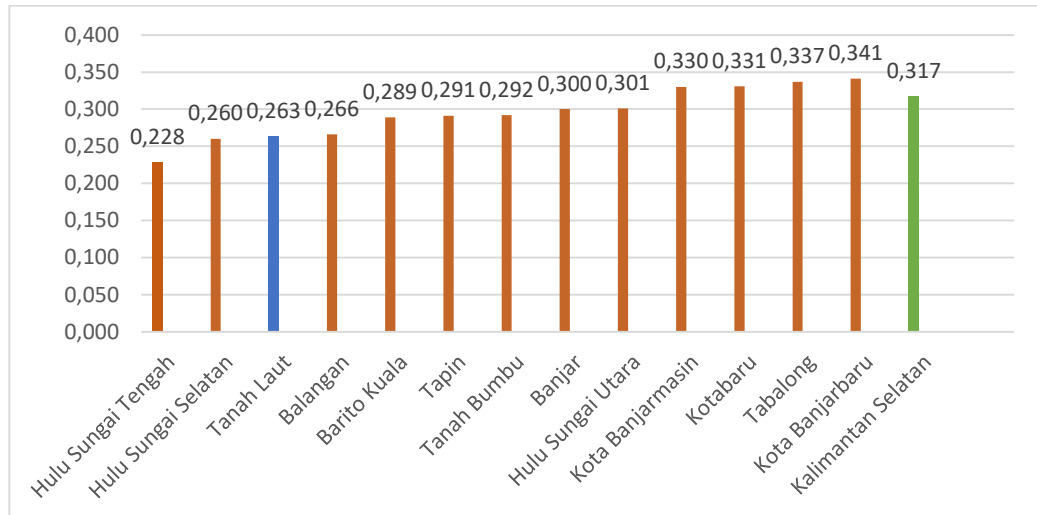
kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) Gini Ratio $>0,5$ yang menggambarkan distribusipendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) Gini Ratio $0,3-0,5$ yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidak merataan sedang, dan (c) Gini Ratio $<0,3$ yang menggambarkan distribusipendapatan dengan tingkat ketidak merataan rendah.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.7 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Berdasarkan Gambar 2.9, terlihat bahwa sepanjang periode 2018-2022, nilai gini rasio Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, nilai gini rasio adalah sebesar 0,23, kemudian nilai gini rasio naik menjadi 0,28 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,25 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 0,232, dan naik Kembali menjadi 0,263 pada tahun 2022. Selama periode 2018-2022, dapat disimpulkan bahwa nilai rasio gini di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori rendah yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Tanah Laut tingkat ketidak merataannya rendah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut menjadi Kabupaten terendah ketiga wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang distribusi pendapatannya dengan ketidak merataan yang rendah pada tahun 2022. Wilayah dengan nilai rasio gini tertinggi adalah Kota Banjarbaru sebesar 0,341, kemudian Kabupaten Tabalong yaitu sebesar 0,337, disusul Kabupaten Kotabaru sebesar 0,331.

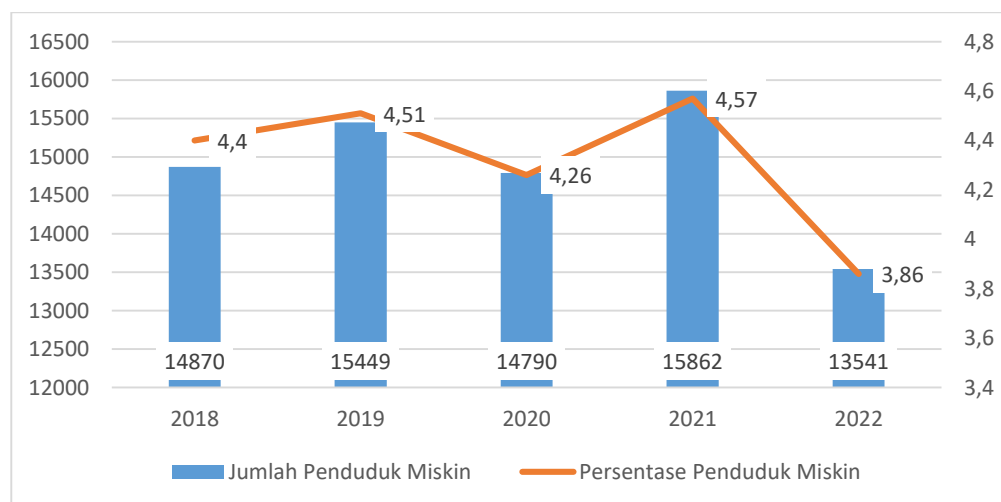


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.8 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2022

2.1.2.1.6 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

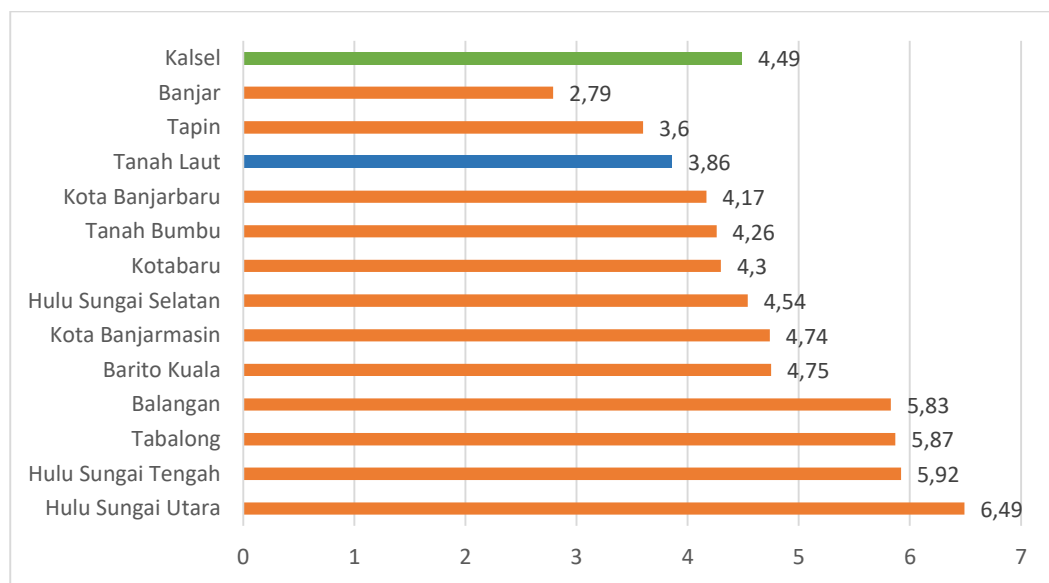
Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Pada periode 2018-2022, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut cukup fluktuatif.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Pada tahun 2018 ke tahun 2019, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut dari 4,4 persen menjadi 4,51 persen. Umumnya, dinamika jumlah penduduk miskin sejalan dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah yang dicerminkan dari persentase penduduk miskin. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2020 kondisi tersebut dapat teratasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan yang cukup signifikan pada persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020. Penanganan kemiskinan pada tahun 2020 memang menjadi perhatian besar bagi pemerintah mengingat kondisi pandemi yang tengah berlangsung. Namun pada tahun 2021, persentase kembali meningkat menjadi 4,57 persen. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 menurun kembali menjadi sebesar 3,86%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.10 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2022

Pada Gambar 2.12, menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada urutan terendah ke 3 dari 13 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan. Persentase angka kemiskinan terendah dimiliki oleh Kabupaten Banjar, dan persentase tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap-P1*) dan Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2018-2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan nilai indeks kedalaman kemiskinan dari 0,71 menjadi 0,55, kemudian naik menjadi 0,58 pada tahun 2019 dan 2020. Dan Kembali naik pada tahun 2021 menjadi 0,68. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh pada garis kemiskinan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2022 terjadi penurunan indeks dari 0,14 menjadi 0,061, yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan untuk menurun dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,55	0,58	0,58	0,679	0,374
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,14	0,11	0,12	0,142	0,061

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam

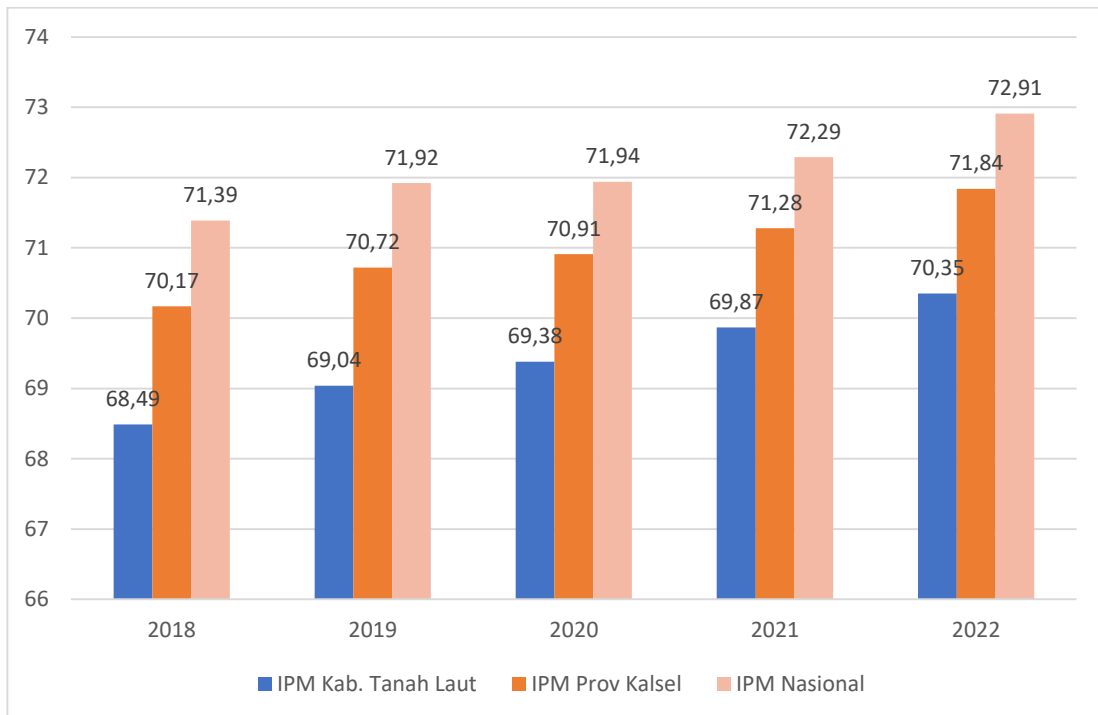
pemikiran paradigma pembangunan manusia. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perhitungan IPM terdiri atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek perekonomian yang digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

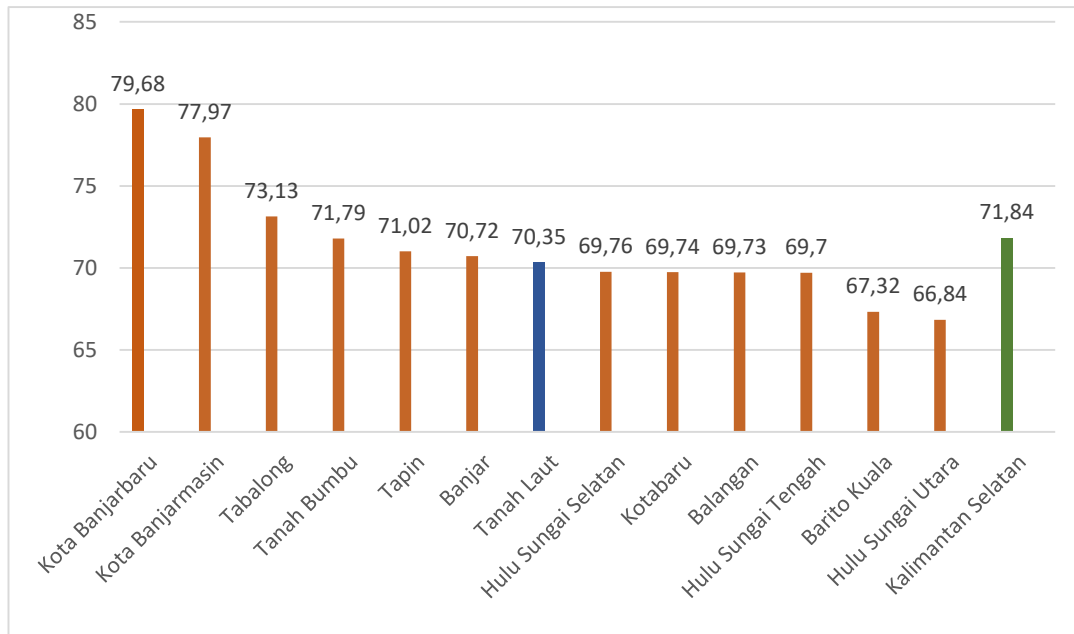
Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori menurut UNDP, yaitu (1) $IPM \geq 80$ termasuk kategori sangat tinggi; (2) $70 \leq IPM < 80$ termasuk kategori tinggi; (3) $60 \leq IPM < 70$ termasuk kategori sedang; dan (4) $IPM < 60$ termasuk kategori rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Gambar 2.11 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Selama periode 2018-2022, perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Tanah Laut adalah 68,49, tahun 2019 sebesar 69,04, tahun 2020 sebesar 69,38 dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 69,87, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 70,35. Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, IPM Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada posisi 7 dari 13 kabupaten/kota yang ada. Dengan posisi yang berada di kategori tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai IPM tersebut melalui berbagai kebijakan pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sektor ekonomi lainnya agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal dalam pembangunan tersebut. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri posisi pertama ditempati oleh Kota Banjar Baru dengan nilai sebesar 79,68, diikuti Kota Banjarmasin sebesar 77,97, dan Kabupaten Tabalong sebesar 73,13.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota, 2022

2.1.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Penduduk yang buta huruf diduga didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan.

Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun keatas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Tabel 2.23 Angka Melek Huruf Usia 15+ di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2023

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Angka Melek Huruf Usia 15+	98,74%	98,29%	97,87%

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Pada tahun 2022, angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut untuk penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 97,87%, menurun dari tahun 2021 yaitu sebesar 98,29% dan 2020 sebesar 98,74%. Penurunan yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam kemampuan literasi aksara atau membaca dan menulis yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Namun demikian pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah sesuai dengan target SDGs yaitu mencapai pemerataan kualitas pendidikan.

2.1.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2018-2022, RLS Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018 adalah sebesar 7,38 tahun, meningkat menjadi 7,64 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 7,88 tahun, naik menjadi 7,89 tahun pada tahun 2021 dan tahun 2022 meningkat menjadi 7,90 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Nasional masing-masing sebesar 8,34 tahun dan 8,54 tahun. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan angka RLS Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus

terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Tabel 2.24 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
RLS (tahun)	7,38	7,64	7,88	7,89	7,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

2.1.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah. Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
HLS (tahun)	11,95	11,96	12,01	12,31	12,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Angka HLS Kabupaten Tanah Laut selama periode 2018-2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 Angka HLS sebesar 11,95 tahun. Angka HLS

tersebut mengalami peningkatan sepanjang 5 (lima) tahun sehingga menjadi 12,32 tahun pada tahun 2022. HLS sebesar 12,32 pada tahun 2022 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 12,32 tahun atau telah mencapai pendidikan di kelas 3 SMA. Angka HLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan HLS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yang mencapai 12,81 tahun dan Nasional sebesar 13,10 tahun. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, angka HLS tertinggi ditempati Kota Banjarbaru yaitu sebesar 14,83 tahun. HLS di Kabupaten Tanah Laut masih berada jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.2.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Tanah Laut juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 AHH adalah 69,08 tahun, naik pada tahun 2019 menjadi 69,31 tahun dan terus kembali naik menjadi 69,59 tahun pada tahun 2021, hingga pada tahun 2022 naik menjadi 69,89 tahun. AHH sebesar 69,89 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Laut dapat menjalani hidup selama 69 tahun, lebih lebih tinggi dari AHH Provinsi sebesar 68,83 tahun. Dengan kisaran idealnya usia 25-85 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa umur panjang dan sehat penduduk Kabupaten Tanah Laut masih belum mencapai umur maksimal 85 tahun.

Tabel 2.26 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,08	69,31	69,45	69,59	69,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Tanah Laut memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya. Peran pemerintah di bidang kebudayaan adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan menciptakan iklim yang nyaman agar pelaku usaha di bidang kebudayaan dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Di bidang kepemudaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Jadi, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kepemudaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

Pada tahun 2018-2023, Kabupaten Tanah Laut berhasil mencetak atlet-atlet berprestasi yang tergambar dengan medali-medali yang diraih diberbagai macam cabang olahraga dan kejuaraan olahraga yang diikuti baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Hal ini merupakan hasil positif dari keseriusan dalam membentuk atlet-atlet di Kabupaten Tanah Laut agar berprestasi di cabang-cabang olahraga yang ada. Pada tahun 2020, dimana terjadi pandemi

Covid-19 berimbas pada pegelaran kejuaraan olahraga, sehingga tidak banyak kejuaraan yang dapat diikuti oleh atlet Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.27 Jumlah Atlet dan Jumlah Medali yang diraih oleh atlet Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022.

No	Nama Kejuaraan Olahraga yang Diikuti	Jumlah Atlet				Jumlah Medali			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Pekan Olahraga Pelajar (POPDA)	90	122	144	115	54	20	83	21
2	Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	20	-	-	-	19	-	-	-
3	Pekan Paralimpik Provinsi (PEPARPROV)	-	-	-	52	-	-	-	71
4	Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)	-	-	-	415	-	-	-	193
5	Porda Soina Kalimantan Selatan	34	-	53	-	29	-	20	-
6	Kompetisi Pelajar Daerah (KOPDA)	12	-	-	-	9	-	-	-
7	Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA)	-	-	-	2	-	-	-	2
8	Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra PON)	13	-	-	-	4	-	-	-
9	Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	-	2	-	-	-	2	-
10	Pekan Special Olympic Nasional (PESONAS)	-	-	-	30	-	-	-	12
11	Pekan Paralimpik Nasional (PAPERNAS)	-	-	3	-	-	-	-	-
12	Kejuaraan Daerah (KEJURDA)	15	-	-	-	3	-	-	-
13	Kejuaraan Provinsi Karate Paman Birin I	10	-	-	-	6	-	-	-
14	Open Tournament	14	-	-	-	4	-	-	-
15	Liga Birdge Nasional (LBSN) Kejuaraan Nasional Pelajar dan Mahasiswa	16	-	-	-	10	-	-	-

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Tabel 2.28 Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No	Cagar Budaya
1	Makam Keramat Habib Alwi Bin Idrus Bahasyim
2	Makam Keramat Ahmad Syamhudi
3	Makam Keramat Datu Bungur
4	Makam Keramat Datu Timang
5	Makam Keramat Datu Insad
6	Makam Keramat Kai Tuan Datu Ismail

No	Cagar Budaya
7	Makam Keramat Syekh Abdul Gani Bin Abdurahman
8	Makam Keramat Datu Pamulutan
9	Mercusuar Peninggalan Kolonial Belanda
10	Benteng Tabanio
11	Makam Keramat KH Abdussamad Khairi
12	Makam Keramat Datu Panjang
13	Makam Keramat Lok Batu Datu Ahmad
14	Makam Keramat Datu Nafis
15	Bunker Peninggalan Kolonial Jepang
16	Makam Keramat Istana Pangeran Datu Ahmad

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.29 Kesenian yang diadakan di Kabupaten Tanah Laut menurut Kecamatan, 2022

Kecamatan	Jumlah Kesenian
Bajuin	21
Kurau	11
Bumi Makmur	35
Jorong	29
Batu Ampar	79
Bati-Bati	62
Takisung	141
Panyipatan	57
Kintap	51
Tambang Ulang	51
TOTAL	537

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang lebih baik dan merata. Pembangunan sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa/daerah banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan

penduduknya. Makin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100% dan APS SMP sebesar 100% atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Kelompok Usia	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI [7-12]	99,84	99,76	99,41	99,54	98,71
SMP/MTs [13-15]	90,79	92,06	91,51	91,76	91,8
SMA/MA/SMK [16-18]	68,32	67,46	67,02	67,46	67,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari anak sekolah pada usia di jenjang pendidikan tertentu yang termasuk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Selama periode 2018-2022, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun (usia SD) dapat dikatakan cenderung fluktuatif walaupun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 berada pada 99,83%. Menurun pada tahun 2019, APS kelompok umur 7-12 menjadi sebesar 99,76%, begitu juga pada tahun 2020 menurun menjadi 99,41%. Namun meningkat menjadi 99,54% pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022, menurun menjadi 98,71%.

Hal yang sama juga ditemui pada APS kelompok umur 13-15 tahun (usia SMP) yang nilainya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, APS kelompok umur 13-15 tahun adalah sebesar 90,79%. Pada tahun 2019, APS kelompok umur 13-15 tahun mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar 92,06%. Kemudian menurun menjadi 91,51% pada tahun 2020, namun naik Kembali pada tahun 2021 menjadi 91,76%, dan menurun Kembali menjadi 91,8% pada tahun 2022. Capaian APS Kabupaten Tanah Laut masih belum memenuhi target wajar 9 tahun, sehingga ke depannya program pendidikan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2020 adalah sebesar 106,86% dan menurun di 2021 menjadi sebesar 106,04%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD yang nilainya lebih besar dari 100%, namun pada 2021 persentasenya menurun. Artinya sudah ada penurunan penduduk di luar usia sekolah SD yang masih bersekolah di SD. Untuk jenjang pendidikan SMP, APK pada tahun 2021 adalah sebesar 85,73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMP berapapun usianya di antara

penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 85,73%. APK untuk jenjang pendidikan SMA adalah sebesar 87,56% yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMA berapapun usianya di antara penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 87,56%.

Tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Murni (%)					
SD/MI (%)	99,84	99,51	99,41	99,54	98,71
SMP/MTS (%)	72,60	73,83	73,76	74,02	74,35
SMA/MA/SMK (%)	54,89	55,52	55,44	55,71	56,15
Angka Partisipasi Kasar (%)					
SD/MI (%)	107,5	108,69	106,86	106,04	105,49
SMP/MTS (%)	88,4	83,02	84,57	85,73	85,34
SMA/MA/SMK (%)	79,8	86,21	85,18	87,56	84,89

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan caramembagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah sebesar 99,54%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang berusia 7-12 tahun, terdapat sekitar 99 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SD. APM jenjang pendidikan SMP pada tahun 2020 adalah sebesar 74,02% dimana hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang yang berusia 13-15 tahun, terdapat sekitar 74 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA pada tahun 2021 adalah sebesar 55,71%, yang berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia 16-18 tahun, terdapat sekitar 55 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA.

Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan.

Tabel 2.32 Rasio Guru dan Murid TK, SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah guru TK	1523	1467	1359	1312	1306
Jumlah murid TK	13559	13151	12371	11360	12012
Rasio guru terhadap murid TK	11,23	11,16	10,99	11,55	10,87
Jumlah guru SD/MI/ sederajat	2327	2825	2825	2778	2977
Jumlah murid SD/MI/ sederajat	36113	37650	38514	38254	38061
Rasio guru terhadap murid SD/MI/ sederajat	6,44	7,50	7,33	7,26	7,82
Jumlah guru SMP/MTs/ sederajat	750	1149	1149	1453	1679
Jumlah murid SMP/MTs/ Sederajat	9455	13819	13339	12763	14206
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/ sederajat	7,93	8,31	8,61	11,38	11,82

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2023

Pada tabel di atas, rasio guru terhadap murid, baik pada jenjang TK, SD/MI maupun SMP/MTs sangat dipengaruhi oleh pemenuhan SDM yaitu guru pada satuan pendidikan serta pertumbuhan penduduk pada daerah tersebut. Di Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2022 capaian rasio guru terhadap murid pada jenjang TK mencapai 10,87, pada jenjang SD/MI mencapai 7,82 dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 11,82. Angka ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar yaitu setiap rombongan belajar/ kelas terdapat 11 siswa untuk setiap 1 orang guru di tingkat TK, 8 orang siswa untuk setiap satu orang guru pada tingkat SD/MI, dan 12 orang siswa setiap 1 orang guru pada tingkat SMP/MTs.

Terkait dengan fasilitas pendidikan, ketersediaan ruang kelas sebagai sarana penyampaian pembelajaran menjadi tidak kalah penting dibanding tenaga pendidik. Di Kabupaten Tanah Laut, ketersediaan ruang kelas dari tahun 2018-2022 untuk tingkat pendidikan TK, SD/MI, dan SMP/MTs tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Jumlah Ruang Kelas di Kabupaten Tanah Laut menurut Tingkat Pendidikan, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
TK	1051	686	611	656	786
SD/MI/Sederajat	1680	1845	1845	1700	1917
SMP/MI/Sederajat	374	1149	528	543	550

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.34 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, MI, SMP/Mts)	100 %	100 %
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100 %	100 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	100 %	100 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain:

1. Sulitnya Melacak Peserta didik yang menempuh Pendidikan di pondok pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan program wajib belajar, sehingga peserta didik tersebut tidak terdata di dalam dapodik.
2. Sebagian besar orang tua memilih untuk menyekolahkan anak mereka ke pondok pesanteran karna pada masa pandemik Sebagian besar pondok pesantren melakukan kegiatan belajar mengajar secara (luring) tatap muka

3. Masih belum sempurnanya aplikasi Standar Pelayanan Minimal yang dibuat oleh kementerian pendidikan terkait verifikasi data ATS, yang Ketika kita verifikasi jumlah dari Anak Tidak Sekolah (ATS) mulai berkurang secara signifikan.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukkan kondisi kesehatan di Kabupaten Tanah Laut.

Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakatpun tidak henti-hentinya dilaksanakan. Salah satu cara adalah dengan mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Tidak ketinggalan juga dengan menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Sebagai contoh langkah yang ditempuh adalah memperbanyak penerimaan pegawai khususnya tenaga kesehatan. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit	1	1	4	4	4
Rumah Bersalin	3	3	0	0	0
Puskesmas	19	19	19	21	21
Apotek	10	11	13	15	15
Poliklinik	11	16	10	9	9
Pustu	59	54	55	55	55

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dapat dikatakan telah memadai. Seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan Pustu. Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Pelaihari memiliki fasilitas kesehatan yang paling lengkap yaitu 3 unit rumah sakit, 3 unit Puskesmas, 5 unit Apotek, 2 unit Poliklinik, dan 9 unit Pustu. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 tersebar merata di seluruh kecamatan dengan jumlah keseluruhan Puskesmas sebanyak 19 unit. Pada awal tahun 2023, kembali dioperasikan 1 unit Puskesmas di Kecamatan Pelaihari, sehingga jumlah Puskesmas pada awal tahun 2023 menjadi 22 unit.

Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan juga berperan dalam peningkatan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2022 terbagi ke dalam 5 kelompok yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, dan Tenaga Kefarmasian.

Tabel 2.36 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter Umum	54	70	66	85	90
Dokter Gigi	14	11	25	28	29
Perawat	412	535	480	639	664
Bidan	320	415	398	459	484
Tenaga Kefarmasian	52	75	48	120	140

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Imunisasi Balita

Imunisasi balita merupakan pemberian imunisasi kepada balita yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita dari berbagai penyakit. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas kesehatan. Beberapa jenis imunisasi bagi balita antara lain imunisasi BCG, Campak, DPT, Polio, dan Hepatitis B. Pada tahun 2018, persentase balita yang telah mendapat imunisasi terbesar pada jenis imunisasi di Kabupaten Tanah Laut yaitu 95,86% balita telah mendapat imunisasi Polio 1-Polio 4, dan cakupan imunisasi pada balita paling sedikit yaitu 76,925 dengan jenis imunisasi campak. Secara keseluruhan pada tahun 2022, Hepatitis B merupakan imunisasi yang paling banyak didapat oleh balita dan imunisasi Polio 4 merupakan imunisasi yang paling sedikit didapat oleh balita di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2022, persentase balita yang mendapatkan imunisasi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun tahun sebelumnya dimana dari 10 jenis imunisasi yang diberikan, seluruh jenis imunisasai sudah mencapai angka persentase di atas 80%.

Tabel 2.37 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Jenis Imunisasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
BCG	95,23	88,3	87,5	89,5	88,03
Campak	76,92	90,5	78,3	93	88,12
DPT 1	93,18	90,6	88,1	89,1	88,62
DPT 2	93,18	90,3	85,4	86,5	85,55
DPT 3	93,18	87,0	82,1	83,5	83,63
Polio 1	95,86	91,5	83,8	92,6	87,66
Polio 2	95,86	90,3	88,2	87,8	88,85
Polio 3	95,86	89,9	85,0	85,1	85,38
Polio 4	95,86	88,6	82,3	96,9	83,55
Hepatitis B	93,55	89,3	91,2	87,4	92,47

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Jumlah Kasus Penyakit

Kualitas kesehatan dapat dilihat pula melalui kasus penyakit yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Hal ini merupakan indikator eksternal selain indikator internal seperti fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Berikut tersaji jumlah kasus penyakit di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022:

Tabel 2.38 Jumlah Kasus Penyakit di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Jenis Penyakit (kasus)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Hipertensi Primer	30.098	26.227	15.648	13.434	11.878
Dyspepsia	14.524	13.382	9.125	6.770	6.809
Kencing Manis (DM)	-	7.848	4.885	5.053	4.820
Infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas	13.946	17.902	8.271	3.295	3.468
Cepalgia	7.615	3.611	4.520	3.022	2.312
Hipertensi Sekunder	-	-	3.701	2.879	-
Gastritis	6.868	-	-	3.260	-
Myalgia	3.969	4.462	4809	3.781	3.431
Nasopharingitis akuta (common cold)	4.474	-	4.363	2.585	3.944
HIV/AIDS	-	29	21	123	130
DBD	-	267	496	36	69

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Bayi Gizi Buruk

Jumlah kelahiran bayi di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2018-2022 berada di kisaran 6.000an bayi lahir. Pada tahun 2021 jumlah bayi lahir adalah sebanyak 6.367 bayi dengan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 452 bayi dan bayi gizi buruk sebanyak 1 bayi.

Tabel 2.39 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bayi Gizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bayi Lahir	6.400	6.491	6.510	6.367	5.936
BBLR	432	409	376	452	388
BBLR Dirujuk	133	125	-	-	-
Gizi Buruk	2	1	2	1	-

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Kunjungan Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan peningkatan dari sebanyak 6.608 ibu hamil menjadi sebanyak 7.490. Pada tahun 2020, dari 7.490 ibu hamil, yang melakukan kunjungan K1 adalah sebanyak 7.154 ibu hamil

dan yang melakukan kunjungan K4 sebanyak 6.012 ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis (KEK) sebanyak 1.033 ibu hamil dan yang mendapatkan zat besi sebanyak 6.307 ibu hamil.

Tabel 2.40 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Jenis Imunisasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu Hamil	7.728	7.489	7.490	6.616	6.608
Kunjungan K1	7.080	7.231	7.154	6.616	6.358
Kunjungan K4	6.065	5.922	6.012	5.817	5.559
Kurang Energi Kronis (KEK)	1.175	1.071	1.033	889	925
Mendapat Zat Besi (Fe)	5.612	6.889	6.307	5.976	5.546

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Kematian Ibu dan Bayi

Tabel 2.41 Jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	122,8	267	50
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	9,5	11,3	10

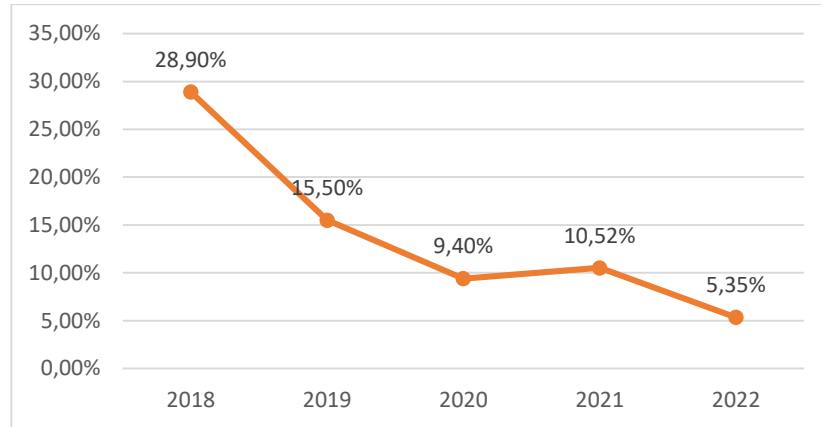
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Dari data tabel di atas dapat digambarkan AKI mengalami penurunan di tahun 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 50 per 1000 kelahiran dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 10 per 1000 kelahiran.

Prevalensi Stunting

Stunting adalah kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) dengan Z-score < -2 SD (pendek dan sangat pendek) dan target nasional balita stunting sampai tahun 2024 sebesar 14%. Stunting merupakan masalah gizi yang bersifat kronis yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan dan berlangsung lama. Stunting berdampak pada gangguan kognitif dan resiko menderita penyakit degeneratif pada usia dewasa.

Prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2018 – 2022 menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu dari 29,90% persen pada Tahun 2018 menjadi 5,35% persen pada Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Gambar 2.13 Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Laut (EPPGBM), 2018-2022

Untuk mendorong konvergensi percepatan pencegahan stunting di Kabupaten/Kota, Bappenas RI bersama Kementerian Dalam Negeri telah Menyusun panduan 8 Aksi Integrasi, dengan pendampingan kepada Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Gambar 2. 14 8 (Delapan) Aksi Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota

Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Terdapat poin intervensi gizi spesifik, antara lain:

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dilakukan kepada ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronik (KEK)

2. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja, wanita usia subur (WUS) dan ibu hamil
3. Pemberian ASI eksklusif sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan, pemberian MP-ASI mulai usia 6 bulan, lanjutan pemberian ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih
4. Kegiatan pemantauan pertumbuhan dilakukan sejak anak berusia 0-72 bulan dengan penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan setiap 3 bulan sekali
5. Suplementasi mikronutrien terdiri dari suplementasi kalsium untuk ibu hamil serta suplementasi kapsul vitamin A, Vitamin A diberikan di Posyandu setiap bulan Februari dan Agustus.
6. Pemeriksaan kehamilan (Antenatal care) dilakukan selama minimal 4 kali selama masa kehamilan

Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Intervensi sensitif terbagi menjadi 4 Jenis yaitu penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi.

Capaian SPM Bidang Kesehatan

Tabel 2.42 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	243	179	73,7 %
		Batakan	100%	249	196	78,7 %
2	Jorong	Jorong	100%	270	235	87,0 %
		Asam -Asam	100%	386	407	105,4 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	234	172	73,5 %
		Durian Bungkok	100%	305	236	77,4 %
4	Kintap	Kintap	100%	523	525	100,4 %
		Sei Cuka	100%	308	239	77,6 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	862	710	82,4 %
		Sei Riam	100%	132	103	78,0 %

		Angsau	100%	525	389	74,1 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	135	99	73,3 %
		Tirta Jaya	100%	242	203	83,9 %
7	Takisung	Takisung	100%	641	440	68,6 %
8	Bati – Bati	Bati – Bati	100%	357	302	84,6 %
		Kait - Kait	100%	161	122	75,8 %
		Bentok Kampung	100%	355	286	80,6 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	352	314	89,2 %
10	Kurau	Kurau	100%	76	56	73,7 %
		Padang Luas	100%	196	143	73,0 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	269	203	75,5 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	6.821	5559	81,5 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

**Tabel 2.43 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Tahun 2022**

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	232	181	78,0 %
		Batakan	100%	238	217	91,2 %
2	Jorong	Jorong	100%	258	286	110,9 %
		Asam -Asam	100%	368	398	108,2 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	223	188	84,3 %
		Durian Bungkok	100%	291	273	93,8 %
4	Kintap	Kintap	100%	500	357	71,4 %
		Sei Cuka	100%	294	257	87,4 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	823	743	90,3 %
		Sei Riam	100%	126	111	88,1 %
		Angsau	100%	501	396	79,0 %
		Tanjung Habulu	100%	129	120	93,0 %
		Tirta Jaya	100%	231	215	93,1 %
		Takisung	100%	612	503	82,2 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	340	304	89,4 %
		Kait - Kait	100%	154	143	92,9 %
		Bentok Kampung	100%	339	349	102,9 %
		Tambang Ulang	100%	336	293	87,2 %
10	Kurau	Kurau	100%	73	65	89,0 %
		Padang Luas	100%	187	148	79,1 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	256	242	94,5 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	6.511	5939	91,2 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

**Tabel 2.44 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Tahun 2022**

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	221	178	80,5 %
		Batakan	100%	227	220	96,9 %
2	Jorong	Jorong	100%	245	278	113,5 %
		Asam -Asam	100%	347	389	112,1 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	213	187	87,8 %
		Durian Bungkuk	100%	282	280	99,3 %
4	Kintap	Kintap	100%	476	503	105,7 %
		Sei Cuka	100%	280	260	92,9 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	784	740	94,4 %
		Sei Riam	100%	120	97	80,8 %
		Angsau	100%	477	390	81,8 %
		Tanjung Habulu	100%	123	124	100,8 %
		Tirta Jaya	100%	219	214	97,7 %
		Takisung	100%	584	512	87,7 %
8	Bati – Bati	Bati – Bati	100%	324	301	92,9 %
		Kait – Kait	100%	146	148	101,4 %
		Bentok Kampung	100%	323	342	105,9 %
		Tambang Ulang	100%	319	327	102,5 %
10	Kurau	Kurau	100%	69	50	72,5 %
		Padang Luas	100%	178	144	80,9 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	244	243	99,6 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	6.201	5927	95,6 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.45 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Balita		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	1111	365	32,9 %
		Batakan	100%	1138	1119	98,3 %
2	Jorong	Jorong	100%	1234	1137	92,1 %
		Asam -Asam	100%	1760	1563	88,8 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	1067	889	83,3 %
		Durian Bungkok	100%	1391	1172	84,3 %
4	Kintap	Kintap	100%	2390	2656	111,1 %
		Sei Cuka	100%	1406	1424	101,3 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	3940	3374	85,6 %
		Sei Riam	100%	603	496	82,3 %
		Angsau	100%	2399	1919	80,0 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	617	554	89,8 %
		Tirta Jaya	100%	1105	874	79,1 %
7	Takisung	Takisung	100%	2930	2502	85,4 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	1630	1456	89,3 %
		Kait - Kait	100%	734	514	70,0 %
		Bentok Kampung	100%	1622	1347	83,0 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1607	1264	78,7 %
10	Kurau	Kurau	100%	347	163	47,0 %
		Padang Luas	100%	896	726	81,0 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	1228	867	70,6 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	31155	26381	84,7 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.46 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	2.184	1996	91,4%
		Batakan	100%	1.559	1528	98,0%
2	Jorong	Jorong	100%	502	502	100%
		Asam -Asam	100%	4.350	4119	94,7%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	2.059	2059	100%
		Durian Bungkok	100%	2.259	2259	100%
4	Kintap	Kintap	100%	4.392	4392	100%
		Sei Cuka	100%	2.243	2243	100%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	8.891	8891	100%
		Sei Riam	100%	778	778	100%
6	Bajuin	Angsau	100%	4.145	4145	100%
		Tanjung Habulu	100%	718	719	100,1%
7	Takisung	Tirta Jaya	100%	1.344	1344	100%
		Takisung	100%	4.362	4362	100%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	3.044	3044	100%
		Kait - Kait	100%	1.254	1254	100%
9	Tambang Ulang	Bentok Kampung	100%	3.210	3210	100%
		Tambang Ulang	100%	1.041	1041	100%
10	Kurau	Kurau	100%	347	347	100%
		Padang Luas	100%	1.455	1455	100%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	1.850	1850	100%
		Spm Bidang Kesehatan	100%	51987	51538	99,1%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.47 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	7.779	6207	79,8 %
		Batakan	100%	7.965	4012	50,4 %
2	Jorong	Jorong	100%	8.638	3735	43,2 %
		Asam -Asam	100%	12.322	4188	34,0 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	7.477	6440	86,1 %
		Durian Bungkok	100%	9.745	1423	14,6 %
4	Kintap	Kintap	100%	16.740	7371	44,0 %
		Sei Cuka	100%	9.846	3378	34,3 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	27.588	14140	51,3 %
		Sei Riam	100%	4.225	1168	27,6 %
		Angsau	100%	16.793	5264	31,3 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	4.321	2452	56,7 %
		Tirta Jaya	100%	7.740	5488	70,9 %
7	Takisung	Takisung	100%	20.522	20522	100,0 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	11.410	7979	69,9 %
		Kait - Kait	100%	11.362	4909	43,2 %
		Bentok Kampung	100%	5.084	1629	32,0 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	11.260	7348	65,3 %
10	Kurau	Kurau	100%	2.431	2612	107,4 %
		Padang Luas	100%	6.273	3425	54,6 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	8.595	6307	73,4 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	218.115	119997	55,0 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

**Tabel 2.48 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan
Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2022**

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	1.349	836	62,0 %
		Batakan	100%	1.380	780	56,5 %
2	Jorong	Jorong	100%	1.498	742	49,5 %
		Asam -Asam	100%	2.137	453	21,2 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	1.297	907	69,9 %
		Durian Bungkok	100%	1.690	979	57,9 %
4	Kintap	Kintap	100%	2.903	1706	58,8 %
		Sei Cuka	100%	1.708	1548	90,6 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	4.784	2005	41,9 %
		Sei Riam	100%	732	337	46,0 %
		Angsau	100%	2.912	1998	68,6 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	749	553	73,8 %
		Tirta Jaya	100%	1.342	1312	97,8 %
7	Takisung	Takisung	100%	3.558	1206	33,9 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	1.978	1195	60,4 %
		Kait - Kait	100%	893	510	57,1 %
		Bentok Kampung	100%	1.970	278	14,1 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1.953	1414	72,4 %
10	Kurau	Kurau	100%	422	354	83,9 %
		Padang Luas	100%	1.087	841	77,4 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	1.490	1168	78,4 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	37.832	21122	55,8 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.49 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	807	758	94,0 %
		Batakan	100%	826	592	71,7 %
2	Jorong	Jorong	100%	896	363	40,5 %
		Asam -Asam	100%	1.278	876	68,6 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	775	632	81,5 %
		Durian Bungkok	100%	1.011	642	63,5 %
4	Kintap	Kintap	100%	1.736	1709	98,4 %
		Sei Cuka	100%	1.021	706	69,1 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	2.861	1824	63,8 %
		Sei Riam	100%	438	342	78,1 %
		Angsau	100%	1.741	988	56,7 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	448	285	63,6 %
		Tirta Jaya	100%	803	725	90,3 %
7	Takisung	Takisung	100%	2.128	1659	78,0 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	1.183	144	12,2 %
		Kait - Kait	100%	1.178	282	23,9 %
		Bentok Kampung	100%	527	220	41,7 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1.168	715	61,2 %
10	Kurau	Kurau	100%	252	364	144,4 %
		Padang Luas	100%	650	812	124,8 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	891	626	70,2 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	22.619	15264	67,5 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.50 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	144	111	77,3 %
		Batakan	100%	147	118	80,2 %
2	Jorong	Jorong	100%	160	189	118,5 %
		Asam -Asam	100%	228	103	45,3 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	138	127	92,0 %
		Durian Bungkok	100%	180	180	100,0 %
4	Kintap	Kintap	100%	309	334	108,1 %
		Sei Cuka	100%	182	557	306,4 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	509	483	94,8 %
		Sei Riam	100%	78	140	179,5 %
		Angsau	100%	310	359	115,8 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	80	77	96,5 %
		Tirta Jaya	100%	143	69	48,3 %
7	Takisung	Takisung	100%	379	392	103,4 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	211	103	48,9 %
		Kait - Kait	100%	210	45	21,4 %
		Bentok Kampung	100%	94	133	141,7 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	208	131	63,0 %
10	Kurau	Kurau	100%	45	289	643,8 %
		Padang Luas	100%	116	234	202,0 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	159	237	149,3 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	4.027	4411	109,5 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.51 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	18	25	142,5 %
		Batakan	100%	18	28	155,9 %
2	Jorong	Jorong	100%	19	23	118,0 %
		Asam -Asam	100%	28	18	64,8 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	17	19	112,7 %
		Durian Bungkok	100%	22	12	54,6 %
4	Kintap	Kintap	100%	38	9	23,8 %
		Sei Cuka	100%	22	12	54,0 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	62	63	101,2 %
		Sei Riam	100%	10	11	115,4 %
		Angsau	100%	38	27	71,3 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	10	10	102,6 %
		Tirta Jaya	100%	17	19	108,8 %
7	Takisung	Takisung	100%	46	47	101,5 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	26	26	101,0 %
		Kait - Kait	100%	26	8	31,2 %
		Bentok Kampung	100%	11	16	139,5 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	25	8	31,5 %
10	Kurau	Kurau	100%	5	5	91,2 %
		Padang Luas	100%	14	18	127,2 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	19	33	170,2 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	492	437	88,8 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.52 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	203	38	18,7 %
		Batakan	100%	208	95	45,7 %
2	Jorong	Jorong	100%	226	52	23,0 %
		Asam -Asam	100%	322	142	44,1 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	195	68	34,9 %
		Durian Bungkok	100%	255	39	15,3 %
4	Kintap	Kintap	100%	437	152	34,8 %
		Sei Cuka	100%	257	73	28,4 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	721	347	48,1 %
		Sei Riam	100%	110	63	57,3 %
		Angsau	100%	439	206	46,9 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	113	5	4,4 %
		Tirta Jaya	100%	202	90	44,6 %
7	Takisung	Takisung	100%	536	160	29,9 %
8	Bati – Bati	Bati – Bati	100%	298	120	40,3 %
		Kait – Kait	100%	135	61	45,2 %
		Bentok Kampung	100%	297	215	72,4 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	294	100	34,0 %
10	Kurau	Kurau	100%	64	15	23,4 %
		Padang Luas	100%	164	94	57,3 %
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	225	70	31,1 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	5.701	2205	38,7 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.53 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Target	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		
				Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	281	96	34,2 %
		Batakan	100%	288	28	9,7 %
2	Jorong	Jorong	100%	347	99	28,5 %
		Asam -Asam	100%	448	405	90,4 %
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	280	148	52,9 %
		Durian Bungkok	100%	354	111	31,4 %
4	Kintap	Kintap	100%	611	214	35,0 %
		Sei Cuka	100%	363	107	29,5 %
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	889	408	45,9 %
		Sei Riam	100%	152	97	63,8 %
		Angsau	100%	793	528	66,6 %
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	156	23	14,7 %
		Tirta Jaya	100%	279	125	44,8 %
7	Takisung	Takisung	100%	742	349	47,0 %
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	416	346	83,2 %
		Kait - Kait	100%	186	173	93,0 %
		Bentok Kampung	100%	409	176	43,0 %
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	406	86	21,2 %
10	Kurau	Kurau	100%	51	92	180,4 %
		Padang Luas	100%	206	115	55,8%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	316	248	78,5 %
		Spm Bidang Kesehatan	100%	7.973	3974	49,8 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2023

Permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang Kesehatan yaitu:

1. Pendataan sasaran SPM terlalu besar, semua siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, usia produktif, usia lanjut dan kematian.
2. Terbatasnya SDM di fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Terbatasnya peralatan Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang menunjang pada kegiatan Pelayanan SPM.
4. Juknis pada pencapaian tiap indikator SPM terlalu banyak persyaratannya.
5. Ketidakjelasan kebutuhan biaya penganggaran alat Kesehatan, BMHP maupun sumber daya Kesehatan lainnya yang mendukung pencapaian SPM.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum, kondisi dari suatu daerah yang terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat digambarkan melalui indikator kondisi jalan serta kondisi infrastruktur pendukung lainnya. Dengan kondisi jalan yang baik, berperan mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kondisi sosial budaya melalui kemudahan akses antarwilayah. Kondisi infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi modal dalam meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan dicapai apabila didukung oleh kondisi jalan dan infrastruktur yang baik dan memadai.

Kondisi Jalan

Pembangunan jalan menjadi hal penting dalam upaya peningkatan akses antarwilayah. Dengan kondisi jalan yang baik, maka akan mendorong peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2018-2022, panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Tanah Laut terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.54 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tahun	Jumlah Ruas Jalan	Panjang Ruas (km)	Kondisi Jalan			
			Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)
2018	380	1826,63	628.51	299.59	742.41	161.47
2019	380	1826,63	700.94	268.582	349.278	508.288
2020	380	1826,63	1003.92	84.94	84.52	653.308

Tahun	Jumlah Ruas Jalan	Panjang Ruas (km)	Kondisi Jalan			
			Baik (km)	Sedang (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)
2021	380	1826,63	565.14	615.16	75.35	570.99
2022	380	1826,63	818.643	523.507	99.899	384.584

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Laut, 2023

Kondisi permukaan jalan didominasi oleh jalan dengan kondisi baik dengan kondisi akhir pada tahun 2022 sepanjang 818,643 km. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 dengan panjang 565,14 km, begitu juga kondisi jalan dalam kondisi rusak berat berkurang menjadi 384,584 km pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sepanjang 570,99 km. Belum semua jalan ber kondisi mantap, pada tahun 2022 capaian jalan dalam kondisi mantap mencapai 73,48%.

Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran salah satunya sebagai kebutuhan budidaya pertanian. Persentase irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada angka 68,07%.

Tabel 2.55 Jaringan Irigasi Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Jaringan Irigasi/Perairan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis (Km)					
	a. Saluran Kondisi Baik	0.522	0.522	0.522	0.522	16.326
	b. Saluran Kondisi Sedang	61.108	61.108	83.716	83.716	88.676
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	459.36	460.35	460.35	460.35	455.39
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	200.05	200.05	200.05	207.58	191.780
B	Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis (Km)					
	1. Panjang Saluran Irigasi Primer					
	a. Saluran Kondisi Baik	0.522	0.522	0.522	0.522	16.326
	b. Saluran Kondisi Sedang	53.376	54.361	54.361	54.361	59.320
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	162.59	162.59	162.59	162.59	157.64

No	Jaringan Irigasi/Perairan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	d. Saluran Kondisi Rusakk Berat	47.983	47.983	47.983	55.513	39.709
	2. Panjang Saluran Irigasi Sekunder					
	a. Saluran Kondisi Baik	-	-	-	-	-
	b. Saluran Kondisi Sedang	28.502	28.502	28.502	28.502	28.502
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	209.14	209.14	222.74	222.74	222.74
	d. Saluran Kondisi Rusakk Berat	60.419	60.419	69.419	69.419	69.419
	3. Panjang Saluran Irigasi Tersier					
	a. Saluran Kondisi Baik	-	-	-	-	-
	b. Saluran Kondisi Sedang	0.854	0.854	0.854	0.854	0.854
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	75.01	75.01	75.012	75.009	75.012
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	82.652	82.652	82.65	82.652	82.651

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2023

Sarana Air Minum

Kebutuhan air minum tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum dikatakan aman untuk kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Kualitas air minum dapat dilihat dari hasil uji laboratorium terkait kandungan air minum.

Tabel 2.56 Jumlah KK yang Terlayani Air Minum Layak dan Sanitasi Layak di Kabupaten Tanah Laut, 2022

Uraian	Jumlah KK	Jumlah KK Kabupaten
Air Minum Layak	62.255	86.569
Sanitasi Layak	63.585	86.569

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2023

Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air minum suatu rumah tangga dapat diukur dari akses ke air minum layak. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses air minum layak adalah jenis sumber air utama yang digunakan untuk minum, sumber air utama yang digunakan untuk memasak dan mandi/cuci, serta jarak sumber air ke penampungan limbah.

Pada tahun 2022, sebanyak 62.255 KK terlayani air minum layak dari 85.569 KK se

Kabupaten Tanah Laut. Capaian persentase rumah tangga yang terlayani air minum layak dan sanitasi layak masing-masing sebesar 71,89% dan 73,45%. Untuk Sanitasi layak, sebanyak berdasarkan jenisnya, sumber air minum dapat dikelompokkan menjadi sumber air minum bersih dan tidak bersih. Sumber air minum bersih terdiri dari air minum yang bersumber dari air minum kemasan, air ledeng, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk air minum yang bersumber dari sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi kriteria jarak lebih dari atau sama dengan 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat.

Tabel 2.57 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum, 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (KK)	Realisasi (KK)	Capaian %
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	62.238	62.238	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	63.371	63.585	100,33%

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain:

- Kondisi wilayah Kabupaten Tanah Laut yang luas dan pemukimannya tersebar dalam beberapa wilayah pelayanan pada 11 Kecamatan, sehingga mempengaruhi nilai investasi dengan layanan yang diberikan.
- Kurangnya sumber air baku yang tersedia pada Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung dan Kecamatan Panyipatan.
- Luasnya wilayah pelayanan IKK Pelaihari dan IKK Bajuin, sehingga membutuhkan nilai investasi yang besar, salah satunya kondisi infrastruktur produksi dan distribusi IKK Bajuin yang telah melewati umur ekonomis.
- Sedang dilakukannya review Perjanjian Kerja Sama / Nota Kesepakatan SPAM Regional Banjarbakula yang harus diperbaharui, dimana saat ini yang beroperasi hanya di

Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur sedangkan Kecamatan Takisung sedang dalam tahap usulan untuk cakupan layanan.

- e. Sedang dalam tahap serah terima asset IPLT Kabupaten Tanah Laut dengan BPPW Kalimantan Selatan yang pendanaannya bersumber dari APBN.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60 persen lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah tidak layak huni pada Tahun 2022 sebanyak 3.575 unit, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.58 Rumah Layak Huni, Rumah Tidak Layak Huni, dan Total Rumah di Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2019-2022

No	Jenis Rumah	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Rumah Layak Huni	73,324	99,836	100,160	100,659
2	Rumah Tidak Layak Huni	5,237	4,398	4,074	3,575
3	Total Rumah	78,561	104,234	104,234	104,234

Sumber: Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut, 2023

Upaya penurunan jumlah rumah tidak layak huni telah ditempuh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui berbagai program dan skema. Program Bedah Rumah merupakan salah satu program yang dilaksanakan guna mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanah Laut. Penurunan jumlah RTLH cukup signifikan pada kurun waktu tahun 2019-2022, pada tahun 2019 berjumlah 5.237 unit dan pada tahun 2022 menurun menjadi 3.575 unit.

Tabel 2.59 Pengurangan Kawasan Kumuh di Perkotaan Kab. Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Luas Kumuh Awal (Ha)	160.38	130.89	123.49

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Realisasi Pengurangan Luas Kumuh (Ha)	23.88	7.40	44.75

Sumber: Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut, 2023

Selain permasalahan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat, timbulnya kekumuhan terutama di kawasan perkotaan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani di bidang perumahan dan permukiman. Adapun rincian luas kawasan kumuh di perkotaan dan luasan pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2022 sebagaimana dalam tabel di atas. Masih terdapatnya wilayah kumuh di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dengan luasan kawasan kumuh mencapai 1478,49 Ha yang ditetapkan melalui SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/473-KUM/2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK).

Tabel 2.60 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat, 2022

Jenis Pelayanan dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
	Indikator	Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Indikator	Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	Setiap Tahun	Rehabilitasi Pembangunan Kembali	0%	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Penyediaan Rumah (Relokasi)			
				Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana			
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	0%	Setiap Tahun	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0%	Setiap Tahun	

Sumber: Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut, 2023

Beberapa kendala dan permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman terhadap SPM yang belum komprehensif dan merata.
2. Belum ada nya penyusunan rencana aksi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
3. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) khusus nya pada bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan untuk mendukung pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, serta merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan, kenyamanan lingkungan, dan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tabel 2.61 Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan dan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum dan perkara	102 kasus (100)	102 kasus (100)	Satpol PP dan Damkar
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	67 kejadian (100%)	67 kejadian (100)	Satpol PP dan Damkar
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	354.340 orang (100%)	354.340 orang (100%)	BPBD
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	71 orang (100%)	71 orang (100%)	BPBD
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.216 orang (100%)	3.216 orang (100%)	BPBD

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, BPBD Kab. Tanah Laut, 2023

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota adalah:

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Tanah Laut
- b. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- c. Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran Perda/Perkada tersebut.

Pada tahun 2022 dalam rangka penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum untuk kegiatan pengendalian dan penindakan dilapangan berupa razia-razia terhadap warung-warung yang mempekerjakan anak di bawah umur, para gelandangan/gepeng yang terindikasi mengganggu ketentraman masyarakat, para pemuda yang diduga mengkonsumsi miras/obat-obatan terlarang. Adanya demo/unjuk rasa yang terstruktur dan pelayanan-pelayanan insidentil lainnya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Kurangnya edukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang mempekerjakan anak di bawah umur
- b. Sering ditemui adanya back up dari pihak ketiga yang melegalkan kegiatan
- c. Tidak jarang timbul perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada tersebut.

Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yaitu:

- a. Tidak semua kecamatan mempunyai pos sektor Damkar masih ada 4 (empat) kecamatan lagi yang belum memiliki pos sektor sehingga penanganan pemadaman kebakaran terkendala dan kurang maksimal.
- b. Keadaan masyarakat dilokasi kebakaran kadang ingin mengambil alih selang pemadaman sehingga mengganggu aktifitas kelancaran pemadaman.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2022, BPBD Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa kendala dan permasalahan, yaitu:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum tersedia secara lengkap akibat besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana.
- b. Belum efektifnya Gudang penyimpanan sarana prasarana karena Gedung yang kurang memadai.
- c. Penyimpanan logistic belum efisien karena tidak tersedianya Gudang logistik.

2.1.3.1.6 Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial berupa jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tabel 2.62 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2021

Maksud Utama	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jaminan Pensiun/Veteran	11,11	5,58	5,52	19,98
Jaminan Hari Tua	9,44	4,93	3,30	21,26
Asuransi Kecelakaan Kerja	10,19	8,31	7,28	17,92
Jaminan/Asuransi Kematian	9,56	8,92	5,04	18,77
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	5,56	4,54	4,77	34,68

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.63 Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kab. Tanah Laut, 2022

No	Jenis PPKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	-
2	Anak Terlantar	47
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	15
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	-

No	Jenis PPKS	Jumlah
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	5.390
9	Penyandang Disabilitas	646
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	60
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga Ninaan Lembaga Perasyarakatan	37
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-
18	Korban Trafficking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	8.081
22	Korban Bencana Sosial	121
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	125.970
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
	TOTAL	140.347

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tanah Laut, 2023

Adapun pencapaian SPM di Bidang Sosial pada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.64 Pencapaian SPM Bidang Sosial Kab. Tanah Laut, 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	287	287	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	Layanan data dan pengaduan	287	287	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2	2	0	100%
	Penyediaan permakanaan	287	287	0	100%
	Penyediaan sandang	20	20	0	100%
	Penyediaan alat bantu	2	2	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	287	287	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	20	20	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	25	25	0	100%
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	25	25	0	100%
	Akses ke layanan pendidikan	260	260	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	287	287	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	287	287	0	100%
	Layanan rujukan	35	35	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2	2	0	100%
	JUMLAH	1,828	1,828	0	1.500%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Tota Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	369	369	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	Layanan data dan pengaduan	369	369	0	100%
	Penyediaan permakanan	369	369	0	100%
	Penyediaan sandang	369	369	0	100%
	Penyediaan alat bantu	18	18	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	369	369	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	369	369	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	315	315	0	100%
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	369	369	0	100%
	Akses ke layanan pendidikan	369	369	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	369	369	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	369	369	0	100%
	Layanan rujukan	18	18	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2	2	0	100%
	JUMLAH	3,678	3,678	0	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	2,833	2,833	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	Layanan data dan pengaduan	2,833	2,833	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	0	100%
	Penyediaan permakanan	2,833	2,833	0	100%
	Penyediaan sandang	2,833	2,833	0	100%
	Penyediaan alat bantu	20	20	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	2,833	2,833	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	15	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	15	15	0	100%
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2,833	2,833	0	100%
	Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2,833	2,833	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2,833	2,833	0	100%
	Layanan rujukan	2,833	2,833	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2	2	0	100%
	JUMLAH	22,721	22,721	0	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Jumlah yang Harus Dilayani :	10	10	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	Layanan data dan pengaduan	10	10	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2	2	0	100%
	Penyediaan permakanan	10	10	0	100%
	Penyediaan sandang	10	10	0	100%
	Penyediaan alat bantu	10	10	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	10	10	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	10	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	10	10	0	100%
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	10	10	0	100%
	Akses ke layanan pendidikan	10	10	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	0	100%
	Layanan rujukan	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2	2	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2	2	0	100%
	JUMLAH	118	118	0	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	8,208	8,208	0	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100%
	Penyediaan permakanan	8,208	8,208	0	100%
	Penyediaan sandang	121	121	0	100%
	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	10	10	0	100%
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	10	10	0	100%
	Pelayanan dukungan Psikososial	8,208	8,208	0	100%
	JUMLAH	16,557	16,557	0	100%

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tanah Laut, 2023

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 antara lain:

1. Permasalahan Internal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain:

- Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
- Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai.
- Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi.
- Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.

2. Permasalahan Eksternal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain:

- Masih kurangnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di lingkungan Masyarakat.
- Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial.
- Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.
- Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/ CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.

- e. Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam Penanganan Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam menjalankan segala urusan pemerintah daerah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka sangat diperlukan serapan dan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, urusan ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam menjalankan proses pemerintahan.

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Jika melihat data TPT pada tahun 2018 sebesar 3,28% kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,41%, dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan persentase pengangguran hingga TPT menjadi sebesar 3,57%, namun pada tahun 2021 turun menjadi 3,52%, dan kembali naik menjadi 4,17% pada tahun 2022.

Tabel 2.65 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,28	3,41	3,57	3,52	4,17

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK Kabupaten Tanah Laut selama periode Tahun 2018–2022 seperti terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.66 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,85	69,19	72,03	72,27	70,92

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Terlihat dari tabel di atas, selama periode 2018-2021 TPAK Kabupaten Tanah Laut terus meningkat hingga 72,27%, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 70,92%. Penurunan TPAK salah satunya disebabkan terjadinya peningkatan penduduk bukan angkatan kerja pada saluran "sekolah" karena pandemi yang sudah mereda dan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah.

Tabel 2.67 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Bekerja (jiwa)	158.596	166.334	175.337	178.543	176.458
2	Angkatan Kerja (jiwa)	163.969	172.161	181.827	185.049	184.133

3	Penganggur/Mencari Kerja (jiwa)	5.373	5.827	6.490	6.506	7.675
---	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak harus terus diperkuat. Hal ini dirasa perlu mengingat perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki fungsi yang penting untuk masa depan suatu daerah.

Tabel 2.68 Jumlah Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan, 2018-2021

Jenis Tindak Pidana	2018		2019		2020		2021	
	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak
Fisik	9	1	2	2	5	1	4	8
Psikis	2	36	4	2	4	2	4	7
Seksual	3	54	2	14	3	14	-	7
Penelantaran	2	1	3	4		2	3	1
Perdagangan Orang	3	0	0	0		2	1	-
Ekploitasi	1	0	0	0		4	-	4
Lainnya	1	17	0	2	1	1	-	3

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2023

Angka Pernikahan dini di Kabupaten Tanah Laut tergolong tinggi. Tertinggi berada pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, masing-masing berjumlah 174 orang, 188 orang dan 137 orang perempuan berusia dibawah 19 tahun.

Tabel 2.69 Jumlah Pernikahan Dini di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pernikahan Dini (orang)	54	66	174	188	137

Sumber: DP2KBP3A Kab. Tanah Laut, 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam

pendapatan.

Tabel 2.70 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tahun	IPG Kab Tanah Laut	IPG Prov Kalimantan Selatan
2018	87,14	88,61
2019	86,96	88,61
2020	87,19	88,86
2021	86,86	88,86
2022	87,28	89,44

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2018-2021 berfluktuasi setiap tahunnya. Peningkatan terjadi bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi Kesehatan, Pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan meskipun masih belum signifikan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.71 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2021

Tahun	IDG Kab Tanah Laut	IDG Prov Kalimantan Selatan
2018	65,96	71,31
2019	70,67	74,60
2020	72,80	74,48
2021	72,86	74,58

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan masyarakat untuk

mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan apabila penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau ancaman kelaparan. Ketahanan pangan dapat dilihat dari kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.

Ketahanan pangan di suatu daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu, jumlah regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, cakupan binaan kelompok tani, pelayanan bidang ketersediaan dan cadangan pangan, penguatan cadangan pangan, Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, Stabilitas harga dan pasokan pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, serta Penanganan Daerah rawan Pangan.

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi danimbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui pencapaian skor PPH. Pola Konsumsi Pangan ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Untuk mencapai konsumsi energi dan PPH yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya, meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi masyarakat yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu dimasa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Tabel 2.72 Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tahun	Skor PPH
2019	81,5
2020	82,8

2021	84,1
2022	90,7

Sumber: DKPP Kab. Tanah Laut, 2023

Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (dietary score)/skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Melihat skor pangan harapan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan capaian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun meskipun belum mencapai angka standar 100. Pada tahun 2021 skor PPH mencapai 84,1 dan mengalami peningkatan 1,3 dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan kesadaran dalam konsumsi pangan beragam dan berimbang semakin tinggi.

Tabel 2.73 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tahun	IKP	Peringkat Nasional	Peringkat Provinsi
2018	79,76	59	6
2019	74,71	90	3
2020	81,85	93	4
2021	81,61	97	4
2022	82,06	88	4

Sumber: DKPP Kab. Tanah Laut, 2023

Pada tahun 2022, di Kabupaten Tanah Laut masih terdapat desa rentan ketersediaan pangan. Sebanyak 20 desa dengan kategori tinggi, 20 desa dengan kategori sedang, dan 28 desa dengan kategori rendah.

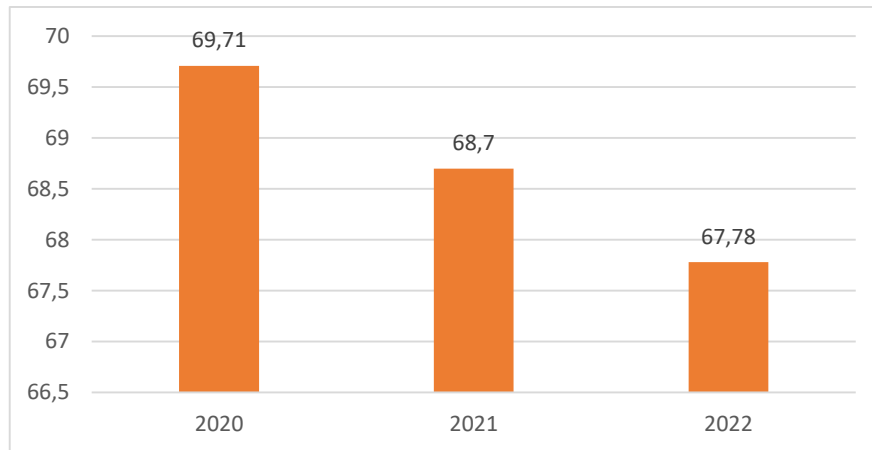
2.1.3.2.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup perlu untuk dilestarikan dan dijaga mengingat lingkungan hidup memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan keseimbangan alam. Oleh karena itu, perlu akan adanya upaya perlindungan dan pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup sehingga tidak punah dan tetap terjaga atau lestari.

Lingkungan hidup memiliki beberapa indikator antara lain pencemaran status mutu air, kondisi lingkungan hidup dan tata ruang, persentase penanganan sampah, Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal, Penegakan Hukum Lingkungan, serta Cakupan Pengendalian dan

Perencanaan Lingkungan.

Pada tahun 2022 nilai IKLH menunjukkan penurunan menjadi 67,78 yang mana pada tahun 2021 IKLH Kabupaten Tanah Laut sebesar 68,7. Pada tahun 2020, metode perhitungan IKLH menggunakan metode baru, yaitu terdapat perbedaan pembobotan, dimana bobot terbesar ada pada Indeks Kualitas Air. Dimana sebelumnya bobot terbesar ada pada Indeks Kualitas lahan.



Sumber: Dinas PRKPLH Kab Tanah Laut, 2023

Gambar 2.15 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

2.1.3.2.5 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan yang penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Data kependudukan menjadi dasar dan rujukan pengambilan kebijakan-kebijakan di berbagai sektor pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan administrasi kependudukan secara berkesinambungan dapat menjamin pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 2.74 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran, 2020-2022

NO	KABUPATEN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%	JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%	JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%
1	TANAH LAUT	113,453	110,399	97.31	108,021	105,874	98.01	105,893	104,603	98.78
	JUMLAH	113,453	110,399	97.31	108,021	105,874	98.01	105,893	104,603	98.78

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut, 2023; Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2020, Tahun 2021; Tahun 2022 berdasarkan Data pelayanan pada Aplikasi Monitoring Pelayanan pertanggal 06 Maret 2023

Tabel 2.75 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga, 2020-2022

NO	KABUPATEN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		JML KK	JML PENDUDUK YANG MEMILIKI KK	%	JML KK	JML PENDUDUK YANG MEMILIKI K	%	JML KK	JML PENDUDUK YANG MEMILIKI KK	%
1	TANAH LAUT	117,185	104,891	89.51	118,015	108,493	91.93	122,571	122,392	99.85
	JUMLAH	117,185	104,891	89.51	118,015	108,493	91.93	122,571	122,392	99.85

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut, 2023; Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2020, Tahun 2021; Tahun 2022 berdasarkan Data pelayanan pada Aplikasi Monitoring Pelayanan pertanggal 06 Maret 2023

Tabel 2.76 Jumlah Kepemilikan KTP Elektronik, 2020-2022

NO	KABUPATEN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		WAJIB KTP-el	WAJIB KTP-el YANG SUDAH MEREKAM	%	WAJIB KTP-el	WAJIB KTP-el YANG SUDAH MEREKAM	%	WAJIB KTP-el	WAJIB KTP-el YANG SUDAH MEREKAM	%
1	TANAH LAUT	250,049	247,445	98.96	251,091	247,221	98.46	258,300	253,526	98.15
	JUMLAH	250,049	247,445	98.96	251,091	247,221	98.46	258,300	253,526	98.15

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut, 2023; Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2020, Tahun 2021; Tahun 2022 berdasarkan Data pelayanan pada Aplikasi Monitoring Pelayanan pertanggal 06 Maret 2023

Tabel 2.77 Jumlah Kepemilikan KIA, 2020-2022

NO	KABUPATEN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%	JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%	JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN	JML PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA	%
1	TANAH LAUT	101,525	29,035	28.60	103,523	43,397	41.92	99,790	58,204	58.33
	JUMLAH	101,525	29,035	28.60	103,523	43,397	41.92	99,790	58,204	58.33

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut, 2023; Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2020, Tahun 2021; Tahun 2022 berdasarkan Data pelayanan pada Aplikasi Monitoring Pelayanan pertanggal 06 Maret 2023

2.1.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Wilayah desa memiliki peran dalam menunjang pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa menjadi faktor penting untuk mencegah laju urbanisasi yang dapat memicu berbagai permasalahan sosial. Langkah penting dalam pembangunan desa adalah melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai sumber daya manusia dan factor penentu kemandirian suatu wilayah. Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menentukan kemandirian Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah.

Pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan cara untuk membendung arus urbanisasi ke kota, karena apabila suatu daerah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat. Maka suatu daerah berhasil dalam melakukan proses pembangunan. Sejalan dengan ditetapkan nya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah desa.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima desa dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengukur Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran ini dimaksudkan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa, dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun.

Tabel 2.78 Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Kriteria IDM	Jumlah Desa				
		2017/2018	2019	2020	2021	2022
1	Sangat Tertinggal	2	1	0	0	0
2	Tertinggal	55	15	4	2	0
3	Berkembang	66	89	98	85	70
4	Maju	7	25	26	40	52
5	Mandiri	0	0	2	3	8
Jumlah		130	130	130	130	130

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut, 2023

Capaian IDM pada tahun 2022 nilai IDM 0,7272 yang terdiri dari 8 desa masuk dalam kategori “Mandiri”, 52 desa masuk dalam kategori “Maju”, 70 desa masuk dalam kategori “Berkembang”.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada awal tahun 2020 telah dilakukan *rebranding* nama program oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Bangga Kencana merupakan program untuk memberdayakan keluarga menjadi keluarga yang berkualitas (tentram, mandiri, dan bahagia) melalui upaya: 1) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), 2)

Pengaturan Kelahiran, 3) Pembinaan Ketahanan Keluarga, 4) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, 5) Pengelolaan Kependudukan.

Upaya pengaturan kelahiran melalui program Keluarga Berencana dari tahun ke tahun semakin dipermudah dalam mendapatkan pelayanan. Terlihat dari tabel di bawah ini, bahwa jumlah peserta KB aktif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif, hingga pada tahun 2022 jumlahnya menjadi 42.653 peserta. Sama halnya dengan Pasangan Usia Subur yang ada di Kabupaten Tanah Laut, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 jumlahnya 56.727 pasangan.

Tabel 2.79 Perkembangan Peserta KB Aktif dan Pasangan Usia Subur di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Peserta KB Aktif	53.049	53.679	52.981	53.277	42.653
Pasangan Usia Subur (PUS)	65.191	65.741	63.254	63.968	56.727

Sumber: Satu Data Kab. Tanah Laut; BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.80 Data Kampung KB di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No	Kecamatan	Desa Kampung KB	Klasifikasi			
			Dasar	Berkembang	Mandiri	Berkelanjutan
1	Jorong	Asam Jaya	√			
2	Kurau	Tambak Sarinah	√			
3	Kintap	Bukit Mulya	√			
4	Panyipatan	Kuringkit	√			
5	Takisung	Batilai	√			
6	Bumi Makmur	Handil Suruk	√			
7	Tambang Ulang	Sungai Jelai	√			
8	Bati-Bati	Padang	√			
9	Batu Ampar	Damar Lima	√			
10	Pelaihari	Panggung Baru	√			
		Ujung Batu	√			
11	Bajuin	Tirta Jaya	√			
		Sungai Bakar	√			
		Galam	√			
		Pemalongan	√			
		Kunyit	√			

Sumber: DP2KBP3A Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.2.8 Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan pergerakan manusia yang berkembang sangat dinamis, serta berperan dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan sektor transportasi mencerminkan pertumbuhan perekonomian secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Prasarana transportasi berkaitan erat dengan infrastruktur yang tersedia sebagai penunjang mobilisasi barang dan manusia. Infrastruktur yang baik mampu meningkatkan efisiensi proses distribusi barang dan jasa.

Tabel 2.81 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Jenis	Satuan	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angkutan Barang	unit	3,687	4,194	4,527	4,808	5,048
Angkutan Penumpang	unit	30	33	37	40	45
TOTAL		3,717	4,227	4,564	4,848	5,093

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.82 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Ketersediaan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rambu darat Standart	1,254	1,306	1,344	1,402	1,402
2	Rambu Sungai	51	56	56	60	60
3	Rambu Elektronik	2	2	2	2	2
4	RPPJ	21	23	28	31	31
5	Cermin cembung	5	10	10	10	20
6	Delinator	93	93	93	133	133
7	Warning light	6	7	7	8	8
8	APILL	3	3	3	3	3
9	Guardril	-	93	93	93	93
10	Halte	11	11	11	11	11
11	Pagar Besi Barrier	10	20	20	20	20
12	Road Barrier	40	55	55	55	55
13	Traffic Cone	20	30	30	30	30

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Ketersediaan				
		2018	2019	2020	2021	2022
14	Marka Jalan (ml)	14000	16260	2987.5		

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut, 2023

Pada tahun 2023, akan dilaksanakan pembangunan tahap awal Terminal Tipe C di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari. Dan akan dilanjutkan ke tahap pemenuhan sarana dan prasarana wajib di lokasi pembangunan Terminal tersebut.

Tabel 2.83 Jumlah Lokasi Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan, 2020-2021

No	Lokasi Parkir di Wilayah	Jumlah Lokasi Parkir				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kecamatan Pelaihari	9	9	9	25	25
2.	Kecamatan Bajuin	0	0	1	1	1
3.	Kecamatan Takisung	1	1	2	2	2
4.	Kecamatan Panyipatan	1	1	2	3	3
5.	Kecamatan Batu Ampar	1	2	2	2	2
6	Kecamatan Jorong	3	3	5	5	5
7	Kecamatan Kintap	1	1	1	1	1
8.	Kecamatan Tambang Ulang	1	1	1	1	1
9.	Kecamatan Bati-Bati	0	0	0	0	0
10	Kecamatan Kurau	0	1	1	1	1
11	Kecamatan Bumi makmur	0	0	0	0	0
Jumlah		17	19	24	41	41

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.2.8 Komunikasi dan Infromatika

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu

mewujudkan visi SPBE, yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada hasil evaluasi mandiri tingkat kematangan SPBE.

Tabel 2.84 Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022

Tahun	Indeks	Predikat
2019	2,76	Baik
2020	3,21	Baik
2021	2,75	Baik
2022	3,11	Baik

Sumber: Kementerian PAN dan RB RI, 2023

Tabel 2.85 Jumlah Blank Spot di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa Blank Spot	Ket
1	Kintap	0	-
2	Jorong	2	-
3	Batu Ampar	5	-
4	Pelaihari	6	-
5	Panyipatan	0	-
6	Takisung	12	-
7	Bajuin	4	Tahun 2022 telah disediakan layanan jaringan internet lastmile
8	Kurau	0	-
9	Bumi Makmur	3	-
10	Tambang Ulang	1	-
11	Bati-Bati	0	-
Jumlah		33	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilakukan melalui pemberdayaan guna meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi secara langsung dapat memicu peningkatan ekonomi. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan meningkatkan kualitas dan

kuantitas koperasi dan UKM, serta meningkatkan kemandirian UKM. Adapun sasaran yang hendak dicapai, yaitu meningkatkan sumber daya manusia pengelola koperasi dan UKM yang berkompeten dan berdaya saing, meningkatkan akuntabilitas dan pemberdayaan koperasi dan UKM, serta meningkatkan sarana dan prasarana koperasi dan UKM.

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tabel 2.86 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Jenis Koperasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
KUD	38	38	38	38	38
KPR	14	15	17	16	15
KPN	16	17	16	16	15
Lainnya	78	80	92	92	95
Jumlah	146	150	163	163	163

Sumber: BPS Kab Tanah Laut, 2023

Pada tahun 2021, jumlah Koperasi sebanyak 168 unit dengan 102 unit Koperasi yang aktif dan 66 unit Koperasi tidak aktif. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah koperasi menurun menjadi 163 unit koperasi dengan 77 unit Koperasi aktif dan 86 unit Koperasi tidak aktif.

Tabel 2.87 Perkembangan Data Keragaan Koperasi Kab. Tanah Laut per Desember 2022

Kabupaten	Aktif (kop)	Tidak (kop)	Total (kop)	AGT (ORG)	RAT TB.202 1	Modal sendiri (Rp.000)	Modal Luar (Rp.000)	Volume Usaha (Rp.000)	SHU (Rp.000)
Tanah Laut	77	86	163	29,001	45	70,079,430	212,869,433	25,600,610	7,389,519

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanah Laut, 2023 (diolah)

Tabel 2.88 Data Umum Jumlah UMKM Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2022

Bidang Usaha	2022											
	Pelaihar i	Bati- Bati	Takisun g	Panyipata n	Kinta p	Joron g	Tamban g Ulang	Kura u	Bumi Makmu r	Batu Ampa r	Bajui n	Jumlah
Pedagang Eceran	2058	2383	1623	1193	808	762	828	825	658	325	258	11721
Kuliner	2055	1583	735	620	673	695	356	369	295	341	262	7984
Pancarekanan	737	723	347	266	499	310	238	200	128	212	154	3814
Agribisnis	369	223	800	237	85	38	105	43	42	40	40	2022
Jasa	351	154	199	63	71	54	37	41	39	31	14	1054
Peternakan	306	190	216	213	157	80	124	105	306	137	21	1855
Fashion	278	545	107	85	145	183	78	96	67	57	41	1682
Otomotif	206	139	86	67	62	42	44	41	32	43	46	808
Pengolahan	206	147	330	139	106	47	32	55	20	27	27	1136
Penjahit	186	139	67	63	74	54	37	36	58	30	15	759
Ponsel	81	137	60	43	56	71	37	29	27	26	10	577
Online Shop	50	141	52	36	47	64	30	14	14	22	16	486
Salon/Kecantikan	43	63	18	16	24	22	8	13	5	6	6	224
Produk Kreatif	32	63	65	36	20	26	11	7	9	7	7	283
ATK	17	27	16	5	14	9	7	11	6	7	1	120
Penyewaan	17	7	7	8	11	5	1	0	1	4	0	61
Percetakan	12	12	4	6	5	2	0	2	2	0	1	46
Nelayan	1	0	49	49	2	49	0	1	85	0	0	236
JUMLAH	7005	6676	4781	3145	2859	2513	1973	1888	1794	1315	919	34868

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, 2023

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka memperhatikan tuntutan masyarakat akan perlunya pelayanan prima serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiflier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian.

Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Tabel 2.89 Nilai Investasi Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	%
-------	--------	-----------	---

2019	845,192,000,000	662,410,200,000	78%
2020	887,452,000,000	1,614,763,180,000	182%
2021	931,824,000,000	773,620,960,000	83%
2022	978,415,000,000	1,588,807,660,000	162%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.2.12 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral. Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan $n+2$, sedangkan data yang tersedia adalah $n-1$. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan penyusunan dokumen analisis makro ekonomi, analisis PDRB, analisis IPM, dokumen database daerah, pengelolaan Portal Satu Data Tanah Laut serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS.

2.1.3.2.13 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian.

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu terlaksananya pengelolaan dan pengamanan jaringan komunikasi sandi internal Pemkab (JKS), jaringan Telepon dan Radio, sinyal frekuensi pada 21 ruang, dan koordinasi persandian dalam Forum komunikasi petugas sandi satu kali, pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah. Saat ini isu pengamanan informasi mengarah pada pengamanan sistem informasi manajemen pemerintah, sehingga dilakukan upaya pengamanan terhadap sistem informasi manajemen pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara bertahap.

2.1.3.2.14 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah jumlah kunjungan perpustakaan. Untuk meningkatkan angka kunjungan ke perpustakaan daerah Kabupaten Tanah Laut maka didukung oleh program dan kegiatan yaitu Pengadaan Buku Perpustakaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

Tabel 2.90 Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Judul/Kelompok	Jumlah Judul Buku dan Jumlah Eksampler									
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
1	Umum	36	77	25	37	7	8	4	7	35	102
2	Filsafat	8	13	40	69	10	17	8	8	15	48
3	Agama	64	117	165	311	65	147	82	165	150	428
4	Ilmu-ilmu Politik	91	110	237	870	71	81	70	140	91	249
5	Bahasa	10	10	11	20	9	11	29	60	6	9
6	Ilmu Murni	6	9	9	15	10	13	8	16	12	34
7	Ilmu Terapan	71	116	152	261	26	31	69	137	74	241
8	Kesenian	14	25	3	6	2	3	111	222	23	59

No	Judul/Kelompok	Jumlah Judul Buku dan Jumlah Eksampler									
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
9	Sastra	32	57	129	235	31	70	70	144	128	512
10	Sejarah dan Geografi	8	15	35	57	9	10	12	24	30	98
11	Fiksi	26	57	2760	2923	594	1323	1712	3524	139	483
12	Non Buku (Peta)										16 buah
13	Non Buku (Globe)										4 buah
14	Non Buku (E-Book)				-		-		-		-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.91 Perpustakaan yang Terstandar di Kabupaten Tanah Laut 2022

No	Nama Perpustakaan yang Terstandar
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut
2	SMP Negeri 3 Pelaihari
3	Perpustakaan Desa Cahaya Hati Kecamatan Batu Ampar

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.92 Jumlah Pustakawan dan Tenaga Ahli di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pustakawan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	7 Orang	8 Orang
2	Tenaga Ahli	-	-	-	-	1 Orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.2.15 Kearsipan

Arsip memiliki nilai dan arti penting karena merupakan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kehidupan kebangsaan. Adapun komponen yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan arsip di suatu daerah, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai, tempat penyimpanan yang nyaman atau representatif, serta dukungan dari pejabat yang lebih tinggi.

Tabel 2.93 Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah unit kerja yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	-	-	-	6	17
2	Jumlah unit kerja	40	40	40	40	40

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan	–	–	–	–	11
4	Jumlah desa/kelurahan	135	135	135	135	135

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.94 SDM Pengelola Arsip Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Tenaga Arsiparis	1	1	1	1	5
2	Jumlah Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan	–	–	–	–	265

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanah Laut, 2023

Indeks kearsipan adalah Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan secara keseluruhan yang diperoleh dari Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi kepada Lembaga Kearsipan Kabupaten dengan bobot nilai 60% dan Nilai Hasil Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten kepada SKPD dengan bobot nilai 40%.

Tahun 2022 Nilai Hasil Pengawasan Kab. Tanah Laut adalah =

- Nilai Hasil Pengawasan Eksternal Baik (B) = $63,61 \times 60\% = 38,17$

- Nilai Hasil Pengawasan Internal Cukup (C) = $57,80 \times 40\% = 23,12$

Jumlah Nilai Pengawasan Kearsipan Pemkab Tanah Laut = 61,29

2.1.3.2.16 Pertanahan

Tabel 2.95 Realisasi PTSL Kabupaten Tanah Laut, 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Sertifikat	
	2021	2022
Panyipatan	-	1476
Takisung	-	1479
Bumi Makmur	1.362	
Kurau	1.138	

Kecamatan	Jumlah Sertifikat	
	2021	2022
Bati-Bati	-	1.395
Tambang Ulang	-	751
Pelaihari	-	942
Bajuin	-	243
Batu Ampar	-	1.423
Jorong	-	513
Kintap	-	1.778
TOTAL	2500	10.000

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan ketransmigrasian. Berikut adalah penjelasan serta data terkait.

2.1.3.3.1 Pertanian dan Peternakan

Pertanian menjadi salah satu fokus yang penting bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai Petani. Dalam hal ini maka diperlukan penyelenggaraan khusus oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut bidang pertanian, karena selain menjadi ikon, pertanian juga memberikan kontribusi yang besar terhadap ketersediaan sandang dan pangan. Demi mewujudkan hal tersebut maka melalui kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan jasa perkebunan, serta perikanan.

Tabel 2.96 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	18,92	19,02	19,28	18,03	15,58

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

PDRB sektor pertanian dipengaruhi fluktuasi produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan) pada setiap tahunnya. Terlihat pada tabel di atas, selama kurun waktu 2018-2022, distribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi. Distribusi tertinggi dicapai pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 15,58. Penurunan ini tentu memerlukan kebijakan dan tindakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga nantinya sektor Pertanian dapat menjadi sektor dominan untuk menyumbang distribusi PDRB.

Tabel 2.97 Kondisi Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Padi (ton)	293.608	271.941	289.645	145.890	143.962
Produksi Jagung (ton)	212.903	238.792	225.084	124.267	122.835
Produksi Kedelai (ton)	-	61	5,7	32	1.670
Produksi Ubi Jalar (ton)	1.535	1.666	1.684	1.707	824
Produksi Ubi Kayu (ton)	600	654	10.501	5.330	4.476
Produksi Kacang Hijau (ton)	66	80	190,3	132	100,3
Produksi Kacang Tanah (ton)	292	477	534	569	252
Produksi Bawang Merah (ton)	77,7	71,4	17,3	36,6	11,00
Produksi Cabe (ton)	1.468,8	1.893	2.128	2.135,5	2.350,90
Produksi Karet (ton)	7.619	8.117	6.920,3	14.324,3	14.601,70
Produksi Sawit (ton)	19.140	21.975	21.192	49.473,7	50.865,7
Populasi Ternak Besar (ekor)	89.757	94.311	106.215	78.769	84.055
Populasi Ternak Kecil (ekor)	25.942	27.548	29.446	29.849	20.451
Populasi Unggas (ekor)	58.656.559	81.990.650	57.320.961	54.989.206	75.680.611
Produksi Daging Ternak (kg)	351.879	287.156	375.665	442.246	603.851

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Telur (kg)	-	85.383.851	99.592.650	116.784.447	75.638.230

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut; BPS Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.3.2 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.

Tabel 2.98 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Ada di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Nama Objek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pantai Takisung	61.348	92.450	103.810	45.630	48.800
2	Pantai Batakan	46.709	26.258	75.830	50.256	117.700
3	Pantai Swarangan	1.578	264	100	-	10.980
4	Air Terjun Bajuin	3.875	3.618	87.400	29.911	36.152
5	Mina Tirta	4.430	2.505	240	80	2.940
6	Gunung Kayangan	6.314	5.457	1.871		
7	Pantai Kintap	400	468	-	97	911
8	Pantai Turki	109.104	114.500	26.555	29.900	40.136
9	Pantai Asmara	40.400	65.500	9.360	8.480	22.546
10	Pantai Cemara 1	7.145	3.990	-	-	9.347
11	Pantai Cemara 2	10.600	4.342	-	-	8.092
12	Pantai Tanjung Dewa	8.910	6.800	3.294	235	27.678
13	Pulau Datu	10.560	6.285	-	446	30.160
14	Gunung Birah	1.627	1.589	9.772	4.901	21.852
15	Dewa Katar	2.988	2.255	-	25	4.320
16	Taman Labirin	15.613	-	-	-	-
17	Taman Bunga Meisya	215	256	-	-	-
18	Wisata Mangrove	3.600	1.800	974	14.372	11.795
19	Kerbau Rawa	773	652	-	400	6.089

No	Nama Objek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2018	2019	2020	2021	2022
20	Surai Bekantan Panjaratan		-	825	424	3.379
21	Wisata Mahuni	-	-	6.500	4.200	7.340
22	Pantai Karindangan	-	-	-	963	16.292
23	Pantai THR	1.975	1.977	5.400	1.795	20.282
24	Taman Permana	-	-	-	1.556	80.350
25	Pantai Tabaniao	-	-	-	-	17.356
26	Bukit Timah	-	-	-	-	31.699
27	Danau Sari Ambun	881	691	-	-	-
28	Bukit Teletubies	1.317	1.565	-	-	-
TOTAL		340.362	343.222	331.931	193.671	576.196

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Kaut, 2023

Tabel 2.99 Perkembangan Jumlah Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022

Kecamatan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Panyipatan	-	-	-	-
Takisung	1	1	1	1
Kurau	-	-	-	-
Bumi Makmur	-	-	-	-
Bati-Bati	-	1	-	-
Tambang Ulang	2	2	4	5
Pelaihari	22	17	17	25
Bajuin	-	-	-	-
Batu Ampar	1	1	1	1
Jorong	1	5	5	3
Kintap	1	1	2	1
TOTAL	28	28	30	36

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Kaut, 2023

Tabel 2.100 Perkembangan Jumlah Hotel di Kabupaten Tanah Laut, 2021-2022

Kecamatan	Hotel		Kamar		Tempat Tidur	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Panyipatan	-	-	-	-	-	-
Takisung	-	-	-	-	-	-
Kurau	-	-	-	-	-	-
Bumi Makmur	-	-	-	-	-	-
Bati-Bati	-	-	-	-	-	-
Tambang Ulang	-	-	-	-	-	-
Pelaihari	11	13	218	164	322	247
Bajuin	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Hotel		Kamar		Tempat Tidur	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Batu Ampar	-	-	-	-	-	-
Jorong	3	3	44	47	58	72
Kintap	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14	16	262	211	380	319

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

2.1.3.3.3 Perikanan

Selain sektor pertanian dan sektor perkebunan, dimana sektor perikanan Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu unggulan daerah untuk memenuhi permintaan ikan dalam lokal maupun di luar daerah. Perikanan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap (ikan laut).

Tabel 2.101 Produksi Perikanan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 (ton)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perikanan Budidaya	1201.44	1329.98	1352.15	1386.78	1415
Perikanan Tangkap	57301	59974	61225.1	64545.1	65031

Sumber: DKPP Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.3.4 Perdagangan

Urusan perdagangan selain melaksanakan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan pendorong bagi pengembangan perekonomian daerah juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Aktivitas perdagangan di Kabupaten Tanah Laut salah satunya tercermin dari jumlah pasar tradisional di Kabupaten Tanah Laut seperti tabel di bawah ini

Tabel 2.102 Jumlah Pasar Tradisional di Kab. Tanah Laut, 2019-2021

Kecamatan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Panyipatan	2	2	2	2
Takisung	3	3	3	3
Kurau	1	1	1	1
Bumi Makmur	-	-	-	-
Bati-Bati	4	4	4	4
Tambang Ulang	1	1	1	1
Pelaihari	1	1	1	1
Bajuin	1	1	1	1
Batu Ampar	2	2	2	2
Jorong	2	2	2	2

Kecamatan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kintap	1	1	1	1
TOTAL	18	18	18	18

Sumber: Satu Data Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.103 Jumlah Toko Modern di Kab. Tanah Laut, 2020-2022

Kecamatan	Tahun		
	2020	2021	2022
Panyipatan	-	-	-
Takisung	3	3	3
Kurau	-	-	1
Bumi Makmur	-	-	-
Bati-Bati	5	5	7
Tambang Ulang	1	1	2
Pelaihari	19	21	24
Bajuin	-	1	1
Batu Ampar	3	3	3
Jorong	6	6	8
Kintap	8	8	8
TOTAL	45	48	57

Sumber: Satu Data Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.3.5 Perindustrian

Tabel 2.104 Jumlah IKM yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna di Kab. Tanah Laut, 2019-2021

Kecamatan	Tahun		
	2019	2020	2021
Tambang Ulang	17	42	46
Takisung	17	96	99
Pelaihari	25	66	70
Panyipatan	19	94	94
Batu Ampar	10	65	67
Bumi Makmur	33	84	84
Bati-Bati	25	85	87
Bajuin	15	39	40
Kurau	18	58	58
Kintap	22	92	95
Jorong	23	55	60
TOTAL	224	776	800

Sumber: Satu Data Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perumusan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah

Pembentukan Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pada pedoman PD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki 40 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, 6 Badan, 19 Dinas, 1 Satuan dan 11 Kecamatan.

Tabel 2.105 Data Perangkat Daerah menurut Perda Nomor 6 Tahun 2016

No	SKPD	BIDANG URUSAN	TIPE BERDASARKAN PERDA 6 2016
1	Sekretariat Daerah	Penunjang (Sekretariat Daerah)	A
2	Sekretariat DPRD	Penunjang (Sekretariat DPRD)	B
3	Inspektorat Kabupaten	Penunjang (Inspektorat)	A
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	A
		Penelitian Dan Pengembangan	
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	C
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Kuangan	A
7	Badan Pendapatan Daerah	Kuangan	A
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		Dibentuk berdasarkan Perda 10 Tahun 2013
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Dibentuk berdasarkan Perda 10 Tahun 2013
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan	A
		Kebudayaan	
11	Dinas Kesehatan	Kesehatan	A
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	A

No	SKPD	BIDANG URUSAN	TIPE BERDASARKAN PERDA 6 2016
		Pertanahan	
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	A
		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	
14	Dinas Sosial	Sosial	A
15	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Kepemudaan Dan Olahraga	B
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Adminduk Dan Capil	A
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi Dan Informatika	B
		Statistik	
		Persandian	
18	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Kelautan Dan Perikanan	A
		Pangan	
19	Dinas Pariwisata	Pariwisata	B
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pmd	B
		Transmigrasi	
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	A
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk Dan Kb	A
		P3A	
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Koperasi, Ukm	B
		Perdagangan	
24	Dinas Perhubungan	Perhubungan	B
25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Perpustakaan	B
		Kearsipan	
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Pertanian	A
27	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertanian	
28	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Perindustrian	B
		Tenaga Kerja	
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sub Urusan Tibum	A
		Sub Urusan Kebakaran	
30	Kecamatan Pelaihari	Kecamatan	A
31	Kecamatan Bati-Bati	Kecamatan	A

No	SKPD	BIDANG URUSAN	TIPE BERDASARKAN PERDA 6 2016
32	Kecamatan Takisung	Kecamatan	A
33	Kecamatan Batu Ampar	Kecamatan	A
34	Kecamatan Jorong	Kecamatan	A
35	Kecamatan Bajuin	Kecamatan	A
36	Kecamatan Kintap	Kecamatan	A
37	Kecamatan Bumi Makmur	Kecamatan	A
38	Kecamatan Kurau	Kecamatan	A
39	Kecamatan Tambang Ulang	Kecamatan	A
40	Kecamatan Panyipatan	Kecamatan	A

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut, 2023

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai 60,19. Perolehan nilai ini meningkat jika dibandingkan Tahun 2021 yaitu 60,16. Penilaian ini menunjukkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Tabel 2.106 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	53	56,21	60,06	60,19

Sumber: Kementerian PAN RB, 2023

Tabel 2.107 Daftar Bank yang Ada di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
1.	BNI	2	Kantor Kas BNI KK Asam-Asam Kantor Bank BNI KCP Pelaihari
2.	BRI	16	Kantor Kas BRI Teras Pasar Batu Ampar Kantor Kas BRI Teras Sarang Halang Kantor Kas BRI Teras Angsau Kantor Kas BRI Teras Nusa Indah Kantor Kas BRI Teras Pasar Pelaihari Kantor Kas BRI Teras RSUD H. Boedjasin BRI Teras Keliling KCP Bank BRI Unit Sungai Cuka KCP Bank BRI Unit Kintap KCP Bank BRI Unit Bati-Bati KCP Bank BRI Unit Gagasan KCP Bank BRI Unit Pelaihari Kota KCP Bank BRI Unit Takisung KCP Bank BRI Unit Jorong

No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
3.	BTN	7	KCP Bank BRI Unit Asam-Asam
			Kantor Cabang BRI Pelaihari
			Kantor Kas BTN Pelaihari
			Kantor Kas BTN Takisung
			Kantor Kas BTN Kurau
			Kantor Kas BTN Kintap
			Kantor Kas BTN Tajau Pecah
			Kantor Kas BTN Batu Tungku
			Kantor Kas BTN Bat-Bati
4.	Bank Mandiri	1	KCP Bank Mandiri Pelaihari
5.	Bank Syariah Indonesia	1	KCP Bank Syariah Indonesia
6.	Bank Kalsel	8	KCP Bank Kalsel Unit Asam-Asam
			KCP Bank Kalsel Unit Bati-Bati
			KCP Bank Kalsel Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
			Bank Kalsel Keliling
			Layanan Syariah Bank Kalsel KCP Pemkab Tanah Laut
			Layanan Syariah Bank Kalsel LS Unit Asam-Asam
			Layanan Syariah Bank Kalsel LS Cabang Pelaihari
			Kantor Cabang Bank Kalsel Pelaihari

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Pada tabel di bawah ini terlihat penurunan jumlah BUMD di Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah BUMD di Kabupaten Tanah Laut masing-masing berjumlah 4 BUMD. Namun pada tahun 2022, menjadi 3 BUMD yang masing-masing berjeniss BUMD Bidang Jasa, Bumd Bidang Pertambangan, dan BUMD Bidang Keuangan.

Tabel 2.108 Perkembangan Jumlah BUMD di Kabupaten Tanah Laut, 2020-2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
BUMD Bidang Jasa	2	2	1
BUMD Bidang Pertambangan	1	1	1
BUMD Bidang Keuangan	1	1	1
JUMLAH	4	4	3

Sumber: Satu Data Kab. Tanah Laut; Bag. Ekonomi Setda Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.109 Lembaga BUMD di Kabupaten Tanah Laut, 2022

No	BUMD	Unit Usaha	Penyertaan Modal (Rp.)	Modal Sendiri (Rp.)	Omset (Rp.)	Laba Tahun Berjalan (Rp.)	Laba yang disetor (Rp.)	Aset (Rp.)
1	PT. AM BERKAH BANUA	Pelayanan Air Bersih	64,568,504,147	-	11,181,155,542	(2,791,799,646)	-	28,492,857,616
2	PD. Baratala Tuntung Pandang	Pertambangan	0	1,000,000,000	15,070,981,795	1,426,092,929	0	3,709,359,949
3	PT. BPR TANAH LAUT	PERBANKAN	6,100,000,000	-	4,380,855,274	1,116,165,203	462,935,100	34,843,757,731
	Jumlah		70,668,504,147	1,000,000,000	30,632,992,611	(249,541,514)	462,935,100	67,045,975,296

Sumber: Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut, 2023 (No 2 dan 3, Berdasarkan un-audit 31/12/2022)

2.1.3.4.2 Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.110 Pelaksanaan Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2018-2022

No	Jenis Obyek Pemeriksaan	2018			2019			2020		
		Hasil (LHP,LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP,LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP,LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi
1	Pemeriksaan Khusus / Kasus	4	-	-	2	-	-	3	-	-
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Khusus / Kasus	0	-	-	2	-	-	2	-	-
3	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	75	616	1252	75	645	1318	50	533	1071
4	Reviu Laporan Keuangan OPD	40	-	-	40	-	-	40	-	-
5	Laporan Keuangan Pemda	1	-	-	1	-	-	1	-	-

No	Jenis Obyek Pemeriksaan	2018			2019			2020		
		Hasil (LHP,LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP,LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP,LHE, LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi
6	Evaluasi SPIP	1	-	-	1	-	-	1	-	-
7	Evaluasi LkjIP	40	-	-	40	-	-	40	-	-
8	Reviu RKA	2	-	-	2	-	-	2	-	-
9	Reviu RKPD	2	-	-	2	-	-	2	-	-
10	Reviu DAK Fisik	0	-	-	26	-	-	31	-	-
11	Pemeriksaan Cash dan Stock Opname	40 (BA)	-	-	40 (BA)	-	-	40 (BA)	-	-

Lanjutan

No	Jenis Obyek Pemeriksaan	2021			2022		
		Hasil (LHP,LHE,LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi	Hasil (LHP,LHE,LHR)	Jml. Temuan	Jml. Rekomendasi
1	Pemeriksaan Khusus / Kasus	3	-	-	0	-	-
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Khusus / Kasus	13	-	-	6	-	-
3	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	11	111	239	75	214	445
4	Reviu Laporan Keuangan OPD	40	-	-	40	-	-
5	Laporan Keuangan Pemda	1	-	-	1	-	-
6	Evaluasi SPIP	1	-	-	1	-	-
7	Evaluasi LkjIP	40	-	-	40	-	-
8	Reviu RKA	2	-	-	2	-	-
9	Reviu RKPD	2	-	-	2	-	-
10	Reviu DAK Fisik	22	-	-	41	-	-
11	Pemeriksaan Cash dan Stock Opname	40 (BA)	-	-	40 (BA)	-	-

Sumber: Inspektorat Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.111 Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah LKjIP yang nilainya meningkat	5	29	1	15	20
2	Jumlah Perangkat Daerah	40	40	40	40	40
3	Jumlah obrik yang tidak ada temuan keuangan	5	5	2	6	1

4	Jumlah obrik	101	86	57	85	38
5	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	587	430	174	276	72
6	Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan	1442	1386	1106	1138	510

Sumber: Inspektorat Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.4.3 Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar **67,28** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 2.112 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Tanah Laut, 2022

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,43
2	Pengukuran Kinerja	30	19,46
3	Pelaporan Kinerja	15	10,59

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,80
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,28
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber: Kementerian PAN RB RI, 2022

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai institusi pembina perencanaan pembangunan, mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah salah satunya dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan sejak tahun 2011.

Pada awalnya, apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan melalui penilaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seiring dengan berjalannya waktu, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah, tidak hanya dilihat dari aspek dokumen, melainkan juga melihat pada aspek pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan.

Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2019 hingga 2023, mengikuti Penilaian Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan berhasil mendapat juara ke-2 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.3.4.4 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut golongan dalam kurun waktu tahun 2019-2022 semakin menurun.

Tabel 2.113 Perkembangan Jumlah ASN menurut Golongan Kepangkatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019-2022

Pangkat	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Golongan I	58	51	45	36
Golongan II	622	644	632	624
Golongan III	3119	3023	3033	3015
Golongan IV	1200	1155	1124	1081

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.3.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.114 Daftar Inovasi Daerah yang Terkirim Melalui Aplikasi Inovation Government Award (IGA) Tahun 2022

No	SKPD		Nama Inovasi Daerah	Nilai Kematangan	Ket
1	Dinas Kesehatan	1.1	Survei Indikator PHBS Online oleh Kader (SIP OK)	97.00	Kesehatan
2	RSUD H. Boejasin	2.1	Boejasin Informasi Sistem Aplikasi (BISA)	72.00	Kesehatan
3	Bagian PBJ Sekretariat Daerah	3.1	Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut (SOSIALITA)	102.00	Fungsi Penunjang Lainnya
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.1	Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS)	102.00	Adm. Dukcapil, Kominfo
		4.2	Desa Tertib Administrasi Kependudukan (DETAK)	86.00	Adm. Dukcapil
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	5.1	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup melalui Nomor WA Pos Pengaduan DPRKPLH	66.00	Lingkungan Hidup
		5.2	Layanan Masyarakat Pengaduan Lampu Penenrangan Jalan Umum (LAMPU PJU)	68.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.1	Sistem Informasi Layanan Online (SIMFONI)	93.00	Kominfo Kepegawaian
		6.2	Sistem Informasi Dokumen Kepegawaian (SIDIKA)	97.00	Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian
7	Dinas P2KBP3A	7.1	Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	57.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Bappeda Kab. Tanah Laut, 2023

Selain itu Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut masuk dalam kategori “Inovatif” selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu masing-masing 52,42 dari nilai 100 pada tahun 2021 dan 52,12 dari 100 pada tahun 2022.

2.1.3.4.6 Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 (sembilan) kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan aset daerah.

Tabel 2.115 Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kab. Tanah Laut, 2018-2022

Kabupaten	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Tanah Laut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut, 2023

Selain itu, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 berada pada kategori “Sangat Perlu Perbaikan” dengan nilai 49,8. Dari segi pendapatan, kontribusi PAD yang digunakan dalam pendanaan pembangunan daerah masih rendah. Pada tahun 2022, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 7,88, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 13,53%.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan. Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, fasilitas wilayah dan iklim investasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat

pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum *Engel/Engel Law* bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel 2.116 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 (persen)

Kelompok Makanan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Makanan					
Padi-padian	11,45	10,71	10,65	11,66	10,48
Umbi-umbian	0,45	0,47	0,58	0,81	0,73
Ikan/udang/cumi/kerang	13,20	11,99	10,49	12,76	11,84
Daging	3,26	3,36	3,30	3,01	4,58
Telur dan susu	5,31	5,19	6,28	5,75	5,19
Sayur-sayuran	6,07	6,08	6,58	7,89	7,93
Kacang-kacangan	1,61	1,57	1,76	1,78	1,63
Buah-buahan	4,96	3,64	3,97	3,29	4,11
Minyak dan kelapa	2,63	2,48	2,48	2,57	3,45
Bahan minum	3,63	3,50	3,68	4,08	3,41
Bumbu-bumbuan	2,13	2,08	2,04	2,63	2,30
Konsumsi lainnya	2,27	1,96	2,22	2,30	2,17
Makanan dan minuman jadi	31,77	33,35	32,32	28,08	29,91
Rokok	11,26	13,60	13,65	13,40	12,28
Jumlah makanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bukan makanan					
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	58,14	60,05	54,50	57,34	52,68
Aneka komoditas dan jasa	25,12	18,30	21,99	19,20	20,97
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	6,93	6,82	6,61	6,93	5,65
Komoditas tahan lama	4,43	7,39	7,95	7,46	10,44
Pajak, pungutan, dan asuransi	5,38	5,57	6,80	8,24	8,71
Keperluan pesta dan upacara	58,14	1,87	2,15	0,82	1,54
Jumlah bukan makanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada kelompok makanan dan minuman jadi diikuti kelompok ikan/udang/cumi/kerang, padi-padian, sayur-sayuran. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Tanah Laut pola konsumsinya menginginkan yang lebih praktis dan siap saji dan didukung juga kemudahan akses berbagai jenis makanan dan minuman jadi.

Untuk konsumsi rokok, tingkat konsumsinya masih cukup tinggi walaupun dalam kurun waktu lima tahun persentasenya fluktuatif. Sementara itu untuk konsumsi umbi-umbian masih sangat rendah, hanya berkisar 0,73% pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan umbi-umbian bukan menjadi makanan pokok.

Pada tahun 2022, tingkat pengeluaran tertinggi pada Kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga 52,28% dan diikuti oleh Kelompok Aneka Komoditas dan Jasa sebesar 20,97%, sedangkan pengeluaran terendah pada Kelompok Keperluan Pesta dan Upacara.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah, karena dengan infrastruktur yang baik akan mempermudah kehidupan suatu wilayah. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur jua pada akhirnya akan mendorong perekonomian daerah kerana adanya kemudahan aksesibilitas.

2.1.4.2.1 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut seluas 3.631,35 km². Rencana Kawasan budidaya yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas seluas 5.204,96 ha di Kecamatan Kintap, hutan produksi tetap seluas 68.764,87 ha, dan hutan produksi konversi seluas 9.739,52 ha. Untuk kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tanah Laut meliputi kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri dari kawasan pertanian lahan basah seluas 42.322,38 ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.904,74 ha, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 39.425,54 ha, dan proyeksi

untuk cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 2.680,82 ha. Kawasan hortikultura di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 10 kecamatan dengan luasan keseluruhan sebesar 786 ha. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan pusat agropolitan di Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar, Panyipatan, dan Kurau. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut seluas 106.233,30 ha yang tersebar di seluruh kecamatan termasuk Kawasan agropolitan. Kawasan peternakan yang dikembangkan merupakan pengembangan komoditas sapi, sapi perah, kerbau rawa, dan kerbau darat.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebesar kurang lebih 3.969,35 ha, termasuk didalamnya kawasan Minapolitan seluas kurang lebih 530,95 ha terdiri atas: (1) perikanan budidaya air tawar meliputi jenis ikan introduksi dan jenis ikan lokal tersebar di setiap kecamatan; (2) perikanan budidaya air laut meliputi ikan, udang, kepiting, kerang-kerang, serta rumput laut di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung, Kurau, dan Bumi Makmur; dan (3) perikanan budidaya air payau meliputi udang, bandeng dan kepiting terdapat di Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Takisung, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kintap. Kawasan pengolahan hasil perikanan meliputi industri kecil rumah tangga berbasis minapolitan terdapat di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan; dan Kawasan konservasi seluas kurang lebih 3.080,09 ha yang terdapat di Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Kurau.

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan Tahun 2021 kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebesar 88,29 persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang. Nilai kesesuaian ruang merupakan perpaduan keterwujudan dan keselarasan pemanfaatan ruang yang setidaknya terdiri atas aspek struktur ruang dan pola ruang. Nilai tersebut merupakan hasil audit kesesuaian tata ruang yang dilakukan secara periodik setiap tahun.

Tabel 2.117 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2019-2021

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022

Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut (%)	65	70	78	87	97
-------------------------------------------------------------------	----	----	----	----	----

Sumber: DPUPRP Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.4.2.2 Luas Wilayah Industri

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 kawasan industri atau pusat kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Kecamatan Jorong. Selain berfungsi sebagai kawasan industri, Kecamatan Jorong juga berfungsi sebagai pusat kawasan industri berat dan pusat kawasan pertambangan. Kawasan ekonomi khusus ini dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, impor, dan perdagangan dalam rangka mendorong perekonomian suatu wilayah. Lebih dari itu kawasan ekonomi khusus juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah, dan juga membangun daya saing dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki. Sedangkan kawasan industri bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. Komoditi unggulan industri pengolahan adalah industri pengolahan makanan yang memiliki jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi terbanyak di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun jumlah investasi dan nilai produksi terbesar berada di Kecamatan Bati-Bati lalu setelah itu disusul oleh kecamatan Jorong. Namun demikian, dengan adanya penetapan Kecamatan Jorong sebagai kawasan industri diharapkan kedepannya mampu bersaing dengan Kecamatan Bati-Bati.

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.878,50 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah, dan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga. Rencana Kawasan peruntukan industri besar meliputi industri pertambangan dan perkebunan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap. Rencana kawasan peruntukan industri menengah terdiri dari pengembangan industri pengolahan dan industri pertanian di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang dan pengembangan

industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang. Rencana kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, karena selain dapat memberikan keuntungan kepada penanam modal, penanaman modal juga berfungsi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk menyusun kebijakan yang mendorong penguatan daya saing perekonomian nasional. Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan, salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan perizinan dalam proses pembuatan administrasi investasi.

2.1.4.3.1 Proses Perizinan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan panduan terkait proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut. Panduan pelayanan tersebut ditujukan untuk kemudahan akses dan kepastian perizinan bagi kegiatan Penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Tanah Laut, telah ditetapkan berbagai perizinan dalam memulai usaha di Kabupaten Tanah Laut. Proses perizinan tersebut telah ditampilkan pada situs resmi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut di alamat http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/web/page/40/informasi_izin. Jenis dan jumlah perizinan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada tabel berikut

**Tabel 2.118 Rekapitulasi Izin Terbit dan Retribusinya menurut Jenis
Permohonan Izin di Kabupaten Tanah Laut, 2022**

Jenis Permohonan Izin	Jumlah	Retribusi (Rp)
Persetujuan Bangunan Gedung/PBG	122	931,579,507
Izin Reklame	119	
Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	18	

Jenis Permohonan Izin	Jumlah	Retribusi (Rp)
Surat Keterangan Penelitian	141	
Izin Peternakan	5	
Izin Usaha Toko Swalayan	14	
Izin Apotek	4	
Izin Operasional Klinik	1	
Izin Operasional Puskesmas	2	
Izin Praktek Perawat	307	
Izin Praktek Apoteker	40	
Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	40	
Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	29	
Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	63	
Izin Praktek Tenaga Psikologi Klinis	1	
Izin Praktek Tenaga Anestesi	2	
Izin Praktek Tenaga Gizi	16	
Izin Praktek Dokter	183	
Izin Praktek Bidan	233	
Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	10	
Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien	1	
Surat Izin Kerja Sanitarian	35	
Surat Izin Kerja Promotor Kesehatan	13	
Surat Izin Kerja Fisioterapis	2	
Surat Izin Kerja Tenaga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	14	
Surat Izin Kerja Radiografer	5	
Surat Izin Kerja Tenaga Opukasi Terapi	1	
Surat Izin Praktek Dokter Hewan	2	
Surat Izin Operasional PAUD	91	
Surat Izin Praktek Tenaga Promotor Kesehatan dan Ilmu Perilaku	13	
Surat Izin Kerja Terapis Wicara	2	
Surat Izin Praktek Elektromedis	1	
Izin Pengumpulan Uang dan Barang	3	
Izin Hiburan	3	
Sertifikat Laik Higine Depo Air Minum	1	
Sertifikat Laik Higine Depo Sanitasi Jasa Boga	1	
Surat Keterangan Tatat Ruang	105	

Jenis Permohonan Izin	Jumlah	Retribusi (Rp)
Surat Keterangan Berusaha Perorangan	509	39,060,000
Surat Keterangan Berusaha CV	183	65,880,000
Surat Keterangan Berusaha PT	132	118,800,000
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	61	
Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	39	
Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	1	
TOTAL	2568	1,155,319,507

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

2.1.4.3.2 Angka Kriminalitas

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah tindak pidana kejahatan yang masuk di Kejaksaan Negeri Pelaihari.

**Tabel 2.119 Jumlah Tindak Pidana Kejahatan yang Masuk di
Kejaksaan Negeri Pelaihari, 2020-2022**

Jenis Tindak Pidana	Tahun		
	2020	2021	2022
Umum	102	88	75
Ekonomi	5	-	-
Subversi	-	-	-
Korupsi	3	6	4
Narkotika	117	112	124
Imigrasi	-	-	-
Senjata api atau tajam	13	12	21
Lain-lain	35	36	39
TOTAL	275	254	263

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Tanah Laut diarahkan untuk menyiapkan SDM

yang terampil, inovatif, kompetitif, dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah.

2.1.4.4.1 Rasio Ketergantungan

Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah. Pada tahun 2022, angka ketergantungan di Tanah Laut mencapai 47,07 persen meningkat dari tahun 2021 sebesar 46,88 persen. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk usia tidak produktif. Hal ini dengan asumsi bahwa setiap penduduk usia 15-64 tahun benar-benar dapat produktif. Jika usia produktif tidak dapat diberdayakan untuk benar-benar produktif secara ekonomi atau hanya menjadi pengangguran, maka justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan sosial diantaranya kesenjangan sosial dan kerawanan sosial.

Tabel 2.120 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
0-14 tahun	97,884	98,401	94,829	95,559	96,672
15-64 tahun	226,648	230,082	237,828	241,248	245,494
65+	14,663	7,624	16,309	17,533	18,878
Rasio Ketergantungan (%)	49.66	46.08	46.73	46.88	47.07

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023 (diolah)

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN REALISASI RPJM SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

2.2.1. Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD Tahun 2022 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja terhadap indikator tujuan daerah dan indikator sasaran daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tanah Laut Tahun 2022. Angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121

Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
Misi 1: BERKARYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERBASIS TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA					
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,9	70,35	BPS
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	10	7,90	BPS
		Harapan lama sekolah	13,7	12,32	BPS
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja	500	975	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,9	70,35	BPS
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,6	69,86	BPS
		Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call	100	100	Dinas Kesehatan
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya		Indeks Kepuasan Masyarakat	77,5 (Baik)	85,65	Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	1,2	2,12	BPS
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil	100	98,78	Dinas Dukcapil

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	Kecamatan
	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Indeks Pembangunan Pemuda	46,5	NA	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Jumlah Atlet yang berprestasi	81	534	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	Dinas Kominfo
Misi 2: MENCIPTAKAN INOVASI DI SEGALA SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI					
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik		Jumlah penghargaan inovasi publik	1	1	Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut
	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	10	Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan		Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	20	134	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
Industri Kreatif	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	5	5	DPMD
	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	20	134	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian
MISI 3: MEMBANGUN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	63 (Baik)	60,19 (Baik)	Bagian Organisasi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	A (81)	B	Bagian Organisasi
		Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	BPKAD
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik	47,62	58,98	Dinas Kominfo
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	25	40	Dinas Kominfo
MISI 4: MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS DAN RELIGIUSITAS DALAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT					

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia		Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100	100	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan	11	10	Kecamatan

MISI 5: MEMBANGUN SINERGITAS YANG BAIK ANTARTINGKAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Meningkatkan kesejahteraan sosial		Angka Kemiskinan	4,36	3,86	BPS
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5	5,12	BPS
		Indeks Gini (skor)	0,254	0,263	BPS
		PDRB per kapita (ADHK)	36,81	30,62	BPS
	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	89,00	87,28	BPS
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,6	4,17	BPS
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah	125 (Sedang)	156	BPBD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	Satpol PP
		Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	25	13,32	Dinas Sosial
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur	72	58,12	Dinas PUPRP
	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	80	73,48	Dinas PUPRP
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	97	68,07	Dinas PUPRP
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	75	71,91	Dinas PUPRP
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak (%)	40	73,45	Dinas PUPRP
Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah		Persentase Pertumbuhan sektor unggulan daerah	5,05	13,66	BPS

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%	130	309	Bagian Ekonomi
		Pertumbuhan sektor Pertanian	3,53	2,7	BPS
		Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,59	3,86	BPS
		Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah	300,000	219,258	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan	95	90,7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61	67,78	Dinas Perkim LH
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,34	67,78	Dinas Perkim LH
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	92	97	Dinas PUPRP
Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota		Indeks Desa Membangun	0,800 (maju)	0,707	DPMD
	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahan baik	100	100	DPMD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun	100	100	DPMD
		Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat	26	29	DPMD
		Jumlah Desa di bina berciri khas	5	7	DPMD
	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	3	0,21	Dinas PerkimLH
		Persentase penataan pasar Peltahari (%)	60	61,97	Dinas Koperasi, UK dan Perdagangan

Sumber: Bappeda Kab. Tanah Laut, 2023

Hasil evaluasi dari tujuan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, dapat tercapai sesuai target sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Laut dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk indikator sasaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat tercapai sesuai target sebanyak 29 indikator kinerja Sasaran dari 47 indikator sasaran yang telah ditetapkan dan ada satu indikator yang tidak dapat di evaluasi disebabkan tidak tersedianya data tingkat kabupaten yakni indeks pembangunan pemuda.

Secara keseluruhan untuk Gambaran jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Jumlah Program : 220

Jumlah Kegiatan : 567

Jumlah Sub Kegiatan : 1555

Jumlah OPD : 40

Pagu belanja APBD : Rp. 2.122.153.779.067,00 (Perubahan APBD)

Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang terlihat dari kinerja belanja langsung APBD, dimana pada Tahun 2022 diperoleh rata-rata tingkat capaian RKPD sebesar 87,83 % untuk kinerja keuangan dan 93,53 % untuk kinerja fisik. Berikut data capaian kinerja per perangkat daerah Tahun Anggaran 2022.

2.122 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			Keuangan		Fisik
		Rp	Rp	%	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	522,572,058,830.00	443,104,286,402.00	84.79	88.87
2	Dinas Kesehatan	450,120,221,110.00	383,454,904,393.92	85.19	90.34
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	298,381,563,726.00	279,426,034,490.00	93.65	98.85
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	106,649,899,448.00	101,308,883,488.00	94.99	100.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13,322,059,818.00	12,424,756,791.00	93.26	99.1
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,922,672,948.00	4,017,136,531.00	81.60	81.61
7	Dinas Sosial	18,750,069,515.00	12,947,302,316.00	69.05	99.97
8	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10,290,440,542.00	8,214,671,639.00	79.83	99.45
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14,792,856,788.00	11,663,779,056.00	78.85	90.48
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12,530,421,310.00	11,049,504,541.00	88.18	89.86
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9,444,069,405.00	8,474,507,702.00	89.73	87.83
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11,733,605,829.00	10,205,122,919.00	86.97	99.99
13	Dinas Perhubungan	9,455,218,457.00	8,313,939,696.00	87.93	88
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,474,476,919.00	9,517,772,688.00	90.87	100
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	17,564,050,674.00	16,266,532,497.00	92.61	99.42

NO	SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			Keuangan		Fisik
		Rp	Rp	%	%
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,392,445,040.00	3,963,364,969.00	73.50	100
17	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	19,721,615,955.00	18,350,988,164.00	93.05	94.29
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,096,851,564.00	5,413,223,498.00	76.28	85.06
19	Dinas Pariwisata	7,383,197,919.00	5,981,972,433.00	81.02	99.19
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	42,763,638,991.00	39,255,327,876.00	91.80	91.8
21	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	9,918,882,192.00	8,943,149,170.00	90.16	90.57
22	Sekretariat Daerah	76,807,742,632.00	71,688,787,342.00	93.34	99.11
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	63,394,799,817.00	50,101,531,416.00	79.03	80.1
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,252,058,454.00	8,440,290,985.00	91.23	99.91
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	268,335,448,124.00	244,037,891,351.00	90.95	100.00
26	Badan Pendapatan Daerah	10,768,280,277.00	9,250,663,040.00	85.91	99.37
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,858,376,327.00	7,282,830,341.00	82.21	96.87
28	Inspektorat Kabupaten	15,048,522,610.00	13,904,689,166.00	92.40	92.4
29	Kantor Kecamatan Bajuin	3,434,695,515.00	2,869,535,715.00	83.55	99.88
30	Kantor Kecamatan Bati-Bati	5,392,345,641.00	4,281,899,672.00	79.41	79.56
31	Kantor Kecamatan Batu Ampar	3,611,840,965.00	3,171,993,775.00	87.82	99.63
32	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	3,355,323,542.00	3,029,557,448.00	90.29	98.66
33	Kantor Kecamatan Jorong	4,020,342,259.00	3,185,693,769.00	79.24	74.82
34	Kantor Kecamatan Kintap	3,964,986,548.00	3,167,389,242.00	79.88	100
35	Kantor Kecamatan Kurau	3,429,575,371.00	2,436,769,330.00	71.05	84.31
36	Kantor Kecamatan Pelaihari	16,002,698,476.00	13,952,769,668.00	87.19	99.93
37	Kantor Kecamatan Panyipatan	4,204,061,128.00	3,827,762,632.00	91.05	96.07
38	Kantor Kecamatan Takisung	3,648,697,238.00	3,221,206,262.00	88.28	88.19
39	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	4,035,347,946.00	3,154,012,652.00	78.16	78.78
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11,308,319,217.00	10,652,552,319.00	94.20	99.06
	TOTAL	2,122,153,779,067	1,863,954,987,385	87.83	93.53

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut, 2023

Tabel 2.123 Anggaran dan Realisasi Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	1.740.032.489.864,00	2.159.239.661.099,87	124,09
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.390.127.793,00	193.890.015.753,87	108,69
3	Pendapatan Pajak Daerah	41.000.250.000,00	45.363.440.225,80	110,64
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.952.619.500,00	6.971.598.007,00	87,66
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.010.810.370,00	11.010.810.384,00	100,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	118.426.447.923,00	130.544.167.137,07	110,23
7	PENDAPATAN TRANSFER	1.560.894.562.071,00	1.963.205.983.275,00	125,77
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	124,79
9	Dana Perimbangan	1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	124,79
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	114.676.716.000,00	114.436.736.400,00	99,79
10	Dana Insentif Daerah (DID)	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	100,00
11	Dana Desa	104.333.770.000,00	104.093.790.400,00	99,77
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	164,73
13	Pendapatan Bagi Hasil	110.250.000.000,00	181.618.220.753,00	164,73
14	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	747.800.000,00	2.143.662.071,00	286,66
16	Pendapatan Hibah	747.800.000,00	2.143.662.071,00	286,66
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
18	BELANJA	2.122.153.778.445,00	1.863.861.922.192,92	87,83
19	BELANJA OPERASI	1.439.009.698.746,00	1.241.627.856.198,92	86,28
20	Belanja Pegawai	761.383.543.055,00	653.956.945.688,00	85,89
21	Belanja Barang dan Jasa	604.326.333.840,00	520.933.208.907,92	86,20
22	Belanja Hibah	47.079.621.851,00	44.321.201.603,00	94,14
23	Belanja Bantuan Sosial	26.220.200.000,00	22.416.500.000,00	85,49
24	BELANJA MODAL	436.247.177.182,00	397.257.596.454,00	91,06
25	Belanja Modal Tanah	394.310.000,00	240.492.000,00	60,99
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.403.917.048,00	91.151.091.039,00	83,32
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.572.068.902,00	104.788.622.560,00	93,09
28	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	213.225.317.172,00	200.681.712.555,00	94,12
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.289.060,00	16.548.300,00	68,13
30	Belanja Modal Aset Lainnya	627.275.000,00	379.130.000,00	60,44
31	BELANJA TAK TERDUGA	22.426.879.377,00	746.426.000,00	3,33
32	Belanja Tak Terduga	22.426.879.377,00	746.426.000,00	3,33
33	BELANJA TRANSFER	224.470.023.140,00	224.230.043.540,00	99,89
34	Belanja Bagi Hasil	4.895.286.950,00	4.895.286.950,00	100,00
35	Belanja Bantuan Keuangan	219.574.736.190,00	219.334.756.590,00	99,89
36	SURPLUS / (DEFISIT)	(382.121.288.581,00)	295.377.738.906,95	(77,30)
37	PEMBIAYAAN			
38	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	610.990.188.934,00	611.325.812.033,83	100,05
39	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	604.990.188.934,00	604.990.188.933,83	100,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4	5
40	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000,00	6.004.455.100,00	100,07
41	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	331.168.000,00	100,00
42	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00
43	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
44	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
45	PEMBIAYAAN NETTO	535.990.188.934,00	536.325.812.033,83	100,06
46	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	153.868.900.353,00	831.703.550.940,78	540,53

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut, 2023

Adapun untuk realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan, kegiatan dan program pada RKPD 2022 tertuang dalam lampiran I dari Dokumen RKPD 2024 ini.

2.2.2. Faktor Penghambat, Faktor Pendorong dan Tindakan Lanjut

Tabel 2.124 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Tindakan Lanjut Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prioritas 1 : Peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Era Normal sdh diberlakukan, banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat sdh dilaksanakan yang menyebabkan geliat ekonomi sudah Nampak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan nomanklatur Sub Kegiatan untuk DAK terbit di akhir April sehingga Pelaksanaan DAK baru di mulai di bulan Mei 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor –sektor yang menjadi penyumbang PDRB akan di titik beratkan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi - Melakukan Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait untuk perencanaan pelaksanaan DAK di Tahun 2023 agar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
2	Prioritas 2: Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi Anggaran Untuk Pendidikan diatas 20% dan Untuk Kesehatan diatas 10% - Merupakan Bagian dari Pemenuhan SPM - Adanya Program Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang Pertahun dan realisasinya untuk tahun 2021 mencapai 999 orang terlatih siap kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan nomanklatur Sub Kegiatan untuk DAK terbit di akhir April sehingga Pelaksanaan DAK baru di mulai di bulan Mei - Pola Pikir masyarakat dipedesaan belum peduli terhadap pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah pedesaan terkait pentingnya Pendidikan - Melakukan Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait untuk perencanaan pelaksanaan DAK di Tahun 2023 agar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan - Mengevaluasi kembali dan memonitoring peserta-peserta yang telah mendapatkan pelatihan tenaga kerja, apakah terserap di dunia kerja
3	Prioritas 3: Reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dokumen perencanaan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKP dan RB kab. Tanah Laut masih blm 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan lebih

NO	Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut Yang Diperlukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		indikator kinerja yang terukur. - Tingginya Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.	optimal, untuk SAKIP di B dan RB di B	intensif dan dilaksanakan secara berkala. - Proses pengadaan barang/jasa agar dilakukan seawal mungkin. - Meningkatkan Kualitas pada tahapan perencanaan selanjutnya, baik pada saat survey harga pengadaan barang pada penentuan dan perumusan output, maupun pada penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja. - Menyiapkan peningkatan kapasitas perencana pada skpd dalam bentuk bimtek guna penyusunan RPD

Sumber: Bappeda Kab. Tanah Laut, 2023

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Pembangunan tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah anatara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - a. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebesar 70.35 atau berada pada urutan ke-7 dari seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, serta masih dibawah nilai indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.
2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Investasi
 - a. Struktur Ekonomi di Kabupaten Tanah Laut Pada Tahun 2022 masih di dominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini akan menjadi permasalahan serius di masa mendatang, mengingat pertambangan merupakan sumber daya yang bersifat *non renewable resources*.
 - b. Belum operasionalnya Kawasan Industri Jorong yang merupakan Proyek Strategi

Nasional (PSN) yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020. Sehingga pertumbuhan investasi belum maksimal. Diharapkan dengan terealisasinya KII ini akan menarik para investor baik itu yang PMDN maupun PMA.

3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 - a. Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut masih dalam kategori "B" pada tahun 2022.
4. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
 - a. Masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak. Capaian persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak pada tahun 2022 baru 73,45% sedangkan untuk air minum baru 71.89%.
 - b. Belum Semua Jalan Berkondisi Mantap. Pada tahun 2022 capaian jalan dalam kondisi mantap baru 73,48 %.
 - c. Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Laut selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini bisa terlihat pada IKLH Kab. Tanah Laut. IKLH pada tahun 2022 berada pada angka 67,78. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 68,7.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai keuangan urusan pemerintah daerah yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2023 serta solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator melihat kesejahteraan masyarakat, karena dari Pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Adapun permasalahan bidang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut adalah Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebesar 7,90 tahun atau masih dibawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 8,34 Tahun

dan Nasional yaitu 8,54. Selain itu Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebesar 12,32 tahun atau masih dibawah angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 12,81 Tahun dan Nasional 13,10 Tahun.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk sekolah menjadi salah satu penyebab mengapa ARLS Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawah Provinsi dan Nasional.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan sektor menjadi prioritas yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan pada bidang kesehatan yang dihadapi Kabupaten Tanah Laut yaitu Angka Kematian Bayi pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi di tahun 2022, yaitu 10 per 1.000 kelahiran hidup. Melihat masih tingginya angka kematian bayi mengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan terutama ibu dan bayi.

Selain itu, kejadian stunting pada balita masih terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Persentase balita stunting tercatat sebesar 26,60% pada tahun 2022 berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia. Angka ini masih di atas standar WFO yaitu sebesar 20%. Masih tingginya angka stunting ini dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas SDM.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belum Semua Jalan Berkondisi Mantap. Pada tahun 2022 capaian jalan dalam kondisi mantap baru 73,48 %. Selain itu belum semua Jalan Berkondisi Mantap. Pada tahun 2022 capaian jalan dalam kondisi mantap baru 73,48 %.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masih Terdapat Rumah Dalam Kondisi Tidak Layak Huni (RTLH). Adapun jumlah seluruh rumah di Kota Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebanyak 104.234 sehingga masih terdapat 3.575 unit rumah dalam kondisi tidak layak huni. Rumah tidak layak huni ini perlu segera diintervensi oleh Pemerintah Kota, karena hal ini mempengaruhi kelayakan dan keamanan dari bangunan tempat tinggal masyarakat. Dukungan dan kerjasama dari sektor swasta pun dibutuhkan dalam penyediaan rumah layak huni sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masih tingginya angka pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Tanah Laut

dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan atas Perda/Perkada tersebut.

6. Sosial

Dalam pencapaian SPM bidang Sosial, terdapat permasalahan yaitu Masih kurangnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di lingkungan Masyarakat.

II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 meningkat di angka 4,17%. Meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,52%. Meningkatnya TPT ini salah satunya disebabkan oleh adanya serangan hama pada lahan pertanian yang menyebabkan para petani tidak dapat bekerja, sehingga pada saat survey oleh BPS dihitung sebagai pengangguran.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Angka Pernikahan dini di Kabupaten Tanah Laut tergolong tinggi. Berdasarkan data Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebanyak 137 orang perempuan berusia dibawah 19 tahun.

3. Pangan

Di Kabupaten Tanah Laut masih memiliki desa rentan ketersediaan pangan. Berdasarkan data pada tahun 2022, ada 20 desa yang kategori tinggi, 20 desa kategori 20 desa, dan 28 desa kategori rendah.

4. Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Laut selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini bisa terlihat pada IKLH Kab. Tanah Laut. IKLH pada tahun 2022 berada pada angka 67,78. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 68,7.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil belum mencapai 100%, capainnya 98,78% pada tahun 2022.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah Desa kategori Mandiri masih sedikit. Pada Tahun 2022 baru ada 8 desa mandiri

dari 130 desa di Kabupaten Tanah Laut.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menurunnya Jumlah Peserta KB Aktif pada tahun 2022 jumlahnya menjadi 42.653 peserta. Sama halnya dengan Pasangan Usia Subur yang ada di Kabupaten Tanah Laut, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 jumlahnya 56.727 pasangan.

8. Komunikasi dan Informatika

Masih terdapat daerah blankspot di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan data pada tahun 2022 ada 34 titik blank spot, yaitu Kecamatan Bajuin 4 titik, Kecamatan Batu Ampar 5 titik, Kecamatan Bumi Makmur 3 titik, Kecamatan Jorong 3 titik, Kecamatan Pelaihari 6 titik, Kecamatan Takisung 12 titik, dan Kecamatan Tambang Ulang 1 titik.

9. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pada urusan ini yaitu kurangnya inovasi dalam pengembangan produk yang dikarenakan kurangnya keadaran dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

10. Penanaman Modal

Kabupaten Tanah Laut memiliki berbagai macam potensi sumber daya daerah yang sangat potensial. Peluang dan potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri, terutama investor. Hal ini menyebabkan rendahnya daya saing investasi daerah. Sehingga perlu dilakukannya pengembangan dan promosi investasi. Selain itu juga, jika Kawasan Industri Jorong telah berjalan sesuai yang diharapkan, maka akan menambah daya saing investasi di Kabupaten Tanah Laut.

11. Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Tanah Laut masih sedikit memiliki sarana dan prasarana olahraga yang representatif. Apalagi direncanakan Kabupaten Tanah Laut menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025, Sehingga memerlukan venue dan persiapan sarana prasarana olahraga yang representatif.

12. Perpustakaan

Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat bahan pustaka yang tersedia di

Kabupaten Tanah Laut.

13. Kearsipan

Kualitas pengelolaan kearsipan di Kabupaten Tanah Laut masih rendah, berdasarkan data dari ANRI, Indeks Kearsipan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada angka 61,29

III. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 65.031 ton dan produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 1.415 ton. Jumlah produksi ini tidak sebanding dengan potensi sungai dan danau serta lahan basah yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas budidaya ikan. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya. Adapun kendala dalam perikanan budidaya yaitu keterampilan dan pengetahuan pembudidaya ikan masih rendah dikarenakan kemampuan mengakses teknologi masih rendah. Sedangkan kendala pada perikanan tangkap yakni peralatan yang digunakan masih banyak yang tradisional serta cuaca seperti angin, gelombang dan pasang surut mempersulit nelayan dalam berlayar.

2. Pariwisata

Sampai saat ini belum ada kerjasama dengan pihak ketiga/investor dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Tanah Laut sehingga berimbas pada pengelolaan pariwisata di Tanah Laut. Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mencapai 219.258. Angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020.

3. Pertanian

Produksi hasil pertanian selama lima tahun terakhir fluktuatif kecenderungan menurun. Pada tahun 2022 produksi padi di kabupaten tanah laut berada pada angka 143.962 ton menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 145.890 ton. Begitu juga dengan produksi jagung yang terjadi penurunan.

4. Perdagangan

Pengelolaan pasar di Kabupaten Tanah Laut masih secara konvensional masih belum menjadi pasar modern.

5. Perindustrian

Belum terbangunnya Kawasan Industri Jorong yang merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020.

IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Administrasi Pemerintahan Umum

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 masih dalam kategori "B".

2. Perencanaan Pembangunan

Belum optimalnya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan. Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya ketersediaan data kinerja sebagai bahan evaluasi perencanaan, penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh lambatnya SKPD dalam menginput capaian pada aplikasi serta keterbatasan waktu yang di sediakan untuk pelaksanaan Monev dalam perencanaan pembangunan dan realisasinya.

3. Keuangan

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berada pada kategori "Sangat Perlu Perbaikan" dengan nilai 49,8.

4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tanah Laut masih rendah.

5. Penelitian dan Pengembangan

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut masuk dalam kategori "Inovatif" namun dengan nilai yang belum memuaskan yaitu 52,12 dari 100.

6. Pengawasan Pembangunan

Masih kurangnya pemahaman dan komitmen SKPD untuk melaksanakan SAKIP dan RB secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Isu Strategis

Berdasarkan realisasi capaian pada tahun 2022 dan permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka disusunlah isu strategis yang dihadapi pada pembangunan 2024 sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
3. Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
4. Reformasi Birokrasi
5. Penyangga Pangan Ibu Kota Negara (IKN)
6. Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum Legislatif, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
7. Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro, proyeksi Tahun 2024 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2024. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2024 sesuai dengan RPD 2024-2026 adalah dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian dan investasi daerah dengan terus meningkatkan kualitas penunjang infrastruktur perekonomian dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya local yang ramah lingkungan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Untuk Sasaran Pembangunan nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2024 sebagai berikut.

Gambar 3.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024



11

Sedangkan Sasaran Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebagai berikut

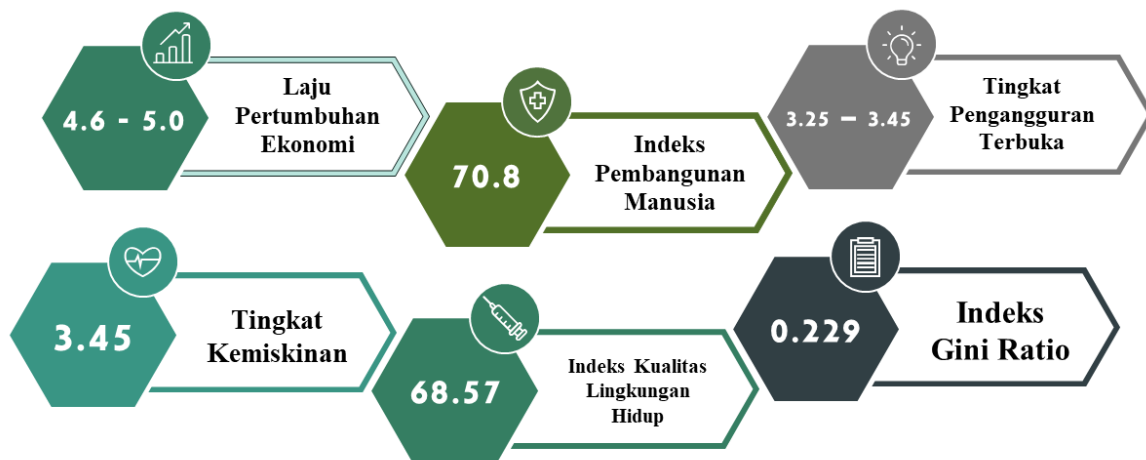
Tabel 3.1 Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

INDIKATOR	TARGET
Indeks Pembangunan Manusia	72,65
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05
Tingkat Kemiskinan	4,40 – 5,0
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6 – 5,0
Indek Gini	0,334
Emisi Gas Rumah Kaca	24,6
Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup	71,22

Sementara untuk sasaran pembangunan daerah sesuai dengan pertemuan yang telah dilaksanakan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 5 April 2023 disepakati Target Indikator pembangunan Makro Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024



Dengan memperhatikan capaian indikator perekonomian di kabupaten Tanah Laut selama lima tahun terakhir yang sudah di deskripsikan pada Bab II serta melihat potensi ekonomi serta berbagai hal terkait pencapaian target pembangunan di masa yang akan datang, maka beberapa kebijakan perlu disiapkan, diantaranya:

1. Perubahan basis ekonomi

Ketergantungan yang besar pada hasil eksploitasi alam akan menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam memperhatikan kualitas lingkungan serta keterbatasan dalam potensi yang dimilikinya, sehingga perlu diupayakan kedepan Kabupaten Tanah Laut memiliki basis ekonomi yang berdasarkan pada potensi alam yang dimiliki dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Perlu disiapkan kesepakatan dan perangkat kebijakan yang mendukung perubahan dari basis ekonomi primer menjadi basis ekonomi sekunder dan tersier untuk pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.

2. Pertanian dan Industri

Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian adalah dengan cara peningkatan nilai tambah. Salah satu caranya adalah menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku industri yang terdapat pada daerah tersebut. Industri pengolahan makanan yang bahan bakunya berasal dari wilayah setempat, selain mampu menggerakkan ekonomi juga mampu melibatkan banyak aktor ekonomi lokal sehingga memungkinkan penciptaan angka pengganda yang tinggi. Perangkat kebijakan yang diperlukan adalah mendorong suasana kondusif bagi kegiatan investasi dalam pengembangan industri pengolahan hasil pertanian agar lebih mendorong para investor baik lokal maupun nasional untuk masuk ke Kabupaten Tanah Laut. Disamping itu diperlukan seperangkat kebijakan untuk mendukung kegiatan investasi di bidang industri melalui penyiapan infrastruktur pendukung untuk membantu kegiatan industri dalam mencapai tingkat efisiensi dalam berusaha.

3. Upaya peningkatan perhatian pada kualitas lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas ekonomi selalu bersinggungan dengan menurunnya kualitas lingkungan sekitar jika tidak ditangani dengan benar. Upaya meningkatkan aktivitas industri dalam upaya peningkatan nilai tambah perlu disertai dengan kebijakan lingkungan. Mitigasi resiko atas kegiatan-kegiatan industri yang akan memberikan kontribusi bagi peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan harus diidentifikasi sejak dini. Seperangkat aturan, baik yang berisi tentang kewajiban dan dukungan pemerintah daerah terkait masalah lingkungan harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

4. Pemanfaatan dan optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pelabuhan laut berstandar internasional

Jika PSN dan pelabuhan laut di Kabupaten Tanah Laut benar-benar terealisasi sebagaimana rencana yang telah disusun, maka pemanfaatannya harus benar-benar direncanakan dengan baik. PSN

ini diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, pelabuhan laut berstandar internasional ini akan berfungsi sebagai pintu masuk maupun keluar bagi semua barang/produk baik faktor produksi maupun hasil industri bagi Kabupaten Tanah Laut maupun juga bagi daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keduanya, diperlukan dukungan kelengkapan infrastruktur ekonomi yang berkualitas sebagai penghubung/penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hierarki suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang.

5. Menjaga daya beli masyarakat

Komponen terpenting dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut adalah tingginya konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan konsumsi masyarakat masih mendominasi aktivitas ekonomi, sehingga kemampuan daya beli masyarakat harus dipertahankan agar komponen konsumsi ini tetap mampu memberikan dukungan pada ekonomi daerah. Oleh karena itu kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat sangat diperlukan. Kebijakan ini dapat melalui pencapaian pendapatan per kapita yang meningkat, kebijakan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), kebijakan pengamanan ketersediaan bahan yang dibutuhkan masyarakat melalui penataan logistik yang sesuai, dan lain sebagainya.

6. Peningkatan peran perbankan

Perbankan yang memainkan peran penting dalam perekonomian perlu diberikan porsi yang lebih besar agar lebih berperan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi sektoral. Melalui aktivitas perbankan, baik peningkatan sisi simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) maupun penyaluran melalui kredit akan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Maka dibutuhkan pendekatan yang sesuai agar perbankan memberikan perhatian dan dukungan bagi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut melalui penyaluran kredit pada sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian, misalnya industri dan pertanian.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program*, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan (a) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, (b) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan (c) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu

pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakekatnya adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri atas: (a). pendapatan asli daerah; (b). pendapatan transfer; dan (c). lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer meliputi:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat mengatur pendapatan transfer pemerintah pusat ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :

- 1) Dana perimbangan yang terdiri atas Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK). DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan; pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan cukai hasil tembakau; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran Uin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dana Transfer Khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana insentif daerah

Dana insentif daerah sebagaimana bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu

3) Dana desa.

Dana desa sebagaimana bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

- 1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2024

Kode	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi APBD 2022	Pergeseran TA 2023	RKPD TA 2024
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.613.752.681.343,77	Rp. 1.522.901.390.516,55	Rp. 2.159.239.661.099,87	Rp. 1.761.088.881.265,00	Rp. 1.854.245.673.993,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 189.603.069.628,77	Rp. 206.135.630.695,55	Rp. 193.890.015.753,87	Rp. 223.171.000.000,00	Rp. 214.251.193.884,00
4.1.01	Pajak Daerah	Rp. 44.576.818.515,00	Rp. 43.638.422.656	Rp. 45.363.440.225,80	Rp. 49.171.000.000,00	Rp. 50.448.644.721,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp. 7.526.749.567,00	Rp. 5.743.153.528,80	Rp. 6.971.598.007,00	Rp. 11.946.804.500,00	Rp. 8.317.941.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 7.441.598.663,00	Rp. 9.836.676.685,00	Rp. 11.010.810.384,00	Rp. 13.330.112.415,00	Rp. 16.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 130.057.902.883,77	Rp. 146.917.377.825,75	Rp. 130.544.167.137,07	Rp. 148.723.724.550,00	Rp. 139.484.608.163,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 1.208.327.752.561,00	Rp. 1.274.449.541.251,00	Rp. 1.963.205.983.275,00	Rp. 1.536.761.239.800,00	Rp. 1.639.994.480.109,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.104.360.025.851,00	Rp. 1.174.467.043.937,00	Rp. 1.781.587.762.522,00	Rp. 1.414.901.539.800,00	Rp. 1.489.620.427.173,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan			Rp. 1.667.151.026.122,00	Rp. 1.305.643.438.800,00	Rp. 1.380.362.326.173,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				Rp. 548.181.440.800,00	Rp. 800.779.821.173,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp. 512.108.210.000,00	Rp. 579.582.505.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik					

4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik					
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)			Rp. 10.342.946.000,00		
4.2.01.05	Dana Desa			Rp. 104.093.790.400,00	Rp. 109.258.101.000,00	Rp. 109.258.101.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 103.967.726.710,00	Rp. 99.982.497.314,00	Rp. 181.618.220.753,00	Rp. 121.859.700.000,00	Rp. 150.374.052.936,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil			Rp. 181.618.220.753,00	Rp. 121.859.700.000,00	Rp. 150.374.052.936,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 215.821.859.154,00	Rp. 42.316.218.570,00	Rp. 2.143.662.071,00	Rp. 1.156.000.000,00	-
4.3.1	Pendapatan Hibah		Rp. 3.203.438.570,00	Rp. 2.143.662.071,00	Rp. 1.156.000.000,00	-
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan		Rp. 39.112.780.000,00			-

Sumber : Badan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa proyeksi pendapatan pada tahun 2024 lebih rendah dari realisasi 2022. Penurunan pendapatan ini disebabkan sumber utama pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan menurun, terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. Pada Tahun 2022, DBH ini terjadi peningkatan yang signifikan dikarenakan harga komoditi batu bara naik serta adanya penyaluran DBH dari pemerintah pusat yang tidak disalurkan pada tahun sebelumnya dan disalurkan pada tahun 2022. Sehingga untuk penyusunan proyeksi pendapatan 2024 kemungkinan tidak akan sebesar pada yang diperoleh pada tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan. Oleh sebab itu perlu adanya arah kebijakan pendapatan yang mengarah kepada peningkatan pendapatan yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah.

Dalam hal usaha meningkatkan pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun permasalahan dimaksud antara lain adalah :

1. Sumber daya manusia yang belum memenuhi kompetensi dan kebutuhan organisasi dalam meningkatkan pendapatan daerah (belum memiliki juru sita, pemeriksa pajak, pejabat penilai/appraisal);
2. Database pajak daerah dan retribusi belum termutakhirkan secara keseluruhan dan belum terintegrasi secara penuh;
3. Setting tarif pajak daerah dan retribusi yang sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi daerah;
4. Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah;
5. Pelayanan yang masih belum optimal;

Melihat analisis kondisi perkembangan perekonomian yang ada, mengamati perkembangan pembangunan dan melihat permasalahan yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah ialah:

1. Peninjauan dan penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen/pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
3. Mendorong peningkatan investasi di daerah.
4. Perlu melakukan kajian terhadap potensi pendapatan.
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait pendapatan.

6. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat untuk memperoleh dana APBN.

Dengan strategi tersebut diatas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut.

1. Peninjauan dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
2. Meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan,
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak/retribusi,
4. Meningkatkan kualitas SDM,
5. Meningkatkan pelayanan perijinan,
6. Mempercepat pembangunan infrastruktur.

Kemudian upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan reviu atas peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
- b. Melakukan penelitian dan kajian potensi pendapatan asli daerah (PAD).
- c. Peningkatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pada BUMD.
- e. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
- f. Memperbaiki fasilitas obyek retribusi.
- g. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah,
- h. Penegakan peraturan daerah,
- i. Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah,
- j. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya dengan keajiban pembayaran pajak daerah,
- k. Melakukan bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah,
- l. Melakukan penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan,
- m. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi daerah menuju pelayanan prima,
- n. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi dengan harapan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.
- o. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait pendapatan.

Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Kemudian Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah harus dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan daerah harus diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas: pelayanan umum; ketertiban dan keamanan; ekonomi; perlindungan lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata; pendidikan; dan perlindungan sosial.

Kemudian Belanja Daerah menurut organisasi harus disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan harus disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Program dan Kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup: (1). Target dan Sasaran; (2). Indikator Capaian Keluaran; dan (3). Indikator capaian Hasil.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- 1) Belanja Operasi yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis: (1). Belanja Pegawai; (2). Belanja Barang dan Jasa; (3). Belanja Hibah; dan (4). Belanja Bantuan Sosial
- 2) Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas : (1). Belanja Modal Tanah; (2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin; (3) Belanja Gedung dan Bangunan; (4). Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi; (5). Belanja Aset Tetap Lainnya; dan (6) Belanja Aset Lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja Transfer yaitu merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: (1). Belanja Bagi Hasil; dan (2). Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan

Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: (1). mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2). digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (3). batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan /atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi

belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan terdiri atas: (a). bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; (b). bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; (c). bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten / kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; (d). bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau (e). bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal belanja dimaksud tidak mencukupi, menggunakan: (a). dana terduga sebagaimana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau (b). memanfaatkan kas yang tersedia.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Tanah Laut 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.3.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut TA 2020 - 2024

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	PERGESERAN TAHUN. 2023	RKPD TAHUN 2024*
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	Rp. 1.535.660.520.668,00	Rp. 1.894.067.926.592,83	Rp. 1.863.861.922.192,92	Rp. 2.256.008.579.118,00	Rp. 2.087.672.343.526,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 1.002.473.431.818,00	Rp. 1.214.778.642.853,00	Rp. 1.241.627.856.198,92	Rp. 1.438.779.603.952,00	Rp. 1.405.063.771.482,00
5.2.01	Belanja Pegawai	Rp. 578.446.294.875,00	Rp. 639.840.569.796,56	Rp. 653.956.945.688,00	Rp. 752.559.542.098,00	Rp. 655.312.645.958,00
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 392.824.218.663,00	Rp. 505.996.286.092,44	Rp. 520.933.208.907,92	Rp. 615.404.322.591,00	Rp. 653.987.299.110,00
5.2.05	Belanja Hibah	Rp. 25.056.029.030,00	Rp. 53.691.496.964,00	Rp. 44.321.201.603,00	Rp. 59.813.749.263,00	Rp. 78.605.153.414,00
5.2.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.146.889.250,00	Rp. 15.250.290.000,00	Rp. 22.416.500.000,00	Rp. 11.001.990.000,00	Rp. 17.158.673.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 208.749.071.699,00	Rp. 443.098.788.114,83	Rp. 397.257.596.454,00	Rp. 557.491.187.675,00	Rp. 402.387.096.117,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp. 5.545.262.443,00	Rp. 2.897.145.120,00	Rp. 240.492.000,00	Rp. 1.481.250.000,00	Rp. 5.460.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 58.400.912.689,00	Rp. 87.589.675.673,00	Rp. 91.151.091.039,00	Rp. 102.687.162.806,00	Rp. 94.025.662.710,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 44.763.996.794,00	Rp. 125.469.046.825,83	Rp. 104.788.622.560,00	Rp. 184.880.578.643,00	Rp. 143.211.351.722,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 98.075.489.148,00	Rp. 226.307.789.870,00	Rp. 200.681.712.555,00	Rp. 261.771.625.221,00	Rp. 158.876.022.629,00

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 280.695.625,00	Rp. 835.130.626,00	Rp. 16.548.300,00	Rp. 559.600.000,00	Rp. 261.889.937,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 1.682.715.000,00		Rp. 379.130.000,00	Rp. 6.110.971.005,00	Rp. 552.169.119,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp. 84.356.731.883,00	Rp. 6.471.571.965,00	Rp. 746.426.000,00	Rp. 18.672.915.145,00	Rp. 25.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp. 84.356.731.883,00	Rp. 6.471.571.965,00	Rp. 746.426.000,00	Rp. 18.672.915.145,00	Rp. 25.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp. 240.081.285.268,00	Rp. 229.718.923.660,00	Rp. 224.230.043.540,00	Rp. 241.064.872.346,00	Rp. 255.221.475.927,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp. 4.376.364.987,00	Rp. 5.183.544.470,00	Rp. 4.895.286.950,00	Rp. 6.111.780.450,00	Rp. 5.927.142.309,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 235.704.920.281,00	Rp. 224.535.379.190,00	Rp. 219.334.756.590,00	Rp. 234.953.091.896,00	Rp. 249.294.333.618,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut, 2023

Keterangan

* : penyusunan proyeksi belanja pada RKPD 2024 belum mengakomodir Belanja yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga proyeksi belanja pada tahun 2024 lebih rendah dari belanja pada tahun 202

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berdasarkan hasil analisis perkiraan dan realisasi pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 serta dengan melihat target pada tahun 2023, maka penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 diasumsikan sudah memperhitungkan adanya SiLPA dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kapasitas fiskal Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 200.000.000.000,- dengan rincian penggunaan terdiri dari : komponen penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalsel sebesar Rp. 125.000.000.000; dan pinjaman daerah untuk investasi kepada PT. BPR Tala Manuntung sebesar Rp. 75.000.000.000,-. Hasil analisis terhadap Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Tabel 3.3 berikut

**Tabel 3.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024**

KODE	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	APBD Pergeseran TAHUN 2023	PROYEKSI TA 2024
1	2	3	4	5	6	7
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 922.210.305.934,34	Rp. 996.156.725.010,11	Rp. 611.325.812.033,83	Rp 555.814.594.097,00	Rp. 433.426.669.533,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 922.160.938.434,34	Rp. 990.302.466.610,11	Rp. 604.990.188.933,83	Rp 551.814.594.097,00	Rp. 433.426.669.533,00
6.1.45	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 49.367.500,00	Rp. 5.747.184.400,00	Rp. 6.004.455.100,00	Rp 4.000.000.000,00	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		Rp. 107.074.000,00	Rp. 331.168.000,00		-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 20.000.000.000,00	Rp. 75.000.000.000,00	Rp 58.318.896.928,00	Rp. 200.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 40.000.000.000,00	Rp 20.000.000.000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah			Rp. 25.000.000.000,00	Rp 28.318.896.928,00	Rp. 125.000.000.000,00
	PT. Bank Kalsel			Rp. 25.000.000.000,00	Rp 28.318.896.928,00	Rp. 125.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp. 75.000.000.000,00
	PT. BPR (Gapura Karomah)	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	
	PT. BPR (investasi)					Rp. 75.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO				Rp. 536.325.812.033,83	Rp 149.232.352.139,00	Rp. 233.426.669.533,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut, 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen RPD 2024-2026 disusun dengan tanpa Visi Misi Kepala Daerah, namun memuat tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis aktual. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2024 diambil dari tujuan dan sasaran pada dokumen RPD 2024-2026. Berikut Tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya pada tahun 2024.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET
				2022 (Real)	2023 (Proyeksi)	2024
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		IPM	70,35	70,4 - 70,72	70,80
	1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,32	12,35	12,37
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	7,95	8,05
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,86	69,94	69,96
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi	22,22	30	40
			Persentase atlet berprestasi	86,97	85	85
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	87,28	87,30	87,32
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Pertumbuhan Ekonomi	5,12	4,5 - 5,0	4,6 - 5,0
			Gini Ratio	0,263	0,230	0,229
			Angka Kemiskinan	3,86	3,55	3,45

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET
				2022 (Real)	2023 (Proyeksi)	2024
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	2,70	3,80	2,85
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,86	3,48	3,52
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,10	4,81	4,9
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum)	6,54	12,10	11,75
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	83,91	5	5
	2.6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	43,64	47,11	47,91
	2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	IKLH	67,78	68,47	68,57
			Indeks Resiko Bencana	156,33	153,2	150,1
	2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	13,32	15	17,5
	2.9	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	82,06	82,3	82,6
	2.10	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,17	3,55	3,45
	2.11	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	0.707	0,73	0,74
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	60,19 (Baik)	61	62
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	67.28 (B)	69.00 (B)	70.01 (BB)
	3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	49,38 (SPP)	61 (PB)	66 (PB)

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET
				2022 (Real)	2023 (Proyeksi)	2024
	3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik	4,53 / A	4,53 / A	4,54 / A
	3.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,11	3,15	3,2

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2023 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yakni.

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tujuh Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni. (1) pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, (2) pengelolaan terpadu UMKM, (3) food estate, (4) Sepuluh destinasi pariwisata prioritas, (5) akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, (6) reformasi sistem perlindungan sosial, (7) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (8) Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0), (9) percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, (10) wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, (11) pembangunan Ibu Kota Nusantara, (12) jaringan pelabuhan utama terpadu, (13) transformasi digital, dan (14) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2024 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; (3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; (4) Penguatan Daya Saing Usaha; (5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan (8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum di dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Tema tersebut memiliki makna pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek local Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (social, ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan lima prioritas pembangunan antara lain:

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berdaya saing
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah
4. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang focus pada pelayanan public
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

4.2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanah Laut

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota pasal 54 ayat (1) Badan anggaran DPRD mempunyai tugas dan mwewenang untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan. Saran dan pendapat berupa rumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan masyarakat. Dalam perumusan Pokir DPRD harus di selaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan masukan DPRD ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam upaya kesejahteraan masyarakat antara lain, sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan permintaan dana hibah sehingga perlu adanya penyesuaian kenaikan pagu dari tahun sebelumnya
2. Kepastian dana Hibah 1 Milyar untuk kegiatan sosial, agama dan olahraga diharapkan tetap dilanjutkan untuk tahun 2024
3. Kebanyakan pokir DPRD tetap berkisar atau lebih besar perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain
4. Peningkatan infrastruktur pendidikan yang harus menjadi skala prioritas
5. Pemenuhan sarana dan prasarana dan perlindungan sumber mata air yang ada di Kabupaten Tanah Laut
6. Bidang pertanian yang perlu menjadi perhatian dengan seringnya gagal panen dan kelangkaan pupuk yang menjadi permasalahan besar petani

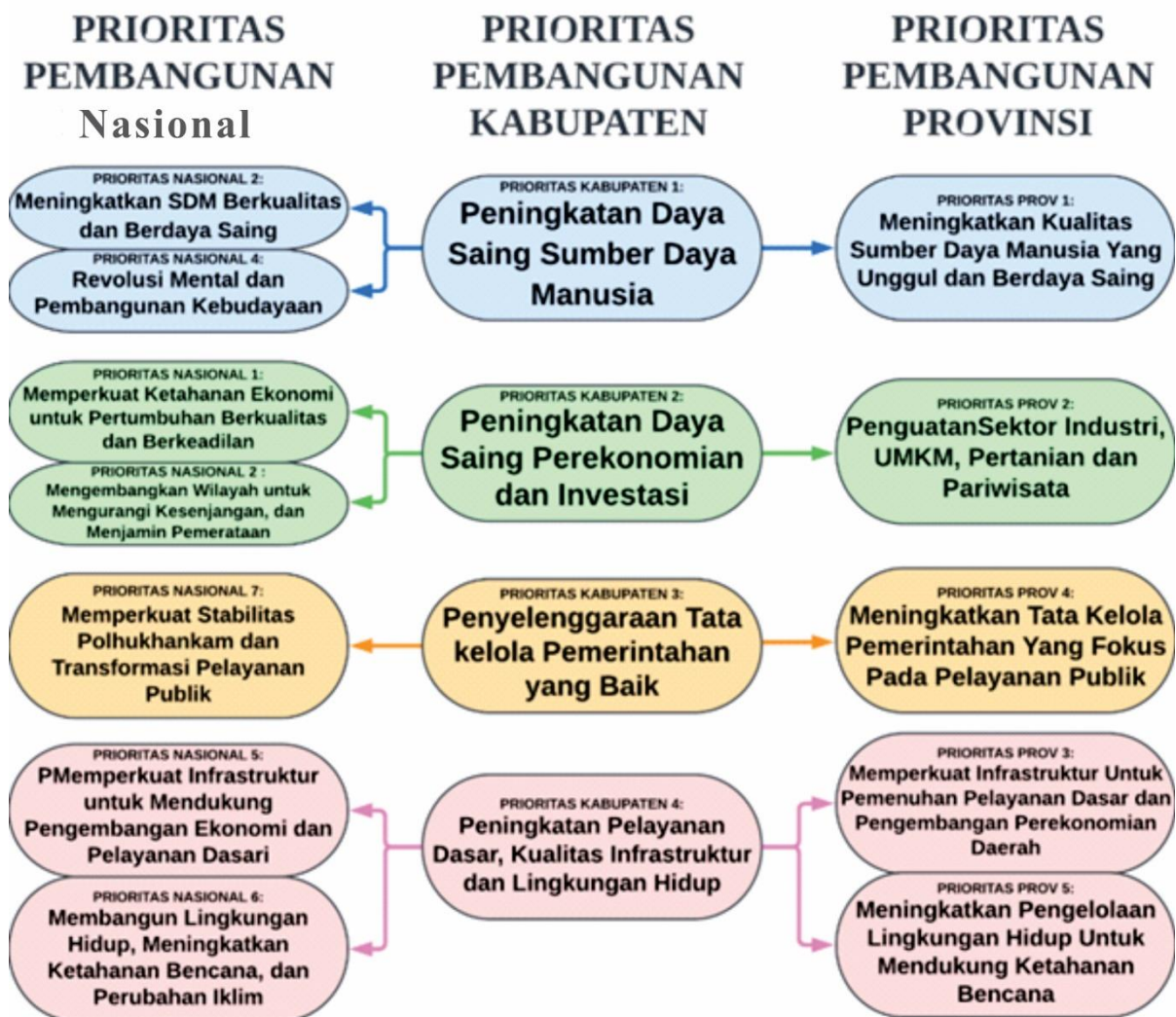
7. Sektor peternakan yang menjadi lumbung sapi, diperlukan kerjasama dengan pengusaha pemilik HGU agar melaksanakan tumpang sari dengan perkebunan yaitu: angon sapi guna menambah populasi sapi
8. Guna meningkatkan ekonomi masyarakat kita perlu juga menggalakkan perikanan darat di kelompok-kelompok masyarakat dengan kehadiran pemerintah daerah sebagai motor penggerak
9. Peningkatan UMKM yang bisa memberikan warna baru ekonomi di tengah masyarakat
10. Membuka lapangan kerja baru yang harus mendapatkan perhatian serius
11. Meningginya permukaan air laut yang harus mendapatkan perhatian serius mengingat kabupaten Tanah Laut mempunyai garis pantai yang panjang sehingga potensi abrasi menjadi skala prioritas
12. Terkait kebutuhan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut dari belanja yang sifatnya dikerjakan sewaktu-waktu dalam rangka menunjang BOC di Bina Marga, Swakelola di Cipta Karya dan SOS di pengairan, serta LAPANPATAS di penunjang pertanian agar dapat dilanjutkan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung fasilitas penunjang ekonomi masyarakat yang memadai dan mendesak
13. Pengelolaan DBH, DAU, dan DAK harus lebih cermat lagi dalam pengelolaan APBD.

4.2.4 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam RKPD Tanah Laut Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, di level provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan hasil penyelarasan tersebut dan analisa isu-isu strategis permasalahan pembangunan daerah serta pencapaian pembangunan daerah yang ada, maka pembangunan di tahun 2024 diarahkan pada tema/agenda pembangunan **“Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia dengan Pelayanan Dasar dan Infrastruktur yang berkualitas”** yang dirumuskan dalam 4 prioritas pembangunan, yakni.

1. Pemantapan daya saing sumber daya manusia.
2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi.
3. Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2024, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Keterkaitan antara prioritas nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat dalam Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Penentuan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sangat berkaitan dengan perumusan permasalahan pembangunan daerah dan penentuan Isu Strategis Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II sebelumnya. Oleh sebab itu 4 (empat) Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Laut dimaksud memiliki keterkaitan dengan Isu Strategis Daerah sebagaimana Tabel Berikut.

Tabel 4.2 Hubungan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut 2024

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
Akseibilitas Pendidikan dan Kesehatan	Pemantapan daya saing sumber daya manusia
Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi	Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi
Penyangga Pangan IKN	
infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Pilpres, Pilleg, dan Pilkada Serentak	

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 di kabupaten Tanah Laut diperlukan Strategi, Arah Kebijakan dan program prioritas. Keselarasan Prioritas pembangunan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan

NO	PRIORITAS/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Pemantapan daya saing sumber daya manusia		
	1.1 Meningkatkan layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Meningkatkan Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, PAUD, dan Kesetaraan	Memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan Sekolah yang memadai dan layak guna
			Melaksanakan pendidikan bagi warga belajar di PKBM
		Meningkatkan jumlah Sekolah yang terakreditasi	Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan
			Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan	Melaksanakan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan

NO	PRIORITAS/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
				Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda	Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaan agar dapat partisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif
				Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera	Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
				Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan
				Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender
				Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2	Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi			
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian

NO	PRIORITAS/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga)
			Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
		Meningkatkan populasi dan produksi peternakan	Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak
			Peningkatan populasi dan produktivitas ternak.
			Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak.
			Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing.
			Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil
			Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
	2.2 Meningkatkan laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri	Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar
			Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
			Melaksanakan pembinaan, pendampingan monitoring dan evaluasi Sentra IKM

NO	PRIORITAS/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2.3 Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Memperkuat pertumbuhan ekonomi di perdagangan	Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah
			Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
			Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah
		Peningkatan kualitas kinerja Koperasi dan UMKM naik kelas	Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan
	2.4 Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Meningkatkan upaya pengembangan destinasi, promosi dan kelembagaan pariwisata daerah	Pengembangan pemasaran pariwisata
			Pengembangan destinasi pariwisata prioritas
			Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif
	2.5 Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing	Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal
			Peningkatan kualitas pelayanan Penanaman modal
			Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta
	2.6 Meningkatnya kemandirian PPKS	Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor	Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan
			Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi "GAMIS" (Gerakan Atasi Kemiskinan)
			Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

NO	PRIORITAS/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosia Bagi PMKS.
				Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
	2.7	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat	Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan
	2.8	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi
				Melaksanakan peningkatan Produktivitas pada Perusahaan
			Meningkatkan Penempatan tenaga kerja	Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja
				Melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan dan perluasan kesempatan kerja
			Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan
	2.9	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	meningkatkan status atau kelas desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3	Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
	3.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan	Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten
				Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana
				Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan.

NO	PRIORITAS/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan	Penyediaan Infrastruktur persampahan
				Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan
			Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Tanah Laut
				Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana perhubungan
				Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
			Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah
				Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan
	3.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle
			Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah	Percepatan penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah serta Integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
	4.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.	Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan. Penerapan Satu data Tanah Laut penguatan sistem inovasi daerah
			Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan level Maturitas SPIP Peningkatan Level Kapabilitas APIP

				Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah
	4.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah
	4.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha
				Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan
				Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
				Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja
				Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik
				Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
				Peningkatan kualitas e-procurement
				Peningkatan kualitas Layanan pada kecamatan
				Peningkatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
				Peningkatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	4.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-Government

Guna mengimplementasikan masing-masing kebijakan pembangunan dan arah pencapaian kebijakan pada setiap prioritas daerah, maka disusun program-program prioritas daerah beserta indikatornya. Berikut program prioritas daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sesuai dengan prioritas dan sasaran yang ditampilkan pada table berikut

Tabel 4.4 Prioritas, sasaran dan Program Prioritas Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD Penanggung Jawab
1	Pemantapan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
			Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
			Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pengendalian Penduduk	DP2KBP3A
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP3A
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP2KBP3A

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP3A
			Program Perlindungan Perempuan	DP2KBP3A
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP2KBP3A
			Program Perlindungan Khusus Anak	DP2KBP3A
2	Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan investasi	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD Penanggung Jawab
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
			Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
			Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan
		Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD Penanggung Jawab
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Meningkatnya kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		Meningkatnya ketahanan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD Penanggung Jawab
		Menurunnya tingkat pengangguran	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Program Penataan Desa	DPMD
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMD
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
3	Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPRP
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPRP
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPRP
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPRP
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPRP
			Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPRP
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPRP
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPRP
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	DPUPRP

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD Penanggung Jawab
			Program Penatagunaan Tanah	DPUPRP
			Program Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
			Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	DPRKPLH
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DPRKPLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DPRKPLH
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DPRKPLH
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
			Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD Penanggung Jawab
	Baik (Good Governance)			
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
		Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
			Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Damkar
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Damkar

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD Penanggung Jawab
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Umum	Kecamatan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbang Pol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbang Pol
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbang Pol
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesbang Pol
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas	Badan Kesbang Pol

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	SKPD Penanggung Jawab
			Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
			Program Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Kominfo

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. RKPD Tahun 2024 merupakan tahun awal pelaksanaan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Rancangan RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD dengan tema **“PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PELAYANAN DASAR DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS”**.

Adapun daftar pagu indikatif per SKPD yang akan digunakan dalam membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Daftar Pagu Indikatif per SKPD untuk membiayai Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	20	127	402.196.560.223
2	Dinas Kesehatan	5	22	80	241.368.551.092
3	Balai Laboratorium Kesehatan	2	6	9	477.500.000
4	Instalasi Farmasi Kabupaten	1	3	7	520.197.454
5	RSUD Hadji Boejasin	4	15	30	113.137.217.055
6	RSUD K.H. Mansyur Kintap	3	8	14	20.340.233.556
7	UPTD Puskesmas Angsau	1	2	2	1.399.000.000
8	UPTD Puskesmas Batakan	1	2	2	1.522.069.061
9	UPTD Puskesmas Bati-Bati	1	2	2	1.872.000.000
10	UPTD Puskesmas Asam-Asam	1	2	2	1.366.540.000
11	UPTD Puskesmas Bumi Makmur	1	2	2	1.140.000.000
12	UPTD Puskesmas Jorong	1	2	2	977.096.660
13	UPTD Puskesmas Kait-Kait	1	2	2	533.077.936
14	UPTD Puskesmas Kintap	1	2	2	1.887.750.000
15	UPTD Puskesmas Padang Luas	1	2	2	979.667.403
16	UPTD Puskesmas Panyipatan	1	2	2	1.215.127.694
17	UPTD Puskesmas Pelaihari	1	2	2	1.767.455.880

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
18	UPTD Puskesmas Sungai Cuka	1	2	2	786.400.000
19	UPTD Puskesmas Sungai Riam	1	4	5	681.921.434
20	UPTD Puskesmas Tajau Pecah	1	2	2	1.153.475.057
21	UPTD Puskesmas Tambang Ulang	1	2	2	1.373.000.000
22	UPTD Puskesmas Takisung	1	2	2	2.467.198.816
23	UPTD Puskesmas Tanjung Habulu	1	5	8	646.500.037
24	UPTD Puskesmas Tirtajaya	2	7	4	985.844.878
25	UPTD Puskesmas Kurau	1	5	9	830.093.220
26	UPTD Puskesmas Durian Bungkuk	1	2	2	1.103.650.000
27	UPTD Puskesmas Bentok Kampung	2	3	3	1.005.257.361
28	UPTD Puskesmas Panggung	2	5	9	1.370.963.277
29	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11	21	100	317.667.420.515
30	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	12	25	68	80.870.637.598
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	11	33	18.400.066.067
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	36	6.559.597.512
33	Dinas Sosial	6	14	44	13.335.220.888
34	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	20	69	16.207.397.822
35	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	20	49	11.372.574.037
36	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	20	47	10.968.472.830
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	11	28	8.630.920.101
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12	47	13.651.688.282
39	Dinas Perhubungan	3	16	41	29.000.763.347
40	Dinas Komunikasi dan Unformatika	5	12	39	13.167.702.809
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	10	18	41	15.172.681.531
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	29	6.193.888.691
43	Dinas Kepemudaan dan OlahRaga	4	16	59	48.744.069.837
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	16	38	6.826.171.192
45	Dinas Pariwisata	5	14	37	12.214.012.642
46	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	6	14	34	39.732.426.493

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
47	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	5	16	37	14.363.389.278
48	Sekretariat Daerah	3	18	59	96.618.117.954
49	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	15	44	61.939.110.442
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	16	44	12.864.272.215
51	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	12	57	301.985.677.767
52	Badan Pendapatan Daerah	2	8	33	12.301.489.493
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	13	36	14.620.173.797
54	Inspektorat Kabupaten	3	10	36	21.155.047.246
55	Kantor Kecamatan Bajuin	6	12	33	3.753.848.610
56	Kantor Kecamatan Bati-Bati	6	12	26	4.656.437.594
57	Kantor Kecamatan Batu Ampar	6	12	30	4.067.383.190
58	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	6	10	23	4.904.864.824
59	Kantor Kecamatan Jorong	6	12	36	5.677.252.898
60	Kantor Kecamatan Kintap	6	12	34	3.738.648.169
61	Kantor Kecamatan Kurau	6	12	34	3.777.813.820
62	Kantor Kecamatan Pelaihari	6	13	138	17.974.913.983
63	Kantor Kecamatan Panyipatan	6	12	38	4.035.949.721
64	Kantor Kecamatan Takisung	6	13	36	4.396.393.585
65	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	6	12	31	3.921.380.644
66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	60	17.100.118.008
	TOTAL PAGU	257	671	2041	2.087.672.343.526

Sumber : Bappeda Kabupaten Tanah Laut 2023

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat dalam lampiran RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari Indikator Tujuan, Indikator Sasaran Daerah, Indikator Kinerja sasaran PD dan Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang tertuang pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	IPM	Nilai	70,80
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,6 - 5,0
3	Gini Ratio	Nilai	0,229
4	Angka Kemiskinan	Nilai	3,45
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	62

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Sasaran Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	Satuan	Target 2024
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,37
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,05
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,96
4	Persentase pemuda berprestasi	Persen	40
5	Persentase atlet berprestasi	Persen	85
6	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	89,50
7	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Pertanian dan Perikanan	Persen	2,85
8	Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Industri Pengolahan	Persen	3,52
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persen	4,9
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum)	Persen	11,75
11	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	5
12	Indeks Infrastruktur	Nilai	47,91
13	IKLH	Nilai	68,57
14	Indeks Resiko Bencana	Nilai	150,1
15	Persentase PPKS yang Mandiri	Persen	17,5
16	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,6
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,45
18	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	Nilai	0,74
19	Nilai SAKIP KABUPATEN	Nilai	70,01 (BB)
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	66 (PB)

No	Indikator	Satuan	Target 2024
21	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,54 / A
22	Indeks SPBE	Nilai	3.2

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Angka Partisipasi Murni SD	Persen	89,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	57,31	
3	Angka Partisipasi PAUD	Persen	77,28	
4	Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	Persen	60,55	
5	Persentase Seni Budaya local dan cagar budaya local yang dilestarikan	Persen		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	57,73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Indeks Pembudayaan Kegemaran Membaca	Angka	72,54	
8	Angka Kematian Ibu	Angka	46	Dinas Kesehatan
9	Angka Kematian Bayi	Angka	8	
10	Prevelensi Stunting	Persen	14	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,05	DP2KBP3A
13	Jumlah Pemuda Berprestasi	Pemuda	32	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
14	Jumlah Medali Olahraga	Medali	50	
15	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	73,05	DP2KBP3A
16	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di tangani	Persen	100	
17	Produksi Hasil Perikanan	Ton	67.463	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
18	Produksi Hasil Pertanian			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Padi	Ton	143.962	
	Jagung	Ton	122.835	
	Cabe	Ton	2.350,90	
	Bawang Merah	Ton	11	
	Karet	Ton	14.601,70	
	Kelapa Sawit	Ton	50.865,70	
19	Produksi Hasil Peternakan	Ton		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Daging :			
	Sapi Potong		565	
	Kerbau		6	
	Kambing		121	
	Ayam Buras		1,399	
	Ayam Ras Pedaging		27,773	
	Itik		297	

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Telur :			
	Ayam Buras		2,956	
	Ayam Ras Petelur		49,663	
	Itik		1,088	
20	Pertumbuhan Nilai Usaha IKM	Persen	3,6	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
21	Persentase Koperasi berkualitas	Persen	27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
22	Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil	Persen	1,80	
23	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Usaha	Persen	100	
24	Persentase Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	Persen	6,25	Dinas Pariwisata
25	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Milyar	1.568,66	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	43,19	DPRKPLH
27	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Nilai	26,9	Dinas Perhubungan
28	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	73,65	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
29	Indeks Kualitas Air	Nilai	58,72	DPRKPLH
30	Indeks Kualitas Udara	Nilai	92,15	
31	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	41,88	
32	Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	65	Dinas Sosial
34	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Sosial	Persen	90	
35	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	72	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
36	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	91	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
37	Jumlah Tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Orang	270	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
38	Jumlah Pencari Kerja (terdaftar dan tidak terdaftar)	Orang	7350	
39	Jumlah lowongan Kerja		320	

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
40	Serapan Tenaga Kerja (terdaftar dan tidak terdaftar)	Orang	1180	
41	Persentase Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	Persen	40	
42	Persentase Desa Mandiri	Persen	13,1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
43	Nilai SAKIP Kabupaten (Perencanaan dan Pengukuran)	Nilai	43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
44	Nilai SAKIP Kabupaten (Pelaporan)	Nilai	11,5	Sekretariat Daerah
45	Nilai SAKIP Kabupaten (Pengawasan)	Nilai	20	Inspektorat Daerah
46	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,340	Inspektorat Daerah
47	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3	
48	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	52,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
49	Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai	62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
50	Tingkat Kemandirian Fiskal (Tingkat Pendapatan Asli Daerah)	Persen	10,81	Badan Pendapatan Daerah
51	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
52	IKM Kecamatan	Nilai		Kecamatan
	Pelaihari		87,5	
	Bajuin		83	
	Batu Ampar		86	
	Jorong		84	
	Kintap		90	
	Panyipatan		86	
	Takisung		90,05	
	Bumi Makmur		92,50	
	Kurau		90,3	
	Tambang Ulang		80,25	
	Bati-bati		90,2	
53	IKM DPMPTSP	Nilai	90,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Satu Pintu
54	IKM Sekretariat Daerah	Nilai	93,5	Sekretariat Daerah
55	IKM Disdukcapil	Nilai	92,15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
56	Capaian SPM Trantibum	Persen	100	Satpol PP dan Damkar
57	Indeks kepuasan Anggota DPRD	Nilai	82	Sekretariat DPRD
58	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	61,50	BKPSDM

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
59	Persentase Pencapaian Domain SPBE	Persen	64	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Tabel 6.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
(Sesuai Hasil Kesepakatan Rakortekbang)**

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
1	Pendidikan	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	77,28	100
2	Pendidikan	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Persen	89,54	100
3	Pendidikan	Jumlah warga Negara usia 8-17 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	Persen	60,55	100
4	Pendidikan	Iklim Keamanan SD	Nilai	-	86,40
5	Pendidikan	Iklim Keamanan SMP	Nilai	-	86,73
6	Pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	-	91,65
7	Pendidikan	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	-	88,74
8	Pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	-	78,63
9	Pendidikan	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	-	81,56
10	Pendidikan	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan hasil Assesmen Nasional	Nilai	-	56,40
11	Pendidikan	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan hasil Assesmen nasional	Nilai	-	40,42
12	Pendidikan	Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan hasil Assesmen Nasional	Nilai	-	73,51
13	Pendidikan	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan hasil Assesmen nasional	Nilai	-	60,22
14	Pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	-	78,58
15	Pendidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S-1/D-IV	Persen	-	84,21
16	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,14	-
17	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100
18	Kesehatan	Persentase FKTP Terakreditasi	Persen	-	87
19	Kesehatan	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	-
20	Kesehatan	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	-

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
21	Kesehatan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	-
22	Kesehatan	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	95
23	Kesehatan	Prevelensi Wasting pada Balita	Persen	-	7
24	Kesehatan	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	-
25	Kesehatan	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan dasar Kesehatan	Persen	100	-
26	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	-
27	Kesehatan	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	-
28	Kesehatan	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	-
29	Kesehatan	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	-
30	Kesehatan	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Persen	100	-
31	Kesehatan	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC	Persen	-	95
32	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100
33	Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	-	100
34	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	15,57	-
35	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	49,67	-
36	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang Infrastruktur Pengendalian Banjir/Abrasi di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi	Km	-	3,3
37	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	76,73	-
38	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas Jaringan Daerah Irigasi Teknis yang Direhabilitasi	Ha	-	3075

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
39	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	78	81
40	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	78	78
41	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sampah yang Terkelola dengan Baik di Perkotaan	Persen	-	90
42	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	100	-
43	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	85	85
44	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	1,61	-
45	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	-
46	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penetapan RDTR	Perda/ Perkada	-	2
47	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Tekni	-	3
48	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	-
49	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	-
50	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Hunian Baru Layak yang Terbangun melalui Fasilitas Pemerintah	Unit	-	300

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
51	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persen	12,86	-
52	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	Ha	-	2
53	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	Unit	-	100
54	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persen	2,69	-
55	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	-	97.63
56	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Persen	46,07	-
57	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Rumah yang Dilayani Bantuan PSU pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	Unit	-	1000
58	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100
59	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	92,308	-
60	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Perda/ Perkada	-	10
61	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat Kab/Kota	Persen	-	20

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
62	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Aparatur SatpolPP yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	Persen	-	50
63	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualifikasi sebagai PPNS	Orang	-	5
64	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Anggota Satlinmas yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	-	10
65	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	-
66	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	-
67	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana	Persen	-	75
68	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	-	25
69	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	-
70	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Persen	-	100
71	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	4,9	-

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
72	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	51,16	-
73	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	32,37	-
74	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	48,76	-
75	Sosial	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persen	-	100
76	Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Orang	-	10
77	Sosial	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Dimiliki	Unit	-	5
78	Sosial	Jumlah Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Layanan Terpadu Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Command Center	Desa	-	130
79	Sosial	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Masuk dalam DTKS	Orang	-	10
80	Sosial	Jumlah TJSLBU (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	Badan Usaha	-	20
81	Sosial	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	KPM	-	25
82	Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	KPM	-	8000
83	Sosial	Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	Orang	-	3
84	Sosial	Jumlah PSKS Perorangan yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai standar	Orang	-	360
85	Sosial	Jumlah KPM yang dirujuk untuk mendapatkan pendampingan usaha	KPM	-	25
86	Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (PKH)	KPM	-	8500
87	Sosial	Persentase SDM PKH yang Melaksanakan P2K2	Persen	-	100

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
88	Sosial	Jumlah lembaga di bidang kesos yang mendapatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan	Lembaga	-	11
89	Sosial	Jumlah paket bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Paket	-	1
90	Sosial	Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako	KPM	-	10000
91	Sosial	Jumlah penerbitan ijin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kab/Kota	SK	-	10
92	Sosial	Presentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	-	100
93	Sosial	Presentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	-	100
94	Sosial	Presentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	-	100
95	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persen	-	100
96	Sosial	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persen	-	100
97	Sosial	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persen	-	100
98	Sosial	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan Lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persen	-	100
99	Sosial	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia di rumah singgah/shelter	Paket	-	30
100	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan di rumah singgah/shelter	Orang	-	30
101	Sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Unit	-	1
102	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang	-	20
103	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Orang	-	30
104	Sosial	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Alat	-	2
105	Sosial	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Pekerja	-	3

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
106	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Orang	-	3
107	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang	-	10
108	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	-	20
109	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Orang	-	10
110	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	-	100
111	Sosial	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan tempat penampungan	Orang	-	5000
112	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	Orang	-	5000
113	Sosial	Jumlah korban bencana kelompok rentan	Orang	-	1000
114	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang	-	10
115	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	-	300
116	Sosial	Jumlah Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Orang	-	30
117	Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial dan non alam yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Orang	-	150
118	Sosial	Jumlah Tagana yang meningkat kompetensinya	Orang	-	34
119	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	90	-
120	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,15	-
121	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	11	-
122	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	6,7	-

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
123	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	Persen	-	72
124	Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	-	862
125	Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Orang	-	192
126	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	-	34200
127	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	10	7,50
128	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	-
129	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	-	100
130	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,006	-
131	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	-	100
132	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	-	64,34
133	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	114	
134	Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	-	15
135	Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	-	11,85
136	Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	-	85
137	Pertanahan	Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	-
138	Pertanahan	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	-	400
139	Pertanahan	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	KK	-	200

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
140	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	68,57	68,57
141	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	100	-
142	Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	70	70
143	Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	-	1
144	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Perekaman KTP elektronik	Persen	99,6	-
145	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	55	-
146	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Kepemilikan akta kelahiran	Persen	99	99
147	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	5	-
148	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	-	100
149	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	-	100
150	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persen	-	100
151	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	-	90
152	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	Tidak ada desa tertinggal	0
153	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	2	-

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
154	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	Desa	-	130
155	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	Orang	-	260
156	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	-	130
157	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	-	18
158	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah Desa Berkembang	Desa	-	40
159	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah BUM Desa Berkembang	Bumdes	-	2
160	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah BUM Desa Maju	Bumdes	-	1
161	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Nilai	-	2
162	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Maju	Bumdesma	-	3
163	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) Berkembang	Bumdesma	-	7
164	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,08	-
165	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	77,00	-
166	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	8,53	11,5
167	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	-	61
168	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	-	29

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
169	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	-	2,24
170	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	-	75
171	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	1	1
172	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	-	0,63
173	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio	0,25	-
174	Perhubungan	On Time Performance Layanan Transportasi	Persen	-	82
175	Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	-	82
176	Perhubungan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10 ribu Keberangkatan	Rasio	-	0,0050
177	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	77,5	77,5
178	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	-
179	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	1,5	-
180	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	-	77,5
181	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persen	-	15
182	Komunikasi dan Informatika	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persen	-	100
183	Komunikasi dan Informatika	Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan	Persen	-	60
184	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persen	-	2
185	Komunikasi dan Informatika	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	-	58

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
186	Komunikasi dan Informatika	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Persen	-	82
187	Komunikasi dan Informatika	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah (survei)	Persen	-	85
188	Komunikasi dan Informatika	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persen	-	100
189	Komunikasi dan Informatika	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	Persen	-	85
190	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	Persen	-	85
191	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	27	27,80
192	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	0.94	-
193	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	-	15
194	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	-	1,43
195	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen	-	0,13
196	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	-	1,4
197	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	5	-
198	Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rupiah	-	1800931000000
199	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	30	-
200	Kepemudaan dan Olahraga	Terbentuknya Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Tingkat Kabupaten	Dokumen	1	1

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
201	Kepemudaan dan Olahraga	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat Kab/Kota	Dokumen	1	1
202	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	50	0s
203	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100
204	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100
205	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	13.5	13.5
206	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	80	80
207	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	68	-
208	Persandian	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	1	1
209	Persandian	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Daerah	1	1
210	Persandian	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	1	1
211	Persandian	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	Persentase	52	52
212	Persandian	Jumlah Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIV	Orang	1	1
213	Kebudayaan	tingkat pelestarian cagar budaya	Persen	61.62	61.62
214	Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara ada	Persen	23.06	23.06
215	Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persen	50	50
216	Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persen	15	15
217	Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persen	2.04	2.04
218	Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	61.62	61.62

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
219	Kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persen	0.56	0.56
220	Kebudayaan	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Persen	0.50	0.50
221	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72.54	72.54
222	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	57.73	57.73
223	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	66.997	66.997
224	Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.436	1.436
225	Pariwisata	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	300.000.000	300.000.000
226	Pariwisata	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	510.000	510.000
227	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	5	-
228	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	10	-
229	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Persen	7	-
230	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	7	-
231	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,12	-
232	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Persen	267.436	-
234	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Persen	1	
235	Pertanian	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	30.161	30.161
236	Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis padi	Persen	0.14	0.14
237	Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan jenis jagung	Persen	0.13	0.13
238	Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis cabai	Persen	0.42	0.42
239	Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura jenis bawang merah	Persen	1.08	1.08
240	Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kopi	Persen	1.00	1.00
241	Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis kelapa	Persen	1.00	1.00
242	Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis karet	Persen	1.98	1.98
243	Pertanian	persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis lada	Persen	0.9	0.9

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
245	Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan jenis Cengkeh	Persen	42.00	42.00
246	Pertanian	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Persen	100	100
247	Pertanian	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Persen	96	96
248	Pertanian	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Persen	50.00	50.00
249	Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	Persen	100	100
250	Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	Persen	96	96
251	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100
252	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	100	100
253	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100	100
254	Perdagangan	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	100	100
255	Perindustrian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	3.6	3.6
256	Perindustrian	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	Persen	8.50	8.50
257	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota		5	
258	Perindustrian	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	4.3710	4.3710
259	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	50	-
260	Perindustrian	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp.	2.1	2.1
261	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	60	-

No.	Urusan	Indikator	Satuan	Target 2024	
				RPD	Kesepakatan Rakortekbang
262	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	65	-
263	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	80	-
264	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Nilai	70	-
265	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Rasio	10,81	-
266	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,340	-
267	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	-
268	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	-
269	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	38	-
270	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio	59	-
271	Pengadaan	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	3	-
272	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	318,61	-
273	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	18,67	-
274	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	4,44	-

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, dan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026. RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rancangan kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RKPD ini menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Nota kesepakatan KUA dan PPAS akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Kemudian fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Agar program dan kegiatan masing-masing OPD dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target- target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing

RKPD Kabupaten Tanah Laut 2024 masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Kemudian RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Jika pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian- penyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, 3 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA